



© UNICEF/UNI1389198/Wilander

Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi COVID-19 pada Rumah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia

Didukung oleh:



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Australian Government
Department of Foreign Affairs and Trade



JAPAN GOV
THE GOVERNMENT OF JAPAN



UN COVID-19 Response
and Recovery Fund
#RecoverBetterTogether



**UNITED NATIONS
INDONESIA**

Kata Pengantar

Di Indonesia, 2019 merupakan tahun yang penting: tingkat kemiskinan turun hingga di bawah 10 persen dan Indonesia menjadi negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Indonesia meraih tonggak capaian positif selama hampir 20 tahun. Sayangnya, 2020 juga merupakan tahun penting sebab pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap kehidupan banyak orang Indonesia, khususnya masyarakat yang rentan. Seiring dengan upaya Indonesia, dan negara-negara tetangganya, menggalakkan vaksinasi, dampak nyata pandemi COVID-19 terhadap kehidupan keluarga dan anak-anak masih terus muncul.

Di Indonesia, data dari SUSENAS di bulan Maret 2019 memperlihatkan 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (9,4 persen penduduk). Selanjutnya, 55 juta orang (atau 20,6 persen penduduk) hidup sedikit di atas garis kemiskinan – maknanya, mereka rentan menjadi miskin. Terkait hal itu, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan kini mungkin mencapai 30 persen akibat pandemi. Dengan meningkatnya jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, pelaksanaan penelitian dan penerapan pelajaran yang dipetik mengenai dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap kelompok rentan dan anak-anak jelas perlu dipercepat agar kebijakan dan program multisektor bisa dikembangkan untuk mengatasi dampak tersebut.

Guna memahami dampak sosial dan ekonomi COVID-19 terhadap perempuan, rumah tangga dengan anak, kelompok rentan, dan penyandang disabilitas survei rumah tangga terbesar di Indonesia dilakukan antara bulan Oktober dan Desember 2020. Survei tersebut dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan lebih dari 12.000 rumah tangga di 34 provinsi dan 247 kabupaten. Hasil survei tersebut mengungkapkan informasi tentang dampak COVID-19 terhadap lapangan kerja, usaha mikro, ketahanan pangan, akses ke layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan akses ke program perlindungan sosial. Lebih jauh, survei ini memberi wawasan mengenai dampak pandemi terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.

Penelitian tersebut menyoroti dampak pandemi terhadap kemiskinan anak multidimensi di Indonesia. Tiga dari empat rumah tangga melaporkan adanya penurunan pendapatan sejak bulan Januari 2020. Persentase yang

signifikan — 75,3 persen — merupakan rumah tangga dengan anak di daerah perkotaan. Hampir sepertiga responden khawatir tentang penyediaan makan bagi keluarga mereka, sedangkan 12,6 persen rumah tangga dengan anak mengalami kerawanan pangan.

Selain itu, 13 persen rumah tangga dengan anak di bawah usia 5 tahun tidak mampu mengakses imunisasi. 36,7 persen rumah tangga dengan anak penyandang disabilitas tidak mampu mengakses layanan perawatan kesehatan, termasuk terapi. Risiko kehilangan pembelajaran tinggi dan dalam jangka panjang bisa berdampak pada pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan anak. Kemiskinan anak, yang saat ini melanda 2,1 juta anak, dapat meningkat bila langkah-langkah dukungan situasi darurat tidak diambil di tahun 2021 dan setelahnya.

85 persen keluarga yang disurvei menerima setidaknya salah satu bentuk bantuan pemerintah, sementara satu dari tiga rumah tangga termiskin, yang termasuk dalam kelompok 40 persen pendapatan terendah, tidak menerima bantuan tunai dalam bentuk apa pun.

Selama Dekade Aksi ini, diperlukan pendekatan yang lebih terfokus untuk memastikan agar masyarakat miskin dan masyarakat miskin baru terlindungi dari dampak pandemi global sembari tetap menjaga momentum untuk mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal* atau SDG). Hasil survei ini memberikan kesempatan kepada para pembuat keputusan untuk mengembangkan program khusus dan terarah guna memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal.

Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan dari mitra pembangunan utama yang bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dengan tulus berterima kasih dan menghargai Pemerintah Australia dan Jepang, serta *Multi-Partner Trust Fund* (MPTF) atas dukungan finansial yang diberikan untuk survei ini.

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini adalah hasil kerja sama antara UNICEF, UNDP, Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) dan The SMERU Research Institute. Prospera mengoordinasikan keseluruhan proses penyusunan laporan ini dengan masukan dari UNICEF, UNDP dan The SMERU Research Institute. Kajian dan analisis yang lebih luas yang menjadi dasar laporan ini adalah hasil kerja keras banyak kontributor di tiap lembaga termasuk lembaga-lembaga Pemerintah Indonesia.

UNICEF dipimpin oleh Ratnawati Muyanto (Spesialis Perlindungan Sosial) dengan dukungan dari Bheta Arsyad (Spesialis Kebijakan Sosial), Suci Wulandari (Spesialis Pusat Data), Anna-Lisa Robertson (Staf Komunikasi dan Keterlibatan Masyarakat), Mutia Zakia Salma (Staf Pendukung Manajemen Pengetahuan), Rachma Indah Nurbani (Konsultan Nasional) dan semua spesialis dari Bagian Gizi, Kesehatan, Perlindungan Anak, Pendidikan, dan Keterlibatan Sektor Bisnis.

UNDP dipimpin oleh Rima Prama Artha (Ekonom Negara) didukung oleh Usha Adelina Riyanto (Ekonom), Rahmat Reksa Samudra (Ekonom), dan Ranjit Jose (Spesialis Komunikasi dan Advokasi UNDP).

Prospera dipimpin oleh Bimbika Sijapati Basnett (Penasihat Senior untuk Inklusi Gender dan Sosial) dan Kartika Sari Juniwaty (Ekonom Pembangunan, Inklusi Gender dan Sosial) didukung oleh Nicholas George Owen (Penasihat Komunikasi Ekonomi), Monica Dwiyanti (Staf Proyek, Inklusi Gender dan Sosial), Melissa Nicole Wells (Wakil Direktur- Kemitraan, Kebijakan, dan Kinerja) dan Della Y.A. Temenggung (Wakil Direktur- Nasihat dan Kebijakan).

SMERU Research Institute dipimpin oleh Asep Suharyadi (Peneliti Senior) dan Michelle Andrina (Peneliti), didukung oleh Fauzan Kemal Musthofa (Peneliti Junior), Sylvia Andriyani Kusumandari (Peneliti Junior), Rizki Fillaili (Rekan Peneliti), Ridho Al Izzati (Peneliti), Jimmy Daniel Berlianto Oley (Peneliti Junior), dan Aqilah Farhani (Staf Magang).

Mitra pemerintah tersebut telah mengawasi dan mengarahkan pengumpulan data, analisis, dan proses penyusunan laporan. Badan Pusat Statistik dipimpin oleh Suhariyanto, didukung oleh Margo Yuwono,

Ateng Hartono, Gantjang Amannullah, Sarpono, Ahmad Avenzora, Amiek Chamami, Nur Sahrizal, Yuni Susianto, Agus Marzuki, dan Adhi Kurniawan; Kementerian Keuangan dipimpin oleh Febrio Nathan Kacaribu dan Titik Anas didukung oleh Hidayat Amir, Ali Moechtar, dan Irma Marlina; dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh Bapak Maliki dan Fisca Aulia. Penghargaan yang besar juga kami berikan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan, atas dukungan dan kemitraannya yang berkelanjutan dan luar biasa selama proses setahun ini.

Kami berterima kasih atas peran *Development, Technology, and Strategy* (DTS) yang dipimpin oleh Ainul Huda karena telah mengoordinasikan pengumpulan data survei, dan tim enumerator mereka yang telah membantu menjalankan proyek ini.

Penyusunan laporan ini dan pengumpulan data didukung secara finansial oleh Pemerintah Australia, Pemerintah Jepang, dan *Multi-Partner Trust Fund* COVID-19. Dukungan para donor membantu disusunnya laporan ini dan kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dan kerja sama mereka yang berkelanjutan.

Lebih jauh, laporan ini didedikasikan untuk lebih dari 12.000 perempuan dan laki-laki di 34 provinsi di Indonesia yang ikut serta dalam survei ini. Kami harap suara mereka sudah cukup terwakili dan hasil survei sekaligus pesan kebijakan yang dijelaskan dalam laporan ini nantinya dimanfaatkan untuk mendukung Indonesia agar bisa segera menanggulangi krisis kesehatan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Temuan, penafsiran, dan kesimpulan yang tertulis dalam laporan ini disusun oleh semua anggota tim yang terlibat dalam pembuatan laporan ini. Ketiganya tidak serta-merta mencerminkan pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Australia, dan Pemerintah Indonesia.

Ringkasan Eksekutif

Mewabahnya COVID-19 telah menciptakan tantangan yang belum pernah ada di dunia. Di Indonesia, virus korona telah menginfeksi lebih dari satu juta orang sejak kasus pertama yang terkonfirmasi di bulan Maret 2020 dan menelan puluhan ribu korban jiwa. Virus korona yang menghambat kegiatan perekonomian dan masyarakat terus menimbulkan dampak mengejutkan terhadap pembangunan manusia. Setelah mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, kemiskinan kini meningkat lagi. Satu dari sepuluh orang di Indonesia sekarang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Kemiskinan anak dapat meningkat secara signifikan. Dampak sosial yang ditimbulkan bisa jadi lebih parah tanpa bantuan dari pemerintah.

Untuk menanggapi krisis tersebut, pemerintah Indonesia telah meluncurkan paket stimulus fiskal masif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Indonesia adalah salah satu dari lima negara di kawasan Asia Pasifik dengan alokasi dana terbesar untuk memerangi COVID-19 (ADB, 2021). Di tahun 2020 pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695 triliun (kurang lebih US\$ 49 miliar) untuk program tersebut. Mengingat krisis masih berlangsung, pemerintah mengumumkan pemberian anggaran sebesar Rp699 triliun (kurang lebih US\$ 49,3 miliar) di bulan Februari 2021 untuk melanjutkan program PEN tahun ini (Kemenkeu, 2021).

Indonesia terus berinvestasi pada program perlindungan sosial untuk menangani krisis. Program ini telah diperluas guna melindungi masyarakat miskin yang ada saat ini dari guncangan besar serta masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang rentan dan

berisiko menjadi miskin yang jumlahnya bertambah. Usaha kecil juga menerima bantuan mengingat mereka terus berjuang menghadapi kontraksi ekonomi dan pembatasan terkait kesehatan masyarakat.

Untuk menilai dampak COVID-19 terhadap rumah tangga di Indonesia dan memberikan informasi untuk dimanfaatkan dalam kebijakan pemerintah, UNICEF, UNDP, Prospera, The SMERU Research Institute, serta Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama untuk menyelenggarakan survei yang baru pertama kali dilakukan dari bulan Oktober sampai November 2020.

Survei tersebut melibatkan 12.216 rumah tangga yang mewakili rumah tangga di 34 provinsi. Survei tersebut adalah survei terbesar tentang dampak COVID-19 sejauh ini yang berfokus pada anak-anak dan kelompok rentan. Survei ini didasarkan pada wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang pernah diwawancarai oleh Badan Pusat Statistik sebagai bagian dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019. Survei dan analisis tersebut dilakukan lewat kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Dampak COVID-19 akan terus berlanjut sepanjang 2021 dan setelahnya. Meski begitu, dukungan harus terus diberikan guna meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Para mitra pembangunan Indonesia siap membantu upaya ini.



Temuan penting 1: COVID-19 berdampak signifikan terhadap keuangan keluarga

Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai di bulan Oktober hingga November 2020 mengaku berpenghasilan lebih rendah daripada di bulan Januari 2020.

Proporsi rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki anak adalah 75,3% dan yang tinggal di daerah perkotaan adalah 78,3%. Rumah tangga di perkotaan juga mengalami penurunan pendapatan yang lebih besar daripada rumah tangga di perdesaan.

Rumah tangga di semua kelompok pendapatan—dari yang termiskin hingga yang terkaya—mengalami penurunan pendapatan dengan persentase serupa. Banyak rumah tangga yang sebelumnya memiliki pendapatan yang aman secara ekonomi menjadi miskin atau berisiko menjadi miskin.

Bagi banyak rumah tangga, kehilangan pendapatan bukanlah satu-satunya tantangan: hampir seperempat responden (24,4%) mengatakan bahwa pengeluaran mereka juga meningkat. Peningkatan harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya adalah penyumbang utama kenaikan pengeluaran ini.

Proporsi rumah tangga dengan anak yang jauh lebih tinggi (65%) mengeluarkan uang lebih banyak untuk internet atau pulsa telepon seluler dibandingkan rumah tangga tanpa anak (28,9%).

Hanya sebagian kecil (14%) dari pencari nafkah utama yang berganti pekerjaan akibat COVID-19. Kendati demikian, hampir separuh (47,3%) dari pencari nafkah yang berpindah pekerjaan beralih dari pekerjaan sebagai tenaga kerja yang menerima gaji di bidang formal ke pekerjaan yang kurang terjamin di bidang informal.

Separuh dari total rumah tangga (51,5%) tidak memiliki tabungan yang bisa dimanfaatkan untuk mempertahankan ekonomi. Lebih dari seperempat (27,3%) rumah tangga menggadaikan harta benda untuk bertahan hidup. Seperempat (25,3%) rumah tangga meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman.

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga. Sepertiga responden memiliki sedikitnya satu anggota rumah tangga yang menjalankan usaha, dan hampir semua usaha ini (87,5%) terdampak pandemi. Pelanggan yang kian sedikit, pendapatan yang kian rendah, dan harga yang kian tinggi merupakan tantangan utama.

Temuan penting 2: Bantuan sosial menjangkau sebagian besar orang tetapi tidak semua orang yang membutuhkan

Sebagian besar rumah tangga (85,3%) menerima sedikitnya satu bentuk bantuan sosial, baik itu berupa bantuan langsung tunai maupun bantuan “dalam bentuk barang”. Separuh dari semua rumah tangga (50,8%) menerima bantuan langsung tunai.

Rumah tangga termiskin menerima bantuan terbanyak. Di antara rumah tangga yang termasuk 40% rumah tangga dengan pengeluaran (pendapatan) terendah, lebih dari 90% menerima sedikitnya satu bentuk bantuan dan lebih dari 60% menerima bantuan tunai. Sebagian besar rumah tangga yang secara ekonomi aman sebelum pandemi tetapi kehilangan pendapatan secara signifikan setelah pandemi juga menerima bantuan (sekitar 70%). Bantuan tersebut mencakup program-program seperti penangguhan pajak, subsidi kredit, dan bantuan kuota internet yang menyasar rumah tangga yang baru terdampak.

Banyak rumah tangga menerima gabungan bantuan tunai dan barang, dan jumlah rumah tangga yang menerima bantuan tunai sedikit lebih banyak, sehingga semakin banyak rumah tangga yang mendapat manfaat.

Dua pertiga (67,4%) penerima bantuan pemerintah mengatakan bahwa bantuan tersebut membantu mengatasi dampak resesi terhadap keuangan rumah tangga. Rumah tangga menggunakan bantuan untuk membeli bahan pangan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, fasilitas rumah tangga, dan pulsa telepon/ internet.

Namun, lebih dari sepertiga (38%) rumah tangga yang termasuk dalam 40% kelompok dengan pengeluaran terendah tidak menerima bantuan tunai di bulan Oktober hingga November 2020. Proporsi penerima bantuan nontunai yang telah kehilangan pendapatan (75%) setara dengan proporsi penerima bantuan tunai.

Sedikit sekali rumah tangga (7,5%) yang menjalankan usaha kecil yang menerima dukungan usaha dari pemerintah saat survei dilakukan. Empat dari sepuluh pemilik usaha mengatakan tidak mengetahui adanya bantuan pemerintah.

Temuan penting 3: Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan

Hampir tiga dari empat orang tua khawatir akan kehilangan kesempatan pembelajaran karena terganggunya pendidikan anak-anak mereka. Akses ke internet yang baik adalah hambatan utama bagi keberhasilan anak-anak dalam pembelajaran dari rumah. Hal ini dilaporkan menjadi masalah utama bagi 57,3% rumah tangga dengan anak-anak. Rumah tangga di perdesaan dan yang lebih miskin menghadapi masalah lebih besar terkait internet dan perangkat dibandingkan rumah tangga di perkotaan dan yang lebih kaya. Banyak orang tua melaporkan bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu (28,7%) dan/atau tidak memiliki kapasitas (25,3%) untuk mendukung anak-anak mereka dalam pembelajaran dari rumah.

Rumah tangga dengan anak-anak mengakses lebih sedikit layanan kesehatan—salah satu alasan utamanya adalah takut tertular COVID-19. Lebih dari satu di antara 10 rumah tangga dengan anak-anak di bawah usia lima tahun mengatakan belum membawa anak-anak mereka ke klinik imunisasi sejak bulan April 2020.

Penutupan sekolah, isolasi sosial, serta ketidakpastian ekonomi juga menghadapkan anak-anak pada sejumlah risiko lain. Survei ini menemukan bahwa 45% rumah tangga melaporkan berbagai masalah perilaku pada anak-anak mereka. Di antara mereka, 20,5% menyatakan anak-anak lebih sulit berkonsentrasi; 12,9% menjadi lebih mudah marah; dan 6,5% sulit tidur.

Temuan penting 4: Ketidaksetaraan gender makin meluas akibat perempuan mengambil tanggung jawab pengasuhan tambahan

Ibu tiga kali lebih mungkin untuk mengasuh anak-anak dibandingkan ayah: 71,5% rumah tangga menyatakan ibu yang mendampingi anak-anak belajar di rumah sementara 22% rumah tangga menyatakan ayah yang melakukan hal tersebut.

Sepuluh dari perempuan ini juga bekerja untuk mendukung keluarga. Mereka berupaya keras menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab tambahan yang timbul akibat penutupan sekolah.

Temuan penting 5: Kerawanan pangan pada kelompok rentan merupakan masalah baru

Hampir sepertiga (30%) responden khawatir bahwa tidak bisa memberi makan keluarga mereka. Proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan sedang atau parah meningkat hingga 11,7% di tahun 2020. Berkurangnya pendapatan dan terganggunya sistem distribusi pangan adalah faktor utama penyebab kerawanan pangan.

Kehilangan pendapatan dan pekerjaan lebih banyak dialami rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas. Satu dari 10 rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas ringan kehilangan pekerjaan karena COVID-19, dan delapan dari 10 rumah tangga mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi. Sementara itu, rumah tangga dengan anggota keluarga penyandang disabilitas tidak bisa mengakses layanan kesehatan dan/atau terapi yang dibutuhkan.

Ada lebih banyak kepala rumah tangga oleh perempuan (56,7%) mengatakan tidak memiliki tabungan untuk membantu meredam dampak krisis dibandingkan dengan yang dikepalai oleh laki-laki (50,6%).

Rekomendasi Kebijakan Strategis

- **Rekomendasi 1: Dukung anak-anak** dengan lebih baik melalui pembelajaran, perlindungan sosial, kesehatan dan gizi, serta perlindungan anak. Dukung pembukaan kembali sekolah secara bertahap dan dengan aman; pastikan program bantuan langsung tunai diterima semua rumah tangga terdampak yang memiliki anak; prioritaskan pemberian vaksin dan obat-obatan untuk melindungi anak-anak dari penyakit; termasuk layanan kesehatan mental bagi orang tua dan anak-anak, sebagai bagian dari respons kesehatan masyarakat terhadap COVID-19.
- **Rekomendasi 2: Perluas bantuan pangan** dan tangani gangguan pasokan demi menanggulangi peningkatan kerawanan pangan. Lengkapi bantuan pangan tunai dengan sosialisasi terkait kesehatan dan gizi. Selenggarakan pengawasan gizi di tingkat lokal. Pastikan agar pasokan pangan bergizi tersedia dan harganya terjangkau.
- **Rekomendasi 3: Pertahankan dukungan kepada kelompok miskin berpenghasilan rendah dan menengah**, yang kini menjadi lebih miskin dan lebih rentan, melalui serangkaian program lapangan kerja (seperti padat karya tunai, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja) serta program bantuan sosial.
- **Rekomendasi 4: Lanjutkan pemberian bantuan kepada usaha rumah tangga agar bisa pulih** melalui program bantuan langsung tunai yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, penyebaran informasi, pendaftaran sesuai permintaan, dan upaya menghubungkan penerima bantuan dengan dukungan tambahan. Pastikan bisnis yang dimiliki oleh perempuan juga didukung secara setara.
- **Rekomendasi 5: Kurangi beban pengasuhan perempuan** dengan membuka kembali sekolah secara bertahap dan dengan aman, luncurkan kampanye untuk mempromosikan pembagian pekerjaan pengasuhan di rumah, dan bekali kedua orang tua dengan keterampilan dan dukungan yang diperlukan agar bisa mendukung pembelajaran anak selama penutupan sekolah dan/atau masa pembelajaran campuran.
- **Rekomendasi 6: Pastikan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan** yang dibutuhkan. Prioritaskan rumah tangga dan individu penyandang disabilitas agar mendapat bantuan sosial dan beri mereka akses ke pelatihan peningkatan keterampilan dan pelatihan keterampilan baru.
- **Rekomendasi 7: Sertakan peserta baru bantuan sosial ke dalam sebuah basis data tunggal** agar termasuk dalam sasaran di waktu mendatang. Beberapa rekomendasi khusus mencakup menyelenggarakan konsolidasi dan integrasi data penerima bantuan tunai ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Susun peraturan dan pedoman untuk mengumpulkan informasi standar. Pastikan daftar bisnis mikro yang baru mencakup nomor identifikasi rumah tangga untuk keperluan penggabungan data.
- **Rekomendasi 8: Wujudkan pemahaman yang lebih baik mengenai dukungan pemerintah** dengan mengembangkan sebuah media ramah pengguna yang berisi informasi terkini mengenai program bantuan usaha.

Konten

KATA PENGANTAR	3
UCAPAN TERIMA KASIH	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS	9
DAFTAR GAMBAR	11
DAFTAR TABEL	11
DAFTAR KOTAK	12
DAFTAR LAMPIRAN	12
DAFTAR ISTILAH	13
1. KONTEKS	14
1. 1 COVID-19: sebuah tantangan baru	14
1. 2 Survei Kolaboratif	14
2. TEMUAN UTAMA	18
2. 1 Dampak COVID-19 terhadap keuangan rumah tangga sangat parah	18
2. 2 Bantuan sosial menjangkau sebagian besar tetapi tidak semua orang yang membutuhkan	23
2. 3 Anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan	33
2. 4 Perempuan memikul tanggung jawab perawatan tambahan	38
2. 5 Kerawanan pangan pada kelompok rentan meningkat	39
3. REKOMENDASI KEBIJAKAN STRATEGIS	44
3. 1 Dukung anak-anak dengan lebih baik	44
3. 2 Memperluas bantuan pangan dan mengurangi gangguan rantai pasokan untuk mengatasi kerawanan pangan	45
3. 3 Mempertahankan dukungan kepada kelompok miskin berpenghasilan rendah dan menengah yang sekarang makin miskin dan rentan	45
3. 4 Terus membantu usaha keluarga agar pulih	46
3. 5 Mengurangi beban perempuan dalam perawatan	46
3. 6 Memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan	46
3. 7 Memasukkan pendaftaran baru untuk bantuan sosial ke dalam basis data tunggal untuk menentukan sasaran di masa mendatang	46
3. 8 Mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai bantuan pemerintah	47
3. 9 Usulan untuk perbaikan program	48

Daftar Referensi

Daftar Gambar

Gambar 1. Lokasi geografis dan komposisi rumah tangga	16
Gambar 2. Pengeluaran bulanan per kapita menurut kuintil (dalam ribuan rupiah) rumah tangga yang disurvei pada 2019	17
Gambar 3. Perbandingan pendapatan saat ini dengan Januari 2020 menurut kelompok (%)	18
Gambar 4. Simulasi pergeseran posisi kuintil karena berkurangnya pengeluaran dan pendapatan	20
Gambar 5. Tingkat penanguhan kerja sejalan ketatnya langkah-langkah kesehatan masyarakat yang dijalankan	20
Gambar 6. Kegiatan Operasional Usaha	22
Gambar 7. Gabungan bantuan yang diterima oleh rumah tangga	25
Gambar 8. Proporsi penerima manfaat berdasarkan tingkat pengeluaran (%)	26
Gambar 9. Penggunaan bantuan	27
Gambar 10. Distribusi rumah tangga	29
Gambar 11. Penggunaan bantuan usaha (jawaban boleh lebih dari satu)	30
Gambar 12. Kesadaran terhadap bantuan pemerintah	31
Gambar 13. Perkiraan tambahan bantuan tunai yang diterima oleh penerima manfaat PKH selama pandemi (%).	33
Gambar 14. Kendala belajar dari rumah berdasarkan kelompok (%)	35
Gambar 15. Proporsi paket internet penerima manfaat di antara rumah tangga dengan anak usia sekolah	36
Gambar 16. Alasan tidak mengunjungi fasilitas layanan kesehatan berdasarkan kelompok (%)	37
Gambar 17. Pengasuh utama yang mendukung anak dalam pembelajaran jarak jauh (%)	38
Gambar 18. Pihak yang seharusnya mengerjakan lebih banyak tugas rumah tangga dan pihak yang telah mengerjakan sebagian besar tugas rumah tangga (%)	39
Gambar 19. Proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan 'sedang atau parah'	40
Gambar 20. Proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan 'sedang atau parah' berdasarkan kuintil	40

Daftar Tabel

Tabel 1.	Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan dan perubahan pengeluaran menurut kuintil pengeluaran	19
Tabel 2.	Dampak pandemi terhadap usaha kecil (%)	21
Tabel 3.	Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran antara tahun 2019 dan 2020 dari 60% Rumah tangga terbawah	29
Tabel 4.	Hasil dan rekomendasi untuk beberapa program	48
Tabel A1.	Perbandingan karakteristik rumah tangga (%)	56
Tabel A2.	Komposisi rumah tangga dan anggota rumah tangga perorangan dengan kondisi kerentanan khusus	57
Tabel A3.	Statistik deskriptif pengeluaran per kapita dan pengeluaran rumah tangga menurut kelompok pengeluaran	57
Tabel A4.	Tabulasi perubahan pengeluaran dan pendapatan karena pandemi	59
Tabel A5.	Matriks transisi dengan asumsi penurunan pengeluaran sebesar 10%	59

Daftar Kotak

Kotak 1.	Karakteristik rumah tangga yang ikut serta dalam survei	16
Kotak 2.	Pengalaman Indonesia dalam menggunakan data untuk memberikan bantuan sosial	24
Kotak 3.	Apakah bantuan sosial terlalu banyak menjangkau rumah tangga kaya?	27
Kotak 4.	Banyak rumah tangga membutuhkan bantuan tunai tetapi tidak menerimanya	29
Kotak 5.	Dukungan Indonesia bagi UMKM: sebuah pandangan komparatif	31
Kotak 6.	Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Program Keluarga Harapan	32
Kotak 7.	Kekhawatiran mengakses fasilitas kesehatan masyarakat selama pandemi	37
Kotak 8.	“Rasa lapar tidak akan membunuh kita, bertahanlah”	42
Kotak 9.	Anak-anak yang membutuhkan tidak mendapatkan terapi	43

Daftar Lampiran

Lampiran I.	Tinjauan tentang program bantuan pemerintah	53
Lampiran II.	Catatan Metodologi- perbandingan antara Survei COVID-19 2020 dan SUSENAS 2019	56
Lampiran III.	Analisis untuk mendukung simulasi dampak perubahan pendapatan dan pengeluaran pada distribusi kuintil 2019	58
Lampiran IV.	Rangkuman respons kebijakan bantuan sosial terhadap COVID-19 di sejumlah negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Pasifik	60
Lampiran V.	Rangkuman respons kebijakan UMKM terhadap COVID-19 di sejumlah negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Pasifik	61
Lampiran VI.	Perbandingan antara penerima dan bukan penerima bantuan tunai menurut kuintil 1–3	62
Lampiran VII.	Hasil regresi pada faktor risiko rumah tangga	63
Lampiran VIII.	Ringkasan tentang respons kebijakan pasar tenaga kerja untuk COVID-19 di berbagai negara	65
Lampiran IX.	Daftar pertanyaan	67

Daftar Istilah

BLT-DD	Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa	<i>Direct Cash Transfer – Village Funds</i>
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	<i>School operational assistance fund</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	<i>Social Security Administrative Body</i>
BPS	Badan Pusat Statistik	<i>National Statistics Office</i>
BPUM	Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro	<i>President’s Assistance for Micro Enterprises</i>
BST	Bantuan Sosial Tunai	<i>Cash Social Assistance</i>
COVID-19		<i>Coronavirus Disease 2019</i>
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	<i>Integrated Social Welfare Database</i>
FAO	Organisasi Pangan Dunia	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FIES	Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	<i>Food Insecurity Experience Scale</i>
TIK	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi	<i>Information, Communication, and Technology</i>
Kemenkeu	Kementerian Keuangan Republik Indonesia	<i>Ministry of Finance Indonesia</i>
Kemnaker	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	<i>Ministry of Manpower Indonesia</i>
Kemendes PDTT	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia	<i>Ministry of Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration Indonesia</i>
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	<i>Micro, Small, and Medium Enterprises</i>
Program PEN	Program Pemulihan Ekonomi Nasional	<i>National Economic Recovery Program</i>
Prospera	Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian	<i>Australia Indonesia Partnership for Economic Development</i>
PKH	Program Keluarga Harapan	<i>Family of Hope Program</i>
PIP	Program Indonesia Pintar	<i>Smart Indonesia Program</i>
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu	<i>Integrated health post</i>
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar	<i>Large scale social distancing</i>
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat	<i>Public health center</i>
ODD	Penyandang Disabilitas	<i>People with disabilities</i>
Susenas	Survei Sosial ekonomi Nasional	<i>National socioeconomic survey</i>
UNDP	Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa	<i>United Nations Development Programme</i>
UNICEF	Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa	<i>United Nations Children’s Fund</i>

1. Konteks

1.1 COVID-19: sebuah tantangan baru

COVID-19 memunculkan berbagai tantangan baru di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Virus corona telah menginfeksi lebih dari satu juta orang dan puluhan ribu orang telah meninggal dunia. Selain krisis kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh pandemi itu sendiri, pembatasan ekonomi dan pergerakan masyarakat berdampak sangat buruk terhadap perkembangan manusia karena menyebabkan kemiskinan, membatasi akses anak-anak ke pendidikan dan layanan kesehatan, dan menimbulkan lebih banyak masalah kesehatan mental. Ekonomi menyusut untuk pertama kalinya sejak krisis Asia pada akhir 1990-an (Bank Dunia, 2020). Produk domestik bruto lebih rendah Rp89 triliun (US\$ 6,4 miliar) pada 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa lima juta orang telah kehilangan pekerjaan selama pandemi dan 24 juta lainnya bekerja dalam waktu yang lebih singkat (BPS, 2020a).

Pandemi mengakibatkan tekanan keuangan ekstrem yang dialami 70 juta keluarga di Indonesia. Tahun lalu produk domestik bruto turun sebesar Rp2,2 juta (US\$ 157,3) per kapita—penurunan pertama dalam Rupiah yang pernah tercatat. Pendapatan perseorangan (yang diukur dengan konsumsi) turun rata-rata 2,6% setelah disesuaikan dengan inflasi. Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa angka pengangguran naik sebesar 2,7 juta tahun ini hingga Agustus menjadi hampir 10 juta orang (BPS, 2020a). Jutaan lagi bekerja dengan jam kerja yang lebih sedikit atau dengan bayaran yang terlalu sedikit. Setelah mengalami kemajuan selama bertahun-tahun, kemiskinan meningkat sebesar 2,8 juta orang pada tahun ini hingga September (BPS, 2021c). Secara keseluruhan, 27,6 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan nasional sekitar Rp458.947 (US\$ 31,8) per kapita per bulan. Tingkat kemiskinan melonjak menjadi 10,2% (BPS, 2021c), mencapai 2 digit untuk pertama kalinya sejak 2017; tetapi masih tetap lebih tinggi di daerah perdesaan, yaitu 13,2%. Di balik angka-angka ini terjadi tragedi kemanusiaan yang tak terhitung jumlahnya.

Karena krisis tersebut, pemerintah Indonesia telah mengajukan stimulus fiskal masif melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 triliun (US\$ 49 miliar) untuk program tersebut. Dari jumlah ini, Rp63,51 triliun (US\$ 4,5 miliar) digunakan di bidang kesehatan, Rp220,39 triliun (US\$ 15,6 miliar) untuk perlindungan sosial, dan Rp112,44 triliun (US\$ 7,9 miliar) untuk UMKM (Kemenkeu, 2020a).¹ Seiring dengan berlanjutnya krisis, pemerintah pada Februari 2021 mengumumkan anggaran sebesar Rp699,43 triliun (US\$ 49,6 miliar) untuk melanjutkan program PEN (Kemenkeu, 2021). Pengeluaran untuk perlindungan sosial terdiri dari pelbagai program baru dan program lama yang diperluas secara vertikal (dengan tambahan penerima manfaat baru) dan secara horizontal (dengan penambahan jumlah manfaat).

1.2 Survei kolaboratif

Untuk mengukur dampak COVID-19 terhadap rumah tangga di Indonesia dan merekomendasikan beberapa program dan kebijakan untuk merespons krisis tersebut, UNICEF, UNDP, Prospera, dan The SMERU Research Institute, dengan dukungan dari Badan Pusat Statistik, mengadakan survei terhadap **12.216 rumah tangga yang mewakili rumah tangga nasional** di 34 provinsi pada Oktober-November 2020. Ini adalah survei **terbesar mengenai COVID-19** yang didasarkan semata-mata pada wawancara tatap muka dengan rumah tangga yang disurvei oleh Badan Pusat Statistik pada 2019.

Survei ini memberikan **perhatian khusus kepada anak-anak dan kelompok rentan. Survei ini juga berfokus pada perempuan serta penyandang disabilitas.**

Survei dan analisis hasilnya dirancang dengan umpan balik dan masukan berkala dari Pemerintah Indonesia.

Tujuan utama survei ini adalah mengukur dampak pandemi terhadap: (1) pendapatan, lapangan kerja dan dunia usaha; (2) konsumsi rumah tangga dan ketahanan pangan; (3) anak-anak dan kesejahteraan (kesehatan

1. Informasi terperinci tentang tiap program dimuat di Lampiran I.

dan pendidikan); dan (4) kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan rumah tangga dengan perempuan sebagai kepala keluarga.

Survei ini juga berfokus pada (5) strategi yang digunakan oleh rumah tangga terdampak untuk mengatasinya dan (6) mengakses bantuan pemerintah. Survei COVID-19 berupaya memantau penjangkauan program dengan dimensi 'cakupan' (yang memiliki akses ke manfaat); 'kelengkapan' (risiko yang telah ditanggung, saling melengkapi antara bantuan tunai dan nontunai) dan 'kecukupan' (tingkat manfaat dan biaya yang ditanggung).

Hasil survei telah dipilah menurut status ekonomi rumah tangga berdasarkan pengeluaran yang dilaporkan dalam Survei Sosio-Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2019 (lihat Kotak 1); keberadaan anak, gender kepala rumah tangga (laki-laki atau perempuan), adanya penyandang disabilitas, status ekonomi rumah tangga, dan lokasi rumah tangga (perkotaan/perdesaan).

Sepanjang relevan, hasil pemilahan tersebut telah disajikan dalam laporan ini. Untuk memperkirakan prevalensi kerawanan pangan, survei ini menggunakan 'Skala Kerawanan Pangan' (FIES) seperti yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik dalam Susenas².

Survei ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan faktual, seperti informasi mengenai perubahan konsumsi, dan pertanyaan-pertanyaan tentang persepsi. Berbagai pertanyaan tentang persepsi sangat berguna untuk mendapatkan pandangan dan umpan balik dari responden. Misalnya, dalam modul khusus tentang bantuan sosial, diajukan serangkaian pertanyaan tentang jenis bantuan yang diterima, bagaimana penerima menggunakan bantuan tersebut, dan umpan balik tentang kegunaan dan keadilan bantuan tersebut. Demikian pula, pada anak-anak dan pendidikan, data

mengenai pengalaman pembelajaran dari rumah dan pengamatan orang tua terhadap perilaku anak mereka dikumpulkan.

Responden dalam survei ini merupakan subsampel Susenas 2019, dan data dari kedua survei tersebut telah digabungkan, antara lain, untuk mengidentifikasi pengeluaran rumah tangga sebelum pandemi yang sulit dikumpulkan pada saat pelaksanaan survei ini³, sehingga dimungkinkan penentuan status ekonomi, atau kondisi dasar⁴, rumah tangga sebelum pandemi. Penentuan tersebut digunakan dalam laporan ini untuk: (1) menganalisis dampak krisis terhadap semua jenis pengeluaran rumah tangga; (2) mengukur sejauh mana rumah tangga miskin dan rentan dapat dijangkau oleh program perlindungan sosial.

Data yang dikumpulkan dari survei rumah tangga dilengkapi dengan wawancara mendalam untuk menyelidiki temuan survei dengan lebih mendalam dan menempatkan hasilnya dalam konteks pandemi yang sedang berlangsung. Wawancara difokuskan pada, antara lain, perubahan status kerja dan jenis pekerjaan; pembagian pekerjaan perawatan dalam rumah tangga; pengalaman keluarga dalam mengakses layanan dasar; pengalaman anak dalam pembelajaran daring; dan kerentanan yang dialami oleh penyandang disabilitas selama pandemi.

-
2. Badan Pusat Statistik dan The SMERU Research Institute telah membuat perkiraan FIES untuk survei gabungan ini. FIES awalnya dikembangkan oleh Organisasi Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO).
 3. Badan Pusat Statistik mengukur status ekonomi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang dihitung berdasarkan rincian pengeluaran yang ditanyakan dalam Susenas. Modul pengeluaran terperinci ini berisi lebih dari 290 pertanyaan, yang tidak dapat digunakan dalam survei gabungan ini karena keterbatasan waktu pelaksanaan survei tatap muka selama pandemi COVID-19. Untuk memperkirakan status ekonomi responden, kami menggunakan data Susenas 2019
 4. Terutama dengan menentukan keadaan sosioekonomi keluarga sebelum pandemi dalam distribusi pengeluaran menggunakan seluruh sampel Susenas 2019. Tiap rumah tangga dalam Susenas 2019 dipilih berdasarkan pengeluaran bulanan per kapita, dari yang terendah sampai yang tertinggi, dan kemudian dibagi menjadi lima kelompok (atau kuintil). Identifikasi posisi kuintil dalam Susenas 2019 ini kemudian digabung dengan data survei 2020. Penggabungan ini merupakan posisi dasar rumah tangga yang disurvei.

KOTAK 1

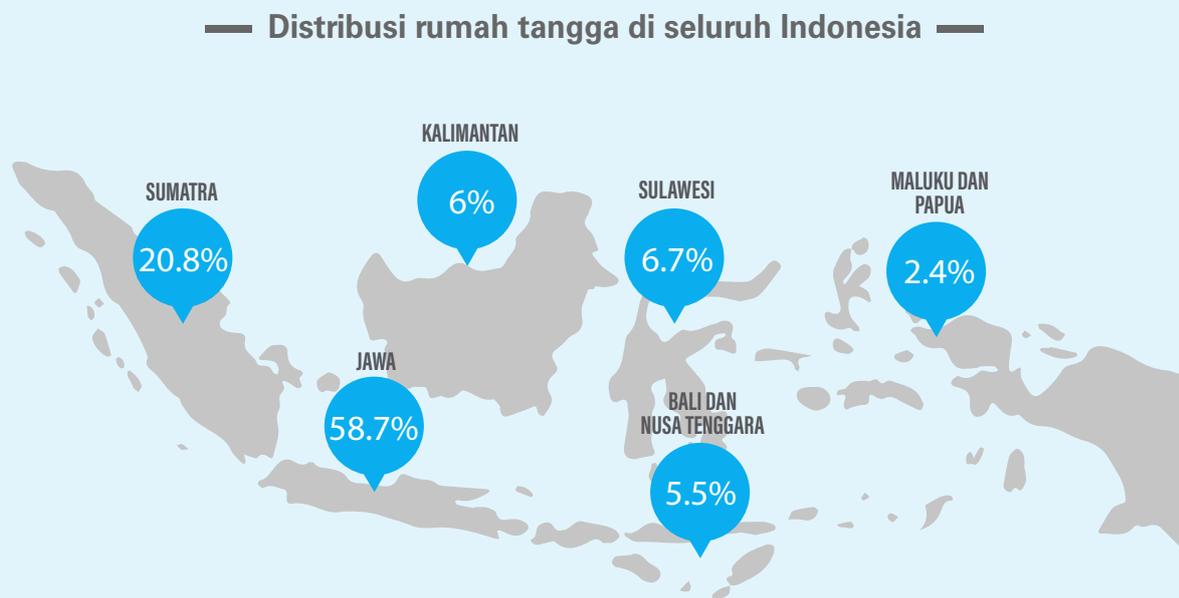
Karakteristik rumah tangga yang ikut serta dalam survei

Data dan analisis yang disajikan dalam laporan ini didasarkan atas bobot pengambilan sampel yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik dan mewakili 69 juta rumah tangga di Indonesia.⁵ Di bawah ini adalah karakteristik populasi yang digambarkan oleh survei. Lebih dari 70% rumah tangga hidup dengan anak berusia di bawah 18 tahun. Dari rumah tangga ini, 25,4% di antaranya memiliki anak berusia di bawah 5 tahun. Sekitar 30% rumah tangga hidup dengan kerabat berusia lanjut, 6,9% dengan penyandang

disabilitas, 3,2% dengan perempuan hamil, dan 15,8% dengan anggota keluarga yang menderita penyakit kronis.⁶ Sementara itu, 14,3% rumah tangga dikepalai oleh perempuan dan 85,7% dikepalai oleh laki-laki.

Rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan cenderung lajang/bercerai, lebih tua, dan kurang berpendidikan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.

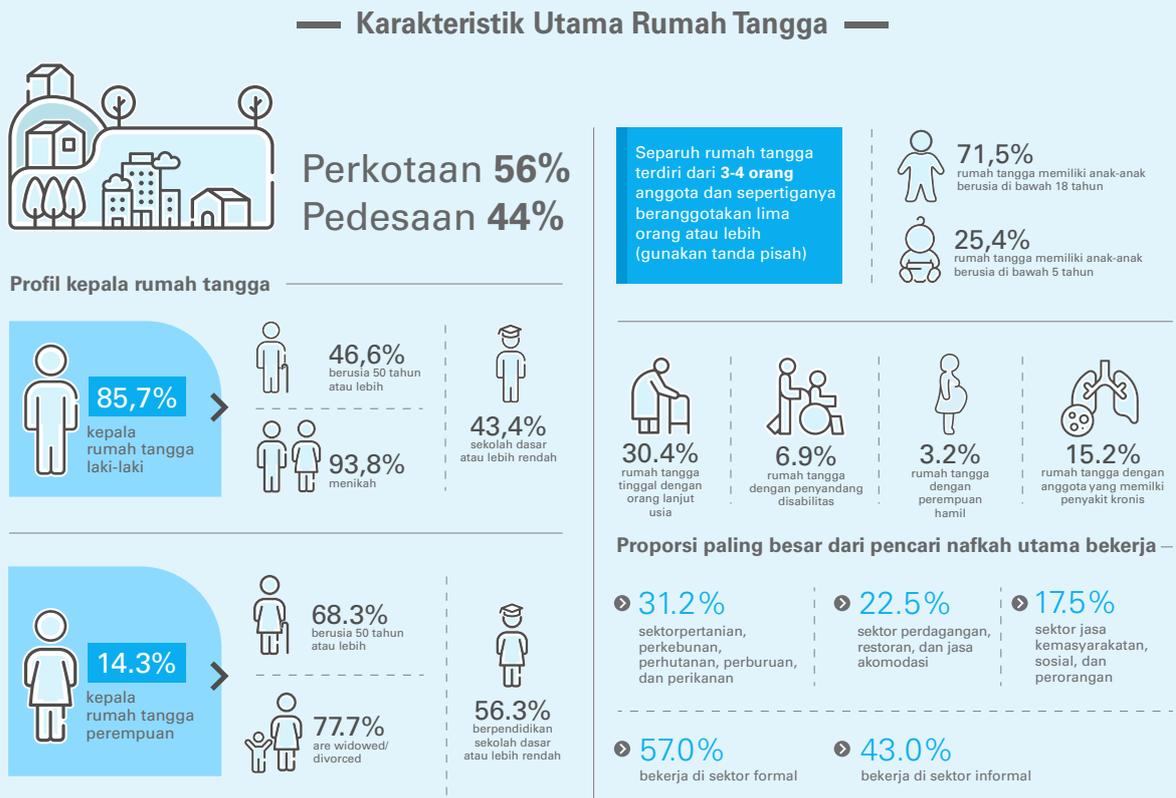
Gambar 1. Lokasi Geografis dan Komposisi Rumah Tangga



⁵ Lampiran II memberikan informasi metodologis terperinci tentang bobot sampel yang digunakan dibandingkan dengan sampel Susenas 2019

⁶ Statistik ini cukup stabil sejak 2019 (dibandingkan dengan Susenas) dengan perbedaan mencolok: 67% rumah tangga hidup dengan anak-anak berusia di bawah 18 tahun, 29% rumah tangga memiliki anak-anak berusia di bawah 5 tahun, 28% rumah tangga hidup dengan orang lanjut usia, 8% dengan penyandang disabilitas (parah dan sedang), 3,7% dengan perempuan hamil.

Gambar 1 (Lanjutan). Lokasi Geografis dan Komposisi Rumah Tangga



Proporsi paling besar dari pencari nafkah utama bekerja

31,2%
sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perburuan, dan perikanan

22,5%
sektor perdagangan, restoran, dan jasa akomodasi

17,5%
sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan

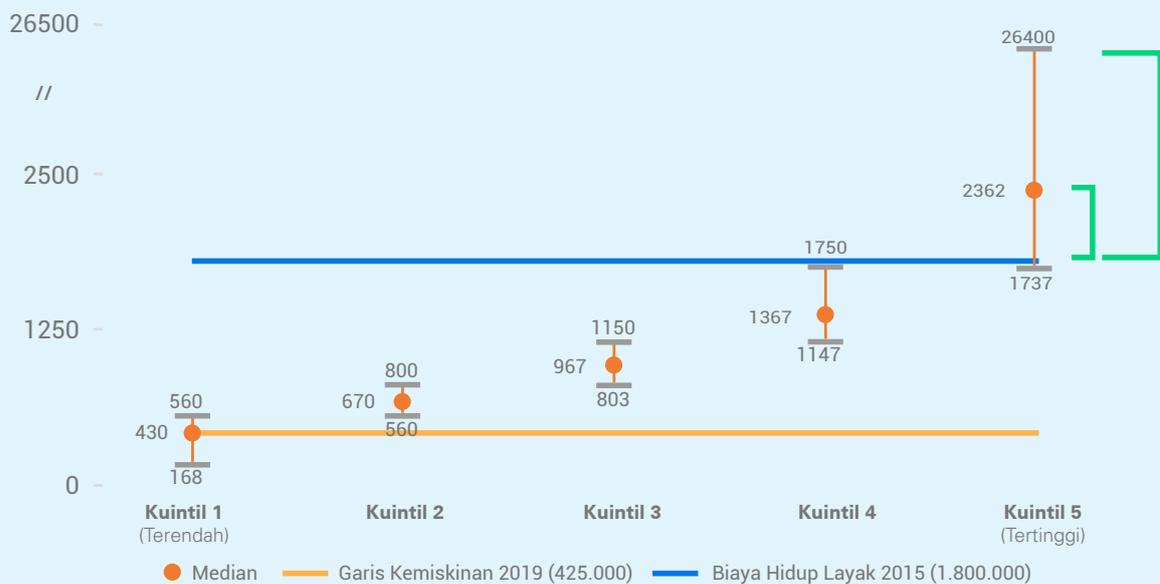
57,0%
bekerja di sektor formal

43,0%
bekerja di sektor informal

Survei tersebut mencakup rumah tangga dari kelima kuintil kekayaan, tetapi sebagian besar responden tidak sangat kaya. Seperti terlihat pada Gambar 2, separuh rumah tangga di Kuintil 1 hidup di bawah garis kemiskinan pada 2019, Kuintil 2-4 hanya berpendapatan rumah tangga rendah hingga sedang antara Rp560.000 dan Rp1.750.000

(US\$ 38- US\$ 170) per bulan, dan bahkan rumah tangga di Kuintil 5 tidak berpenghasilan sebesar itu. Survei tersebut tidak memotret rumah tangga berpendapatan sangat tinggi karena kelompok ini jarang berpartisipasi dalam survei semacam itu.

Gambar 2. Pengeluaran bulanan per kapita menurut kuintil (dalam ribuan rupiah) rumah tangga yang disurvei pada 2019



Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

2. Temuan Utama

2.1 Dampak COVID-19 terhadap keuangan rumah tangga sangat parah

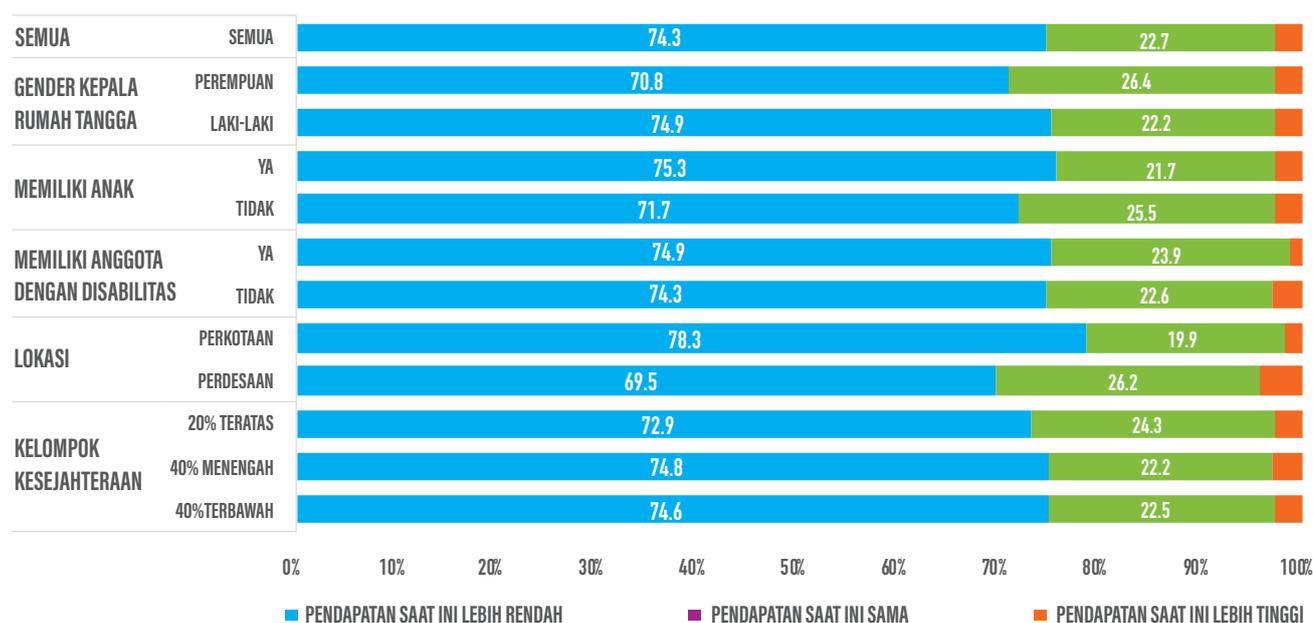
Hampir tiga perempat rumah tangga (74,3%) yang diwawancarai pada Oktober - November 2020 mengatakan bahwa penghasilan mereka secara signifikan lebih rendah dibandingkan pada Januari 2020. Proporsi rumah tangga berpendapatan lebih rendah sedikit lebih tinggi di antara yang memiliki anak-anak (75,3%) dan di antara yang tinggal di daerah perkotaan (78,3%). Sementara 39,8% rumah tangga mengatakan bahwa pendapatan mereka turun sebesar 25% atau lebih dibandingkan dengan Januari 2020—guncangan pendapatan yang parah. Pendapatan 44,1% rumah tangga di perkotaan turun lebih dari 25%; 10 persen lebih tinggi daripada rumah tangga di perdesaan (34,4%). (Kira-kira 16% rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan tidak mengetahui persentase pengurangan pendapatan saat dilakukannya survei).

Rumah tangga di semua kelompok pendapatan, dari yang termiskin sampai yang terkaya, memiliki persentase penurunan pendapatan serupa (lihat Tabel 1 di bawah).

Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan dan rata-rata persentase penurunan dapat dibandingkan antarkuintil. Bahkan di antara kelompok dengan pengeluaran tertinggi (Kuintil 5), secara mengejutkan 73% rumah tangga mengalami rata-rata penurunan pendapatan sebesar 45%.

Ini tidak berarti bahwa semua rumah tangga terdampak oleh penurunan ekonomi secara merata. Rumah tangga yang lebih kaya akan memiliki lebih banyak sumber daya (pendapatan, tabungan, akses keuangan, aset) untuk melindungi diri mereka dari penurunan ekonomi. Pada 2019, konsumsi 20% rumah tangga terkaya hampir lima kali lipat konsumsi 20% rumah tangga termiskin. Oleh karena itu, dampaknya akan dibedakan menurut kondisi sosioekonomi rumah tangga sebelumnya, dengan kondisi termiskin yang memburuk, terlepas dari penurunan pendapatan yang relatif sama. Meskipun demikian, survei ini memperlihatkan bahwa bahkan rumah tangga yang relatif kaya sebelum pandemi telah menjadi rentan atau berisiko menjadi rentan.

Gambar 3. Perbandingan pendapatan saat ini dengan Januari 2020 menurut kelompok (%)*



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

*Catatan: Pertanyaan dengan jawaban ganda, persentasenya didasarkan atas jumlah rumah tangga di tiap subkelompok

Tabel 1. Proporsi rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan dan perubahan pengeluaran menurut kuintil pengeluaran

Kuintil	1 (Pengeluaran Terendah)	2	3	4	5 (Pengeluaran Tertinggi)
Rata-rata pengeluaran bulanan rumah tangga pada 2019 (dalam ribu rupiah)	1,900	2,900	4,000	5,100	9,350
Rata-rata % penurunan pendapatan	42%	44.4%	44.1%	43.4%	45%
Mengalami penurunan pendapatan (%)	73.2	75.8	75.9	73.6	72.9
Mengalami peningkatan pengeluaran (%)	28.7	32.3	35.1	36.4	38.7
Mengalami penurunan pengeluaran (%)	24.4	28.7	25.6	23.7	21.8

Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

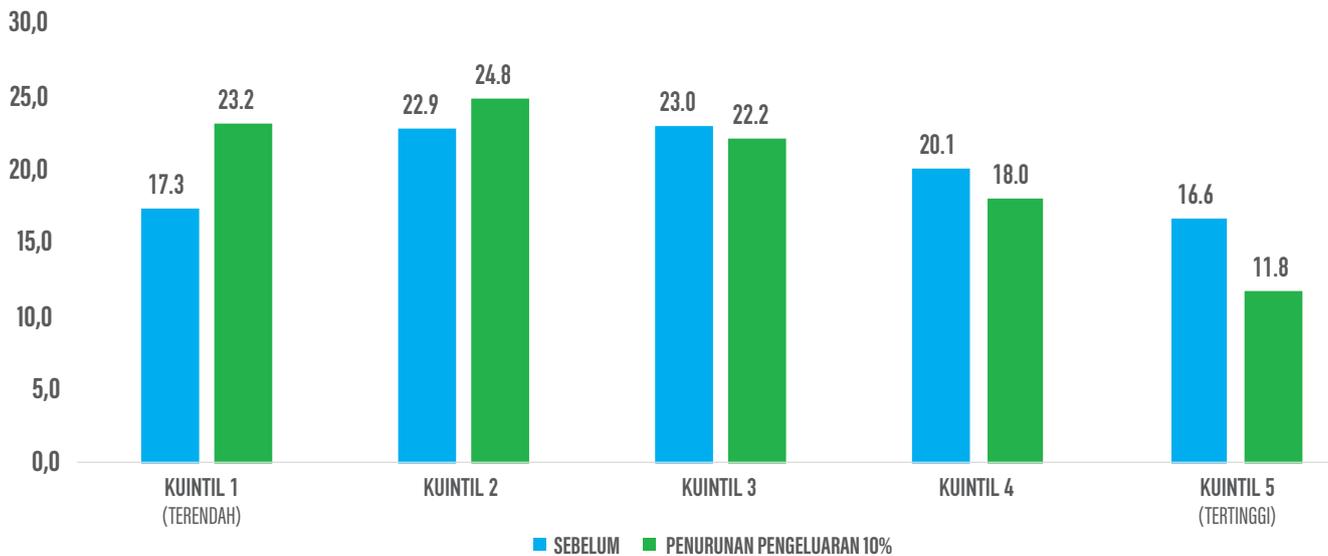
Bagi banyak rumah tangga, hilangnya pendapatan bukan satu-satunya tantangan: hampir seperempat responden (24,4%) mengatakan bahwa pengeluaran mereka juga telah meningkat. Peningkatan biaya untuk bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya (untuk 77,8% rumah tangga) adalah penyumbang utama kenaikan biaya ini diikuti oleh peningkatan biaya komunikasi (bagi 57,3% rumah tangga). Satu alasan utama adalah bahwa rumah tangga membeli bahan pangan dan kebutuhan pokok lain dalam jumlah besar karena ketidakpastian yang ditimbulkan oleh COVID-19. Secara signifikan, makin banyak rumah tangga dengan anak yang mengalami peningkatan pengeluaran menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli pulsa telepon seluler (65%) daripada rumah tangga tanpa anak (28,8%), mungkin karena persyaratan pembelajaran jarak jauh.

Implikasi utama dari perubahan akibat pandemi adalah bahwa gelombang baru rumah tangga, yang sebelumnya terjamin secara ekonomi, sekarang menjadi miskin dan rentan. Gambar 4 memperlihatkan gelombang ini melalui simulasi implikasi potensial dari hilangnya pendapatan yang dilaporkan dalam survei ini terhadap pengeluaran (lihat perincian simulasi di Lampiran III). Penelitian ini memperlihatkan bahwa penurunan 10% pengeluaran di antara rumah tangga yang paling terdampak COVID-19 akan menyebabkan penurunan yang signifikan dalam posisi kuintil pengeluaran dibandingkan dengan tingkat yang dicapai

pada 2019. Proporsi rumah tangga di Kuintil 1 (20% terbawah) akan meningkat sebesar 34%. Sementara itu, proporsi rumah tangga di Kuintil 5 (20% teratas) menurun sebesar 29%. Tingkat kemiskinan di antara semua rumah tangga yang disurvei juga akan meningkat, dari 8,1% hingga 12,3% pada 2019. Peningkatan ini menunjukkan perubahan signifikan menuju masyarakat yang lebih miskin. Artinya, makin banyak orang sekarang yang hidup di 40% terbawah dari distribusi pengeluaran (berpenghasilan hingga Rp800.000 per bulan), dan ada lebih sedikit rumah tangga di 60% teratas dari distribusi (dengan penghasilan lebih dari Rp803.000 per bulan) dibandingkan dengan tingkat yang dicapai pada 2019.

Pencari nafkah utama di sebagian besar rumah tangga tetap bekerja, tetapi sebagian bekerja dalam waktu yang lebih singkat dan dengan penghasilan yang lebih kecil. Di sebagian besar rumah tangga (91,2%), pencari nafkah utama tetap bekerja ketika survei dilakukan pada Oktober-November 2020. Rata-rata pencari nafkah utama bekerja 35 jam seminggu, yang menunjukkan bahwa mereka bekerja penuh waktu. Namun, 90% pencari nafkah utama dari rumah tangga yang dikepalai perempuan dan 89% dari mereka yang berasal dari keluarga dengan penyandang disabilitas bekerja dalam waktu yang relatif lebih singkat per minggu. Lebih dari 80% pencari nafkah utama bekerja di bidang perdagangan dan restoran, dan 70% di bidang transportasi dan komunikasi dan bidang pertambangan dilaporkan berpenghasilan lebih rendah daripada

Gambar 4. Simulasi pergeseran posisi kuintil karena berkurangnya pengeluaran dan pendapatan



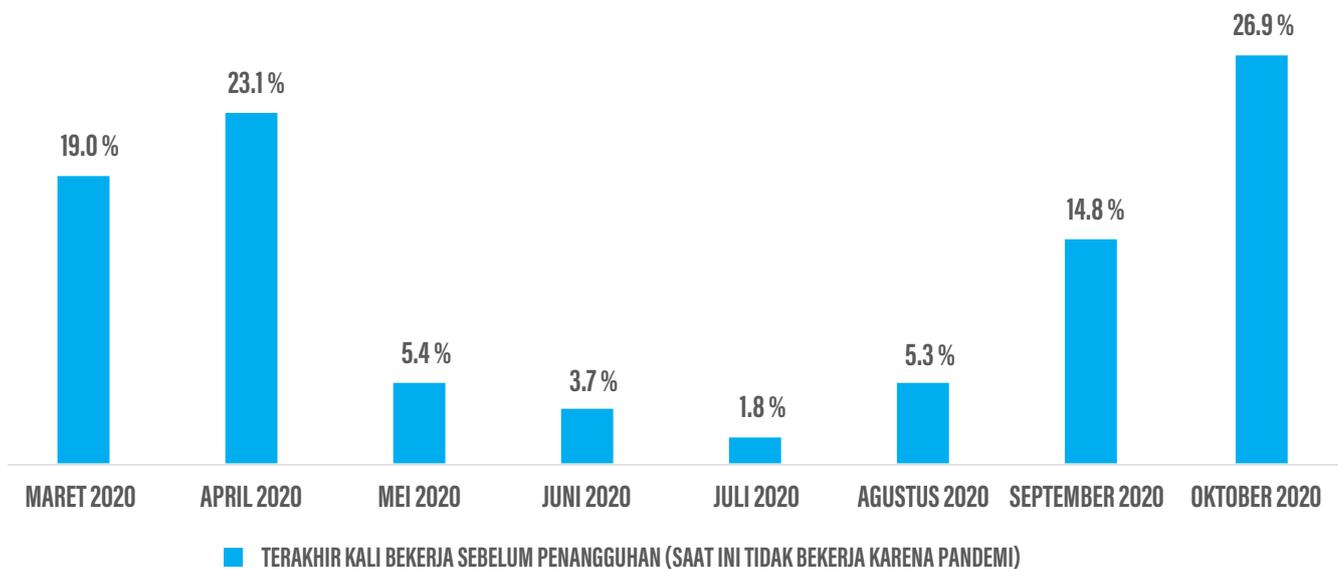
Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

sebelum pandemi. Hasil ini dapat dimengerti karena permintaan di bidang ini lebih rendah akibat pembatasan kesehatan umum ditambah dengan penurunan ekonomi (BPS, 2021b).

Empat belas persen pencari nafkah utama berganti pekerjaan karena pandemi. Hampir separuh (47,3%) dari pencari nafkah yang berpindah pekerjaan beralih dari pekerjaan sebagai tenaga kerja yang menerima gaji di bidang formal ke pekerjaan yang kurang terjamin di bidang informal. Orang yang bekerja di

industri, transportasi atau jasa sebelum COVID-19 lebih mungkin meninggalkan pekerjaan formal dan berpindah ke pekerjaan informal. Sementara 43,1% berpindah ke bidang konstruksi dan 36,7% berpindah ke bidang pertanian. Di antara sebagian kecil rumah tangga dengan pencari nafkah primer telah dirumahkan (5,5%), hampir tiga perempatnya (73,7%) tidak menerima upah sama sekali, dan lebih dari seperlima (21,2%) mengalami pengurangan upah. Hanya sepertiga dari mereka yang dirumahkan dijamin kembali ke pekerjaan mereka.

Gambar 5. Tingkat penangguhan kerja sejalan ketatnya langkah-langkah kesehatan masyarakat yang dijalankan*



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

*Catatan: Jadwal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta: 10-23 April 2020: PSBB Tahap I; 24 April-22 Mei: PSBB Tahap II; 22 Mei-4 Juni: PSBB Tahap III; 5 Juni-10 September: PSBB Transisi; 14 September: PSBB; 12 Oktober: PSBB Transisi

Penanggungan terjadi setiap bulan sepanjang tahun, tapi memuncak pada April dan Oktober. Penanggungan ini sejalan dengan ketatnya langkah-langkah kesehatan masyarakat yang dijalankan, seperti terlihat di Gambar 5 di halaman sebelumnya.

Meskipun pandemi, tujuh dari 10 pencari nafkah utama tetap bekerja dari tempat kerja mereka. Sekitar seperlima (20,4%) pencari nafkah utama bisa bekerja dari rumah. Ini terjadi di semua rumah tangga, termasuk yang memiliki kerabat lanjut usia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, meningkatkan kekhawatiran akan penularan, pengasuhan dan kemampuan untuk mendukung anak-anak belajar dari rumah.

Separuh rumah tangga (51,5%) tidak memiliki tabungan sebagai sandaran. Lebih dari seperempat (27,3%) rumah tangga menggadaikan harta benda untuk bertahan hidup. Seperempat (25,3%) rumah tangga meminjam uang secara informal dari keluarga atau teman. Dari semua rumah tangga dengan banyak utang pribadi, 40% tidak mampu melunasi secara teratur.

Usaha kecil merupakan sumber pendapatan yang penting bagi banyak rumah tangga. Sepertiga dari semua rumah tangga (29,9%) dalam survei ini setidaknya memiliki satu anggota rumah tangga yang menjalankan usaha, dan hampir semua usaha

ini (87,5%) terdampak oleh pandemi. Bahkan sebelum pandemi, sebagian besar usaha rumah tangga merupakan unit usaha berskala kecil, yang seringkali mempekerjakan anggota keluarga tanpa dibayar. Usaha mikro dan kecil berperan penting bagi pekerjaan dan pendapatan bagi rumah tangga di bidang informal. Karena usaha mikro dan kecil relatif mudah untuk dimulai dan ditutup, banyak orang mencari nafkah dengan menjalankan usaha informal mikro, terutama pada masa krisis ketika ekonomi formal menyusut.

Sebagian besar dari mereka yang menjalankan atau bekerja di usaha informal ini menghadapi kondisi kerja yang rentan, tanpa perlindungan sosial dan sering kali dengan perlindungan kesehatan dan keselamatan yang buruk. Mereka biasanya memiliki produktivitas yang rendah, tabungan dan investasi yang rendah, dan modal yang lebih kecil (Perkiraan Prospera menggunakan VIMK 2015, lihat Wells dan Sijapati Basnett, 2020).

Kondisi tersebut membuat usaha skala kecil rentan terhadap guncangan ekonomi yang disebabkan oleh larangan berkegiatan dan pembatasan lainnya serta risiko kesehatan. Selain itu, pemerintah juga makin sulit untuk menjangkau mereka dengan program bantuan usaha. Namun, keruntuhan dan penutupan perusahaan-perusahaan ini dapat memicu lonjakan pengangguran dan setengah pengangguran secara signifikan, yang menyebabkan efek

Tabel 2. Dampak pandemi terhadap usaha kecil (%)

	Semua usaha	Dikelola laki-laki	Dikelola perempuan	Dikelola bersama
1	2	3	4	5
Pembeli berkurang	66.4	61	70.2	70.8
Pendapatan menurun	56.3	57.2	57.5	53.7
Biaya meningkat	11.5	12.5	11.5	10.1
Modal berkurang	10.5	9	11.7	11.4
Ketersediaan bahan mentah terganggu	5.47	6.79	4.32	5.4
Penyaluran/distribusi barang sulit dilakukan	5.3	8.5	3.4	3.4
Tidak bisa membayar pinjaman usaha	2.9	1.4	3.3	5.5
Biaya menurun	2.6	1.8	1.8	5.9
Pembeli bertambah	2.1	1.4	3.0	1.7
Pendapatan meningkat	0.9	0.6	1.4	0.6

Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020.

*Catatan: Persentase didasarkan atas jumlah rumah tangga dengan usaha kecil.

jangka panjang terhadap ekonomi sekaligus memperlambat pemulihan dan/atau mencegah pemulihan yang inklusif (ILO dan OECD, 2020).

Keluhan utama adalah pelanggan yang lebih sedikit (66,4%), pendapatan yang lebih rendah (56,4%) dan biaya yang lebih tinggi (11,5%). Hanya sebagian kecil usaha rumah tangga (3%) yang melaporkan bahwa usaha mereka meningkat.

Karena survei ini dilakukan hampir enam bulan setelah larangan berkegiatan pertama kali diberlakukan, banyak usaha telah dapat mengatasinya dan mampu beradaptasi dengan 'kebiasaan baru'. Hampir separuhnya mengatakan bahwa mereka mampu mempertahankan jam operasional seperti sebelum pandemi. Selain itu, 38,9% usaha yang terdampak parah mampu memangkas biaya dengan cara mengurangi pengeluaran untuk persediaan, gaji dan bonus dan 9,6% usaha telah mengurangi jam operasionalnya. Sekitar 10% menggunakan platform daring untuk memasarkan produknya dan mempertahankan pembeli. Secara keseluruhan, 40% usaha menerapkan protokol kesehatan. Dari jumlah tersebut, 30% mempertahankan jam operasionalnya dengan menerapkan protokol kesehatan sedangkan 10% sisanya beroperasi dengan mengurangi jam operasional. Selama wawancara kualitatif, semua usaha umumnya

mengharapkan masa depan yang lebih cerah dan/atau yakin bahwa mereka bisa beradaptasi dengan 'kebiasaan baru'.

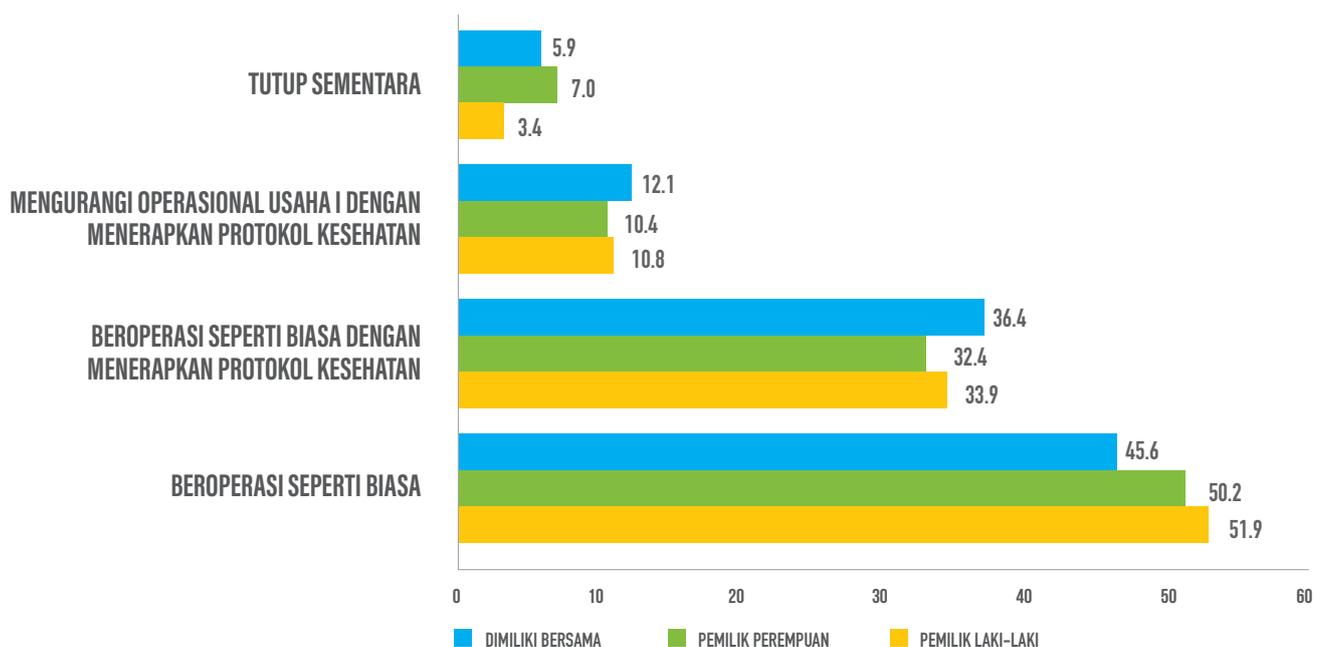
Meskipun demikian, sebagian besar usaha berbasis keluarga masih tetap berjuang--mungkin menandakan lebih banyak masalah struktural jangka panjang. Sebanyak 33,5% usaha dengan utang yang belum dibayar mengatakan bahwa mereka tidak mampu membayar angsuran bulannya; 8,3% usaha harus menjual asetnya; 2,7% mengurangi karyawan. Sementara itu, 8,2% usaha harus tutup sementara agar bisa mengatasi dampak negatif pandemi.

Perempuan memainkan peran utama dalam usaha keluarga. Proporsi usaha milik perempuan yang harus tutup (7%) dua kali lebih tinggi daripada yang dimiliki oleh laki-laki (3,4%). Sebagian besar usaha keluarga skala kecil hanya dimiliki oleh perempuan (40%) atau dimiliki bersama oleh perempuan dan anggota lain di rumah tangga.

“Sejak November, usaha saya mulai pulih. Wisatawan perlahan sudah mulai kembali. Semoga makin banyak yang datang selama liburan akhir tahun.”

(Wawancara mendalam dengan narasumber, Ibu Sari, pedagang kelontong, Kabupaten Kepulauan Seribu, perkotaan, 2 Desember 2020).⁷

Gambar 6. Kegiatan Operasional Usaha



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

⁷ Semua nama dalam laporan ini adalah nama samaran untuk menjaga identitas mereka yang berpartisipasi dalam survei

“Sejak COVID-19, saya harus berpikir keras untuk menghidupi keluarga saya karena jumlah pesanan yang saya terima tidak sama dengan sebelumnya. Akhirnya, saya memutuskan untuk membuat masker dari kain sisa, dan saya bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah, tiga masker seharga Rp10.000 (US\$ 0,7). Toko lain biasanya mengenakan harga yang sama hanya untuk satu masker, dan jahitannya pun biasa-biasa saja dibandingkan dengan yang saya tawarkan.”

(Wawancara mendalam dengan narasumber, Ibu Melati, penjahit, Kota Yogyakarta, perkotaan, 7 Desember 2020).

Salah satu alasan penutupan sebagian besar usaha milik perempuan adalah bahwa usaha ini terutama terpusat di bidang perdagangan ritel, restoran dan akomodasi (81,4%), yang paling terpuak oleh pembatasan sosial yang diberlakukan untuk membatasi penyebaran virus. Ketika pandemi mulai, Prospera memperkirakan bahwa usaha skala kecil yang dimiliki oleh perempuan akan menjadi rentan karena selalu lebih kecil dan memiliki penjualan yang lebih sedikit daripada usaha yang dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, 70,7% dari semua usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh perempuan meraup keuntungan kurang dari Rp1,4 juta (US\$ 98) per bulan. Jumlah ini tidak cukup untuk mencegah agar keluarga yang terdiri dari empat orang tidak jatuh miskin. Usaha-usaha ini berpeluang terkecil untuk bisa bertahan dari pandemi.

Lebih dari separuh (58,1%) usaha keluarga yang dijalankan oleh perempuan memiliki anak-anak usia sekolah, dan perempuan adalah pengasuh utama dan pendukung anak-anak mereka untuk belajar dari rumah. Tantangan yang dihadapi oleh perempuan makin besar karena mereka harus menjaga keseimbangan antara tanggung jawab tambahan mengasuh anak dan lingkungan usaha yang makin menantang.

“Saya selalu mendampingi anak kami belajar daring. Setiap kali saya meminta tolong suami, dia berkata bahwa dia mempunyai urusan di luar dan pergi begitu saja. Padahal saya juga sibuk mengurus warung. Jadi saya tidak dapat membantu anak saya sampai saya ada waktu. Mungkin sekitar pukul 10 atau 11 siang. Kalau anak saya butuh bantuan, saya akan bantu dulu dan meninggalkan warung tanpa ada yang menjaga.”

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Sari, pedagang bahan makanan, Kabupaten Kepulauan Seribu, daerah perkotaan, 2 Desember 2020).

2. 2 Bantuan sosial menjangkau sebagian besar tetapi tidak semua orang yang membutuhkan

Untuk membantu masyarakat akibat dampak buruk pandemi, Indonesia telah memperluas program bantuan sosial secara besar-besaran. Pada 2020, Indonesia menganggarkan sejumlah Rp203 triliun (US\$ 14 juta) untuk menjalankan program perlindungan sosial. Jumlah ini merupakan alokasi terbesar untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Upaya ini telah dilakukan dengan memperluas sistem perlindungan sosial sejak Krisis Keuangan Asia dua dekade lalu dengan cakupan yang dibuktikan oleh data statistik terpercaya yang mencakup 40% penduduk termiskin. Program tanggap COVID-19 telah diperluas dari yang sebelumnya berfokus pada orang miskin menjadi orang berpenghasilan menengah dan usaha kecil yang rentan karena perlambatan ekonomi secara mendadak dan pembatasan aktivitas ekonomi.

Pemerintah telah meningkatkan cakupan dan manfaat dari program bantuan yang ada sembari mulai menerapkan beberapa program perlindungan sosial baru dan langkah-langkah pasar tenaga kerja untuk menjangkau kelompok-kelompok baru yang rentan. Indonesia secara cepat menyalurkan bantuan kepada masyarakat termiskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, dan memberikan subsidi listrik untuk rumah tangga dengan sambungan 450 VA dan 900 VA. Program baru untuk mendukung masyarakat rentan baru juga telah mulai dijalankan, termasuk Kartu Pra Kerja, bantuan produktif usaha mikro (BPUM), subsidi upah untuk pekerja formal, program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD), dan lain-lain.⁸

Per Februari 2021, total anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan sosial pada 2021 adalah sebesar Rp157,41 triliun (US\$ 10,9 miliar), setara dengan 1,02% PDB 2020 (Kemenkeu, 2021). Mengingat besarnya jumlah penerima, Indonesia menganggarkan jumlah bantuan yang sedikit lebih besar daripada Malaysia dan Filipina yang juga telah meluncurkan program serupa (lihat Lampiran Aktivitas IV untuk perbandingan).

8 Rincian informasi setiap program dimuat di Lampiran Aktivitas I

Pengalaman Indonesia dalam menggunakan data untuk memberikan bantuan sosial

Basis data sosial sebelumnya, yang dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), merupakan acuan penyaluran bantuan untuk rumah tangga dan individu selama pandemi. Data ini pertama kali dikembangkan pada 2005 melalui sensus tentang penduduk miskin yang dipimpin oleh Badan Pusat Statistik dan telah diperbarui sebanyak tiga kali (pada 2008, 2011, dan 2015). Saat ini, DTKS telah menjangkau 27 juta rumah tangga berpenghasilan rendah dan mewakili 40% populasi.

Sebelum pandemi, program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan program sembako Kartu Sembako ditujukan untuk rumah tangga termiskin. Tidak semua rumah tangga dan individu yang terdaftar di DTKS menerima bantuan. Namun, selama pandemi, Indonesia telah menggunakan basis data untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan penerima manfaat baru ke dalam program, seperti bantuan sembako bagi penduduk Jakarta dan sekitarnya, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk rumah tangga di luar wilayah Jabodetabek (BST). Basis data tersebut juga telah digunakan untuk memperluas wilayah pemberian bantuan dan menghindari penggandaan bantuan.

Namun, bergantung sepenuhnya pada data terbukti menyulitkan mengingat data tidak diperbarui secara teratur, berbeda dengan negara-negara seperti Brasil, Turki, dan Filipina, yang status ekonomi warganya didata secara teratur untuk menyesuaikan bantuan (pasar tenaga kerja dan/atau kebutuhan dasar) yang disediakan untuk mereka. Terlebih, DTKS belum dapat dioperasikan dengan data lain seperti nomor induk kependudukan (NIK).

Masalah tersebut dan kurangnya data penduduk rentan miskin Indonesia (pengeluaran kelompok penduduk 40% terbawah), termasuk orang-orang yang bekerja di sektor ekonomi informal, telah diatasi dengan langkah-langkah inovatif, seperti pencatatan penggunaan listrik (subsidi listrik); penargetan berbasis masyarakat (BLT DD); pendaftaran diri melalui aplikasi berdasarkan permintaan (Kartu Pra Kerja); dan sumber data baru lainnya seperti data rekening bank (BPUM).

Namun, seperti yang ditunjukkan oleh hasil survei, masih banyak langkah yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang belum menerima bantuan apa pun selama berlangsungnya krisis. Adanya data yang tepercaya dan diperbarui secara berkala akan sangat penting untuk merespons guncangan pada masa mendatang.

Survei menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga (85,3%) menerima setidaknya satu bentuk bantuan sosial. Bantuan tersebut termasuk barang atau uang tunai. Setengah dari penerima bantuan (50,8%) mendapatkan bantuan tunai. Di antara rumah tangga yang disurvei, 88,9% menyatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan sosial; 72,6% diantaranya membutuhkan bantuan tunai. Secara keseluruhan, proporsi antara masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan yang telah menerima bantuan hanya berselisih tiga persen. Proporsi antara masyarakat yang membutuhkan uang tunai dengan yang telah menerima uang tunai berselisih lebih besar, yakni 14%.

Rumah tangga dengan proporsi penerima bantuan yang lebih tinggi ialah rumah tangga yang dikepalai perempuan (55,1%); rumah tangga yang memiliki anak (52,9%); rumah tangga perdesaan (59,6%); dan rumah tangga 40% terbawah (63,5%) menerima bantuan tunai. Menariknya, bantuan pemerintah menjangkau

lebih banyak rumah tangga yang dikepalai perempuan dan rumah tangga 40% terbawah dibandingkan dengan bantuan keuangan yang diberikan kepada kelompok-kelompok ini melalui sanak saudara dan jaringan sosial mereka. Sebanyak 16,4% rumah tangga yang dikepalai perempuan dan 8,8% penduduk 40% terbawah menerima uang tunai dari keluarga besar atau tetangga mereka. Hasil ini menunjukkan perbedaan jumlah masyarakat yang terjangkau. Mereka tidak menyatakan bantuan mana yang lebih dapat memenuhi kebutuhan mereka atau apakah kedua bantuan tersebut dapat saling melengkapi. Namun, ditunjukkan pentingnya bantuan pemerintah selama masa krisis ini.

Rumah tangga yang disurvei menerima setidaknya satu dari enam jenis bantuan tunai pokok, yakni BLT DD, BST, PKH, subsidi upah, Kartu Pra-Kerja, BPUM. Setidaknya, bantuan diberikan sebanyak dua kali kepada semua peserta survei. Hasil survei itu merupakan kabar baik mengingat banyaknya berbagai program yang



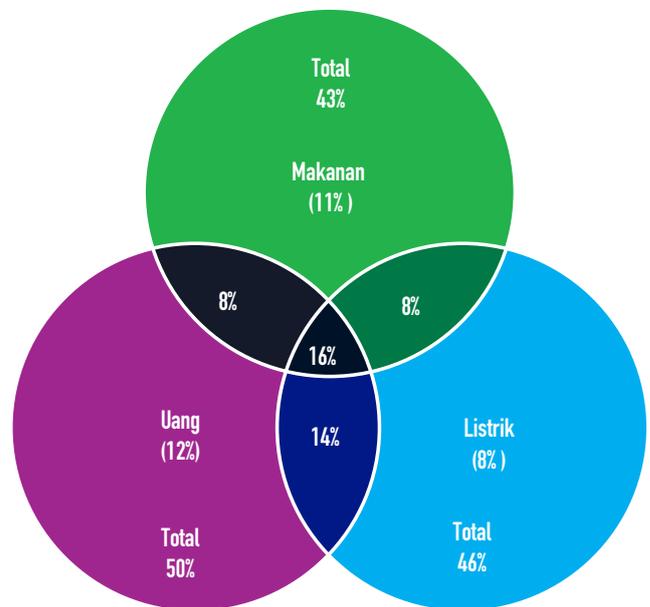
© UNICEF/34.6202/Wilander

diluncurkan dengan cepat melalui berbagai mekanisme kelayakan dan pelaksanaan, Indonesia telah memenuhi kebutuhan masyarakat atas masalah utama yang dihadapi dan menghindari penggantian bantuan di seluruh program (Sudarno, 2020).

Banyak rumah tangga juga telah menerima bantuan tunai dan nontunai. Secara keseluruhan, 77% rumah tangga menerima setidaknya satu dari tiga program dengan jangkauan terluas: uang tunai (50%), subsidi listrik (46%), dan makanan pokok (43%). Di antara penerima uang tunai, 32% diantaranya juga menerima subsidi listrik dan bantuan sembako; 28% menerima subsidi listrik; 16% menerima makanan pokok; sementara 24% tidak menerima salah satu dari dua lainnya.

Selama wawancara mendalam, penerima bantuan menyatakan bahwa uang tunai memungkinkan mereka untuk memilih barang atau jasa yang akan dibelanjakan, sementara subsidi listrik dan bantuan kuota internet menutup biaya belajar dan bekerja dari rumah. Bantuan berupa bantuan sembako mengurangi pengeluaran biaya kebutuhan makanan. Hasil ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan cukup menyeluruh karena dapat mencukupi kebutuhan di antara 60% penerima bantuan uang tunai yang juga menerima bantuan lain. Namun, banyak juga penerima yang hanya mendapatkan satu jenis bantuan (hanya uang tunai atau hanya sembako).

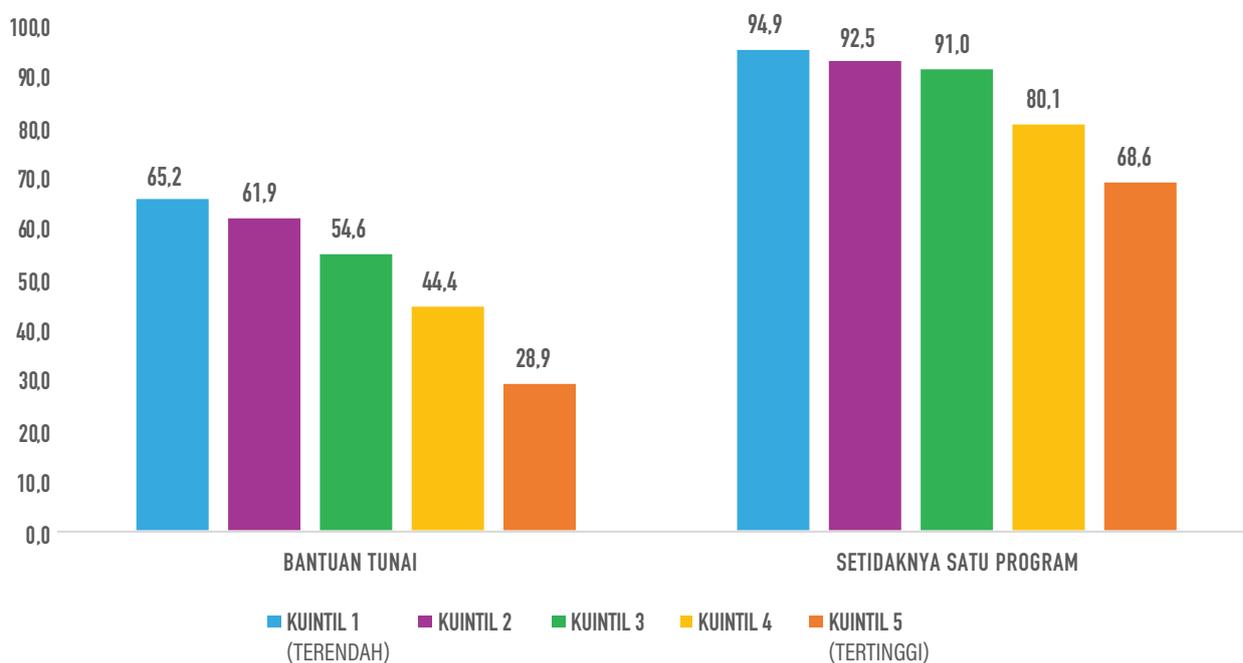
Gambar 7. Gabungan bantuan yang diterima oleh rumah tangga*



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

*Catatan: di antara mereka (23%) yang tidak menerima bantuan dari tiga program pokok, 35% menerima bantuan lain seperti penangguhan pinjaman, keringanan pajak, dan/atau subsidi internet.

Gambar 8. Proporsi penerima manfaat berdasarkan tingkat pengeluaran (%)



Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

Sebagian besar rumah tangga miskin dan rentan (lebih dari 90% di Kuintil 1-3) menerima setidaknya satu program bantuan sosial dan mendapat bantuan lebih banyak daripada rumah tangga yang lebih mampu.

Gambar 8 di atas ini menunjukkan bahwa proporsi penerima manfaat di antara kelompok miskin lebih besar dibandingkan dengan kelompok pengeluaran lainnya. Proporsi penerima manfaat di setiap kuintil berkurang dengan meningkatnya kekayaan rumah tangga. Penurunan ini terlihat khususnya setelah kuintil 3. Dengan kata lain, perbedaan proporsi penerima manfaat antara kuintil 1, 2, dan 3 terbilang kecil (dengan beberapa persentase lebih rendah), tetapi perbedaan antara proporsi penerima manfaat di kuintil 3 dan 4 hampir 10 pp, dan perbedaan antara kuintil 4 dan 5 (terkaya) berjumlah 11,5 pp. Pola yang sama dapat dijumpai di bantuan tunai. Rumah tangga miskin dan rentan (Kuintil 1-3) berpeluang lebih besar untuk menerima setidaknya satu bentuk bantuan sosial dan/atau bantuan tunai dibandingkan dengan rumah tangga yang lebih mampu.⁹

Beberapa rumah tangga yang sebelumnya terjamin secara ekonomi tetapi mengalami kehilangan pendapatan yang signifikan akibat COVID-19 juga dapat mengakses bantuan.

Gambar tersebut menunjukkan bahwa 28,9% dari mereka yang memiliki pengeluaran tertinggi (Kuintil 5) menerima bantuan tunai, tetapi tidak berarti bahwa semua bantuan yang diterima oleh kelompok ini salah sasaran karena dua alasan utama. Pertama, 72,9% dari mereka yang berada di Kuintil 5 (pada 2019) mengalami penurunan pendapatan rata-rata sebesar 45%. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa 70,9% dari mereka mengatakan bahwa mereka membutuhkan bantuan sosial. Jadi, meskipun kelompok kuintil 5 tidak sangat kaya pada saat survei dilakukan, beberapa rumah tangga di kuintil 5 juga layak mendapatkan bantuan karena mereka terkena dampak negatif pandemi. Kedua, tidak semua program bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat miskin. Program seperti Kartu Pra-Kerja menasar individu yang belum terdaftar di pencatatan sipil dan belum menerima bantuan tunai dalam bentuk apa pun, padahal paket internet, BPUM, dan subsidi upah tersedia untuk semua orang yang memenuhi kriteria kelayakan di luar pendapatan mereka. Ringkasan hasil spesifik program disajikan di Tabel 4 di dalam saran kebijakan.

9. Besarnya kemungkinan yang sama untuk menerima bantuan menurut kuintil pengeluaran juga dibenarkan oleh berbagai model regresi logistik dengan dan tanpa membatasi poin penilaian rumah tangga seperti jenis kelamin dan usia kepala rumah tangga, jumlah anggota keluarga, keberadaan anak, wilayah perdesaan/perkotaan, dan di dalam atau luar Jawa.

Apakah bantuan sosial terlalu banyak menjangkau rumah tangga kaya?

Mungkin tampak mengejutkan bahwa begitu banyak rumah tangga di kuintil pengeluaran yang lebih tinggi menerima bantuan sosial selama pandemi. Namun, analisis menunjukkan bahwa hanya rumah tangga di 20% teratas dari distribusi pengeluaran (Kuintil 5) berpenghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sebelum COVID-19. Rumah tangga di 80% terbawah dari distribusi (Kuintil 1-4) berpenghasilan terlalu rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, bantuan pemerintah sudah tepat menjangkau kelompok-kelompok ini.

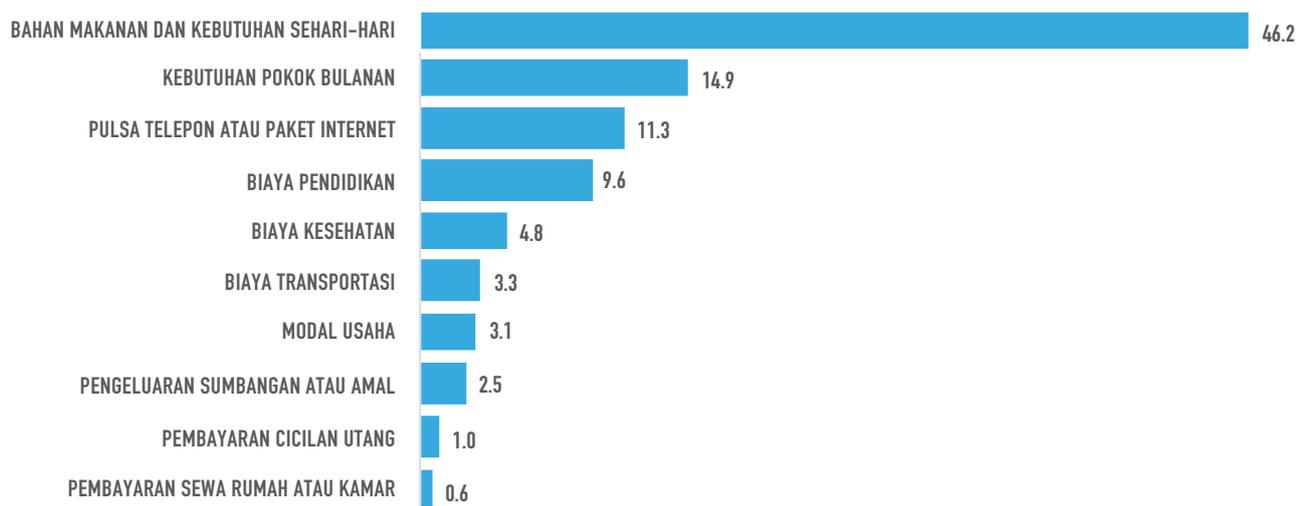
Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang nilai pengeluaran setiap kuintil, Gambar 2 menunjukkan median pengeluaran bulanan lima kelompok kelas sosial dalam survei rumah tangga. Rumah tangga miskin (Kuintil 1) mengeluarkan rata-rata Rp430.000 (US\$ 29,8) per bulan pada 2019.

Garis kemiskinan nasional pada tahun itu adalah Rp425.000 (US\$ 29,5). Dengan kata lain, sekitar setengah populasi Kuintil 1 terbilang miskin.

Kelompok berpenghasilan menengah (Kuintil 2, 3, dan 4) mempunyai pengeluaran bulanan rata-rata Rp670.000 (US\$ 46,44), Rp967.000 (US\$ 67,0), dan Rp1.367.000 (US\$ 94,4). Angka ini menunjukkan bahwa median pengeluaran rumah tangga tersebut berada di bawah biaya standar hidup layak. Pendapatan kelompok rumah tangga ini berisiko menurun akibat COVID-19 dan berisiko jatuh miskin.

Sementara itu, pengeluaran bulanan rata-rata rumah tangga kaya (Kuintil 5) adalah Rp2.362.000 (US\$ 163,7). Jumlah tersebut kurang lebih sepertiga lebih tinggi daripada standar biaya hidup layak¹⁰. Temuan ini menunjukkan bahwa bahkan rumah tangga kaya sekalipun, meski secara ekonomi lebih terjamin daripada kelompok yang berada di kuintil lebih rendah, tidak sangat kaya. Mereka juga akan berisiko jatuh miskin jika dihadapkan pada guncangan pendapatan yang dahsyat.

Gambar 9. Penggunaan bantuan



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

10. Biaya hidup layak yang ditampilkan dalam grafik ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dengan angka nasional terbaru yang tersedia dari 2015 (BPS, 2020b). Biaya hidup layak digunakan untuk menetapkan upah minimum dan dalam beberapa tahun terakhir, upaya penghitungan biaya hidup layak lebih terdesentralisasi di tingkat provinsi dan menjadi tugas Dewan Pengupahan Provinsi berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Di tingkat pusat, Kementerian Ketenagakerjaan memasukkan komponen biaya ke dalam perhitungan biaya hidup layak untuk pekerja lajang (Kemnaker, 2020)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial meringankan tekanan keuangan rumah tangga. Rumah tangga melaporkan bahwa mereka menggunakan bantuan sosial untuk membeli bahan makanan dan barang penting lainnya (46,2%) dan untuk membayar keperluan (14,9%) dan pulsa telepon/paket internet (11,3%).

Sebagian besar penerima bantuan (67,4%) merasa bahwa bantuan pemerintah bermanfaat. Masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan rumah tangga secara signifikan menjelaskan bagaimana bantuan sosial membantu mereka selama wawancara mendalam berikut:

“Saya menghabiskan bantuan tunai yang diberikan pemerintah dalam satu hari untuk melunasi sebagian utang saya di toko bahan makanan. Saya berharap saya akan dapat bekerja kembali atau mendapat bantuan tambahan dari pemerintah. Saya akan bisa melunasi utang saya yang belum lunas. Alhamdulillah, saya bisa mendapatkan sedikit bantuan, tidak seperti keluarga lain yang tengah berjuang dan belum mendapatkan bantuan.”

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Rini, pembuat bordir mukena, Kota Tasikmalaya, daerah pedesaan, 16 November 2020).

“Saya belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah sebelum pandemi. Namun, sejak Agustus, saya sudah menerima bantuan dalam tiga tahap. Saya menggunakan Rp500.000 (US\$ 34,7) pertama untuk pengobatan anak saya yang cacat. Dan saya menggunakan bantuan yang saya terima terima pada September dan Oktober 2020 untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya”

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Tati, ibu rumah tangga, Kota Banjar, daerah perkotaan, 19 November 2020).

Namun, satu dari tiga rumah tangga (atau 34,8%) di 20% terbawah dari distribusi pengeluaran tidak menerima bantuan tunai (bentuk bantuan yang lebih disukai oleh 72,6% responden). Persentase rumah tangga di 20% terbawah yang tidak menerima bantuan tunai menurut jenis kerentanan adalah sebagai berikut: 32,7% rumah tangga yang mempunyai anak, 32,9% rumah tangga yang dikepalai perempuan, dan 34,7% rumah tangga dengan anggota keluarga cacat. Kotak Informasi 4 membahas dua langkah utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi akibat COVID-19.



©UNICEF/UN035261/Bea

Hasil survei menunjukkan bahwa rumah tangga miskin dan menengah ke bawah yang berada di luar jaring pengaman sosial juga membutuhkan bantuan.

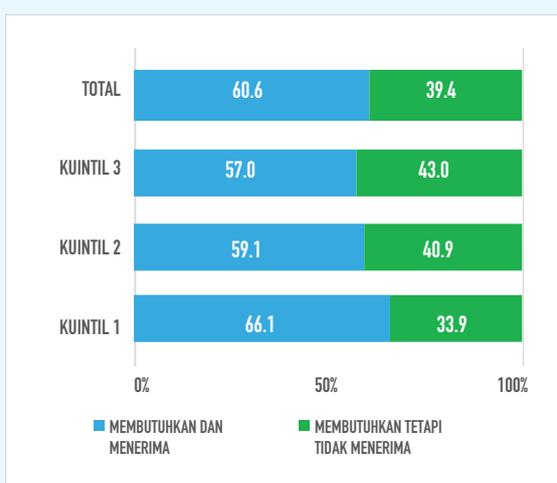
Seperti yang ditunjukkan oleh Kotak Informasi di bawah ini, proporsi yang sama dari penerima uang tunai dan nontunai di tiga kuintil terbawah melaporkan penurunan pendapatan dan pengeluaran selama pandemi. Proporsi penerima nontunai yang lebih tinggi melaporkan bahwa mereka sulit memenuhi kebutuhan makanan mereka sendiri dan membayar kebutuhan sekolah anak-anak mereka dibandingkan dengan penerima tunai, meskipun penerima nontunai relatif lebih beruntung secara ekonomi sebelum pandemi. Semua hasil ini menunjukkan perlunya memperluas cakupan bantuan tunai dan menjangkau rumah tangga miskin dan menengah ke bawah yang terkena dampak pandemi tetapi tidak dijamin oleh jaring pengaman sosial.

Banyak rumah tangga membutuhkan bantuan tunai tetapi tidak menerimanya

Secara keseluruhan, 71% rumah tangga di 60% terbawah dari distribusi pengeluaran melaporkan bahwa mereka membutuhkan bantuan tunai dari pemerintah. Di antara mereka, 60,6% telah menerima uang tunai, sedangkan 39,4% tidak. Hasil survei menunjukkan bahwa kedua kelompok mencatatkan proporsi penurunan kesejahteraan yang sama dengan penurunan pendapatan (75-76%) atau pengeluaran (25-28%).

Distribusi menurut kuintil disajikan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 10. Distribusi rumah tangga



Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

Di antara rumah tangga di tiga kuintil terbawah yang melaporkan bahwa mereka membutuhkan bantuan tunai, mereka yang menerima uang tunai cenderung mempunyai kondisi kesejahteraan awal yang lebih rendah daripada yang tidak menerima bantuan dalam hal pengeluaran per kapita 2019 dan pengeluaran kebutuhan pangan.

Namun, hasil survei menunjukkan bahwa kedua kelompok mengalami penurunan pendapatan (75-76%) dan pengeluaran (25-28%) dengan proporsi yang sama. Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa di antara mereka yang mengaku membutuhkan bantuan tunai memang terkena dampak buruk pandemi.

Proporsi rumah tangga penerima bantuan nontunai yang lebih tinggi melaporkan bahwa mereka khawatir terhadap ketersediaan pangan (Lihat Bagian 2.4 untuk pembahasan lebih spesifik) dan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sekolah dibandingkan dengan penerima uang tunai. Misalnya, 12,3% rumah tangga penerima bantuan nontunai menyatakan bahwa mereka makan lebih sedikit daripada biasanya. Pada kelompok yang menerima uang tunai, proporsinya lebih rendah, yaitu 8,3%.

Sebanyak 60% rumah tangga penerima bantuan nontunai melaporkan bahwa mereka mengalami kesulitan membayar kebutuhan pendidikan, sedangkan proporsi penerima bantuan tunai adalah 58%. Hasil ini sangat terlihat mencolok di antara rumah tangga penerima bantuan nontunai di kuintil 3, diikuti oleh kuintil 1 dibandingkan dengan kelompok lain yang telah menerima bantuan (Lihat Lampiran Aktivitas VI untuk rincian kuintil).

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran antara Tahun 2019 dan 2020 dari 60% Rumah Tangga Terbawah

Perihal	Total 60% Terbawah (Kuintil 1-3)	
	Penerima bantuan tunai	Penerima bantuan nontunai
Batas pengeluaran tahun 2019		
Pengeluaran per kapita (dalam rupiah)	682807,8	724229,8
Pengeluaran makanan per kapita (dalam rupiah)	416384,9	428733,2
Pendapatan tahun 2020		
Penghasilan berkurang dibandingkan Januari*	75,9%	74,5%
Pengeluaran berkurang dibandingkan dengan Januari	25,6%	28,0%
Kondisi ketahanan pangan tahun 2020		
Makan dengan porsi lebih kecil dari biasanya	8,3%	12,3%
Kehabisan persediaan pangan	5,6%	8,6%
Tidak makan sepanjang hari	2,2%	4,1%
Situasi sulit lainnya pada 2020		
Kesulitan membayar biaya pendidikan**	52,8%	59,9%

* Persentase yang ditampilkan hanya kalkulasi pernyataan responden yang mengisi semua pertanyaan survei

** Persentase yang ditampilkan adalah kalkulasi pernyataan responden yang wajib memenuhi kebutuhan sekolah

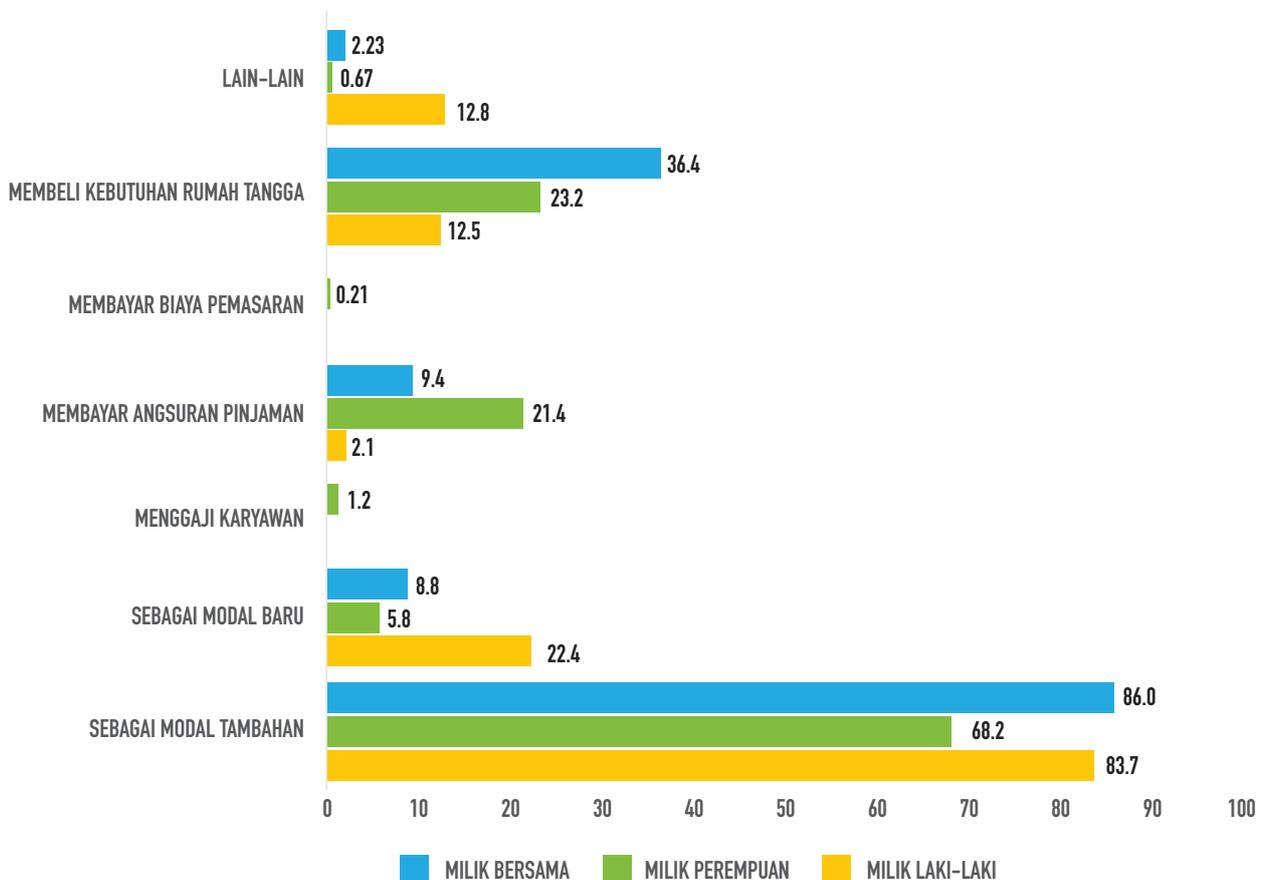
Sedikit sekali rumah tangga (75%) yang menjalankan usaha kecil menerima bantuan usaha dari pemerintah saat dilakukan survei. Bantuan tersebut termasuk hibah tunai, konsesi pajak, dan penangguhan pinjaman.¹¹

Penerima bantuan memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya. Sekitar 80% penerima menggunakan bantuan sebagai tambahan modal, sedangkan 12% menggunakannya sebagai modal awal. Sebanyak 12% menggunakan bantuan untuk melunasi pinjaman dan hampir seperempat menggunakannya untuk pengeluaran rumah tangga. [Persentase ini merupakan rata-rata dari tiga kelompok penerima yang disajikan pada Gambar 11]. Ada perbedaan mencolok dalam usaha yang dikelola perempuan yang memanfaatkan bantuan dibandingkan dengan usaha yang dikelola laki-laki atau bersama. Para perempuan tersebut menggunakan bantuan sebagai modal tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tampak bahwa bantuan lebih dapat dimanfaatkan oleh perempuan.



© UNICEF/ UN0409842/ Bea

Gambar 11. Penggunaan bantuan usaha (jawaban boleh lebih dari satu)



11. Program hibah tunai (menargetkan sekitar 12 juta usaha mikro atau 20% dari perkiraan jumlah usaha) sendiri telah diluncurkan satu bulan sebelum survei, mungkin ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya mengingat waktu pelaksanaan survei-bantuan mulai diberikan pada September 2020.

Dukungan Indonesia bagi UMKM: sebuah pandangan komparatif

Untuk memastikan usaha kecil memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan melanjutkan jalannya bisnis mereka, sebagian besar negara di kawasan Asia Pasifik telah memberikan sejumlah besar pinjaman bebas agunan atau pinjaman berbunga rendah. India, misalnya, memusatkan upayanya dalam mendukung UMKM dengan menyiapkan pinjaman tanpa agunan senilai 3 triliun rupee India (1,44% dari PDB 2019) bagi UMKMpada 2020 (OECD, 2020). Indonesia menerapkan langkah serupa dalam bentuk subsidi agunan dengan anggaran Rp8,5 triliun (US\$ 593,1 juta) atau 0,06% dari PDB (Kemenkeu, 2020b). Kebijakan lain untuk mendukung usaha kecil selama pandemi adalah restrukturisasi kredit atau penangguhan pembayaran pinjaman dan keringanan pajak.

Indonesia juga telah memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp2.400.000 (US\$ 167) untuk 12 juta UMKM melalui skema Bantuan Presiden Usaha Mikro mengingat banyaknya UMKM di Indonesia yang belum mendapatkan pinjaman bank dan mengandalkan

sumber pembiayaan informal (ILO, 2019; ADB, 2020). (lihat Lampiran Aktivitas I). Ini jumlah digunakan untuk mendukung 20% dari 60 juta usaha mikro di Indonesia. Program ini bersandar pada berbagai lembaga seperti kreditur mikro, bank milik negara, dan/atau kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah setempat untuk membuat daftar nama calon penerima manfaat.

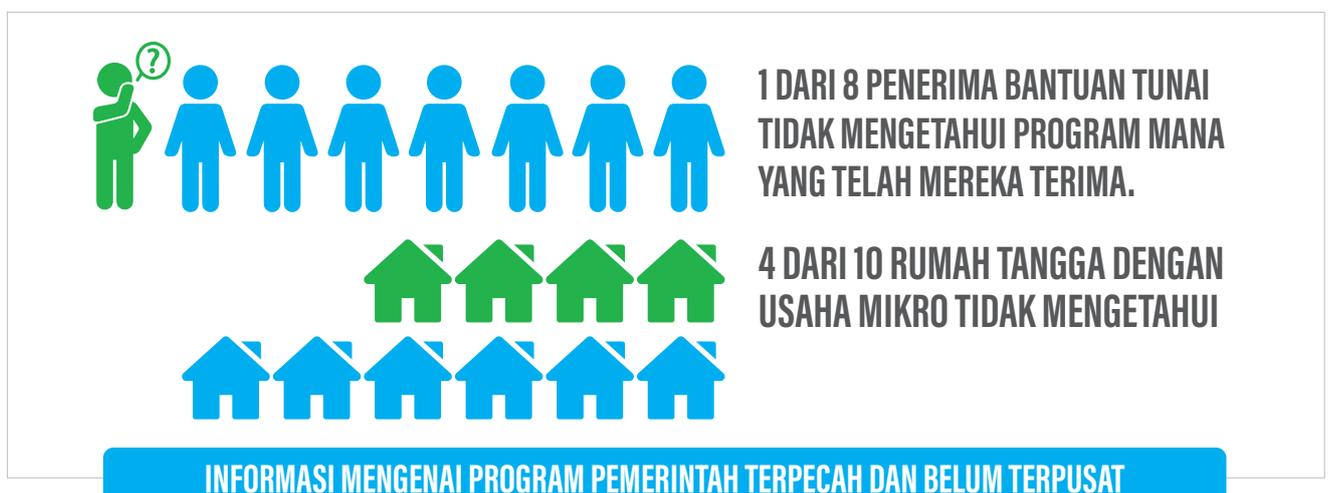
Hasil survei menunjukkan bahwa 6,6% rumah tangga dengan usaha keluarga telah menerima BPUM pada saat survei (Oktober-November). Rendahnya jangkauan (sekitar sepertiga dari target distribusi) mungkin disebabkan oleh masih diimplementasikannya program (dimulai pada bulan September) pada saat survei. Akan tetapi, musti diingat bahwa usaha yang dijalankan keluarga lebih sulit dijangkau karena beroperasi secara informal dan mungkin tidak terdaftar sebagai pengusul program yang ditunjuk. Meskipun demikian, hasil survei menunjukkan bahwa 80% penerima bantuan (6,6% rumah tangga yang memiliki bisnis keluarga) menggunakan bantuan tersebut untuk modal tambahan seperti yang dimaksudkan oleh desain program.

Kesadaran terkait bantuan usaha masih rendah.

Sebanyak 36,8% pemilik usaha kecil mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa pemerintah menyediakan bantuan usaha. Sekitar 12,3% penerima uang tunai mengaku tidak tahu tentang program yang mereka terima mungkin karena informasi tentang program-program pemerintah masih terpecah dan belum terpusat.

Di tingkat program, banyak program yang berjalan sebagaimana mestinya dan bersama-sama membantu menjangkau sebagian besar penduduk. Namun, perlu ada perbaikan secara individu maupun kolektif untuk menjangkau lebih banyak penerima dan memperluas manfaat bagi yang sudah ada seperti yang digambarkan oleh Kotak 5 mengenai Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ringkasan hasil survei program utama disajikan di Tabel 4 Bagian 3.9 tentang rekomendasi kebijakan.

Gambar 12. Kesadaran terhadap bantuan pemerintah



Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Program Keluarga Harapan

Untuk menyesuaikan program yang ada dan menjawab tantangan zaman, pemerintah mencanangkan **Program Bantuan Langsung Tunai Desa** atau BLT-DD dengan target menjangkau 11 juta rumah tangga di perdesaan yang tidak menerima program bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau kartu Sembako. Penerima bantuan berhak mendapatkan Rp600.000 (US\$ 41,6) per bulan dari April hingga Juni, dan Rp300.000 (US\$ 20,8) per bulan dari Juli hingga Desember (Kemenkeu, 2020c). Pendanaan program ini berasal dari program Dana Desa yang pertama kali dimulai pada 2015 melalui peristiwa penting pengesahan Undang-undang Desa sehingga desa dapat menerima dana langsung dari pemerintah pusat setiap tahun untuk membiayai pembangunan desa (Kemendes PDTT, 2015).

Desa diharuskan menggunakan hingga 35% Dana Desa untuk menyediakan jaring pengaman sosial bagi rumah tangga miskin sebagai akibat dari COVID-19. Desa mendapatkan keleluasaan untuk menentukan kelayakan rumah tangga melalui dua proses tahapan: kunjungan rumah ke rumah oleh setidaknya tiga orang untuk mengidentifikasi rumah tangga yang terdampak, dan pertemuan satu desa untuk menyempurnakan daftar penerima manfaat. Pelaksana program harus memprioritaskan rumah tangga rentan yang terkena dampak buruk pandemi, termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan dan penyandang disabilitas (Bappenas, 2020).

Survei menunjukkan bahwa masyarakat miskin dan rentan paling diuntungkan oleh program ini (kuartil 1-3). Program ini juga menjangkau lebih banyak rumah tangga yang dikepalai perempuan (21,5%) dibandingkan dengan yang dikepalai laki-laki (17,3%). Sebanyak 19,6% rumah tangga di 40% terbawah dari distribusi pengeluaran yang memiliki anak juga menerima dana BLT-DD. Hasil ini menegaskan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat untuk membuat daftar penerima manfaat dan mendistribusikan uang tunai telah efektif selama pandemi COVID-19. Pendekatan tersebut mampu mengurangi kesalahan eksklusi mengingat masyarakat sekitar lebih mengerti kondisi warganya akibat guncangan pandemi (lihat JPAL, 2020). Pemantauan kualitatif baru-baru ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dan warganya puas dengan pelaksanaan program (Kurniawan, 2020).

Namun, hasil survei menunjukkan bahwa 24,2% rumah tangga termiskin di 40% terbawah yang tinggal di perdesaan tidak menerima bantuan tunai, termasuk dari BLT-DD. Temuan ini menunjukkan bahwa program BLT-DD perlu diperluas untuk menjangkau kelompok miskin dan rentan akibat pandemi. Pemberdayaan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan membuat daftar penerima bantuan sembari mengizinkan mereka untuk mendaftarkan diri mereka sendiri dapat membantu memperluas jangkauan program.

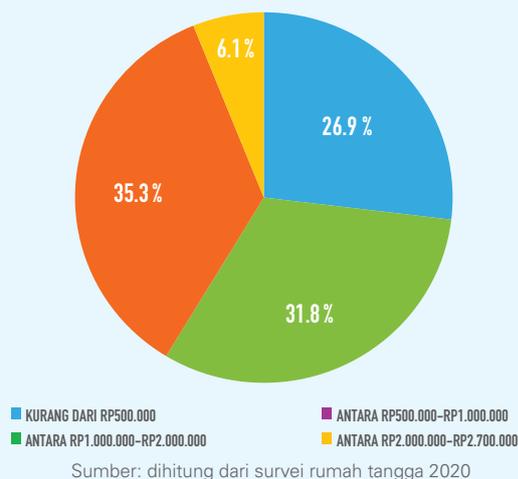
Peningkatan jumlah bantuan yang disalurkan melalui program unggulan bansos, yakni **Program Keluarga Harapan (PKH)**, merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi keluarga miskin dari keterpurukan ekonomi. Penerima yang ada berhak atas 25% transfer reguler saat ini dapat menerima penambahan transfer bulanan, alih-alih per kuartal.

PKH diluncurkan pada 2007 untuk meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan rumah tangga miskin di Indonesia. Rumah tangga miskin dengan anak-anak dan perempuan hamil berhak atas bantuan tunai untuk memenuhi biaya sekolah dan/atau fasilitas kesehatan. Baru-baru ini, pada 2016, rumah tangga miskin yang memiliki anggota keluarga lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas juga dapat mengakses program tersebut (Kemensos, 2020a).

Jumlah bantuan tunai tergantung pada jumlah anggota yang memenuhi syarat dalam rumah tangga dengan maksimal empat anggota yang memenuhi syarat per rumah tangga (Kemensos, 2020b). Misalnya, sebuah rumah tangga dengan seorang perempuan hamil dan seorang anak di bawah 5 tahun berhak atas dua bantuan sebesar Rp3.000.000 (US\$ 207,9) per tahun. Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga lanjut usia atau penyandang disabilitas masing-masing berhak atas Rp2.400.000 (US\$ 166,3) per tahun. Bagi anak usia sekolah, jumlah manfaat sedikit lebih rendah dan bervariasi tergantung usia mereka (Rp900.000 atau US\$ 62,38 sampai Rp1.500.000 atau US\$ 103,9). Oleh karena itu, jumlah maksimum manfaat yang diterima oleh sebuah rumah tangga adalah Rp10.800.000 per tahun (US\$ 748,1).

Hasil survei menunjukkan bahwa 33% rumah tangga miskin (kuintil 1) memperoleh manfaat dari program ini. Gambar 13 menyajikan manfaat tambahan yang didapatkan oleh penerima manfaat program PKH selama masa pandemi. Jumlah bantuan telah dihitung sebagai 25% dari jumlah manfaat tahunan/anggota yang memenuhi syarat dalam rumah tangga dan membatasi empat anggota yang memenuhi syarat per rumah tangga. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 94% penerima manfaat program mendapatkan hingga Rp2.000.000 (US\$ 138,6) dan 6% sisanya menerima antara Rp2.000.000 hingga Rp2.700.000 (US\$ 138,6) sebagai manfaat tambahan pada 2020.

Gambar 13. Perkiraan tambahan bantuan tunai yang diterima oleh penerima manfaat PKH selama pandemi (%).



Semua program bantuan tunai bertujuan untuk memberikan proporsi manfaat yang sama kepada semua penerima, terlepas dari penyedia bantuannya. Namun, simulasi kami menunjukkan bahwa manfaat tambahan yang didapatkan penerima PKH akibat COVID-19 lebih kecil dari jumlah yang didapatkan oleh penerima manfaat program tanggap COVID-19 lainnya, seperti BLT DD atau BST, yang berhak atas transfer total Rp3.600.000 untuk 9 bulan antara April dan Desember 2020. Simulasi tersebut membenarkan temuan sebelumnya dari penelitian lain (Hastuti et al. 2020).

Mengingat penerima PKH adalah rumah tangga termiskin dan tidak diperbolehkan menerima uang tunai dari skema tanggap COVID-19 lainnya untuk menghindari bantuan ganda, temuan ini kurang ideal. Memang, survei menunjukkan bahwa sebagian kecil penerima manfaat PKH juga mendapatkan bantuan tunai lainnya.

Sebagai bahan evaluasi, PKH diharapkan setidaknya menyeimbangkan manfaat yang diberikan dengan manfaat lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan manfaat tambahan kepada penerima PKH selama periode ini yang berbanding terbalik dengan jumlah anggota rumah tangga yang memenuhi syarat dan/atau memungkinkan penerima PKH untuk juga menerima bantuan tunai lainnya.

2.3 Anak-anak kehilangan kesempatan pendidikan dan layanan kesehatan

Sementara risiko kesehatan 80 juta anak Indonesia akibat COVID-19 telah menurun (sekitar 30% dari total populasi), kesehatan, kesejahteraan, perkembangan, dan prospek masa depan anak-anak sedang berubah secara besar-besaran akibat dampak sekunder krisis. Seiring dengan kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat resesi ekonomi (Bank Dunia, 2020; BPS, 2021a), anak-anak, sebagai tanggungan orang tua,

merupakan salah satu kelompok yang paling berisiko mengalami penurunan standar hidup dan kesejahteraan personal. Penutupan sekolah sejak awal Maret 2020 mengakibatkan hampir 60 juta siswa belajar dari rumah. Mereka juga sulit mendapatkan layanan kesehatan esensial. Sementara seluruh anak dari segala usia terkena dampak pandemi, isu ketidaksetaraan mungkin diperburuk oleh dampak sosial-ekonomi dan langkah-langkah untuk menekan penularan dan mengendalikan pandemi (UNICEF, 2021a).

Hasil survei menunjukkan sebagian besar rumah tangga (75,3%) yang memiliki anak mengalami penurunan pendapatan. Kehilangan pendapatan rumah tangga yang secara tiba-tiba begitu mengkhawatirkan karena dapat memperburuk kemiskinan dan pemiskinan anak. Menurut perkiraan UNICEF 2019, bahkan sebelum krisis, 13% anak-anak dan remaja hidup dalam kemiskinan (UNICEF, 2020a). Sembilan dari 10 anak kehilangan setidaknya satu dimensi kesejahteraan anak, seperti: kurangnya akses pangan dan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi, dan perlindungan anak. Menurut perkiraan UNICEF yang baru pada 2020, kemiskinan anak dapat meningkat secara signifikan (sebesar 2,1 juta anak) jika bantuan darurat dibatalkan pada 2021 (UNICEF, 2021a).

Studi terbaru ini yang dilakukan bersama oleh UNICEF Indonesia dan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (2021) menemukan bahwa tanpa perluasan sementara sistem perlindungan sosial, rata-rata kemiskinan anak akan meningkat sebesar 14%. Di antara semua program bantuan sosial yang bermanfaat, Program Keluarga Harapan berdampak terbesar (sekitar 60% menurut hasil simulasi) mengingat bantuan tersebut berfokus pada anak-anak.

Hampir tiga dari empat orang tua khawatir akan kehilangan kesempatan pembelajaran karena terganggunya pendidikan anak-anak mereka. Mereka mungkin juga khawatir bahwa anak-anak mereka tidak akan dapat menguasai materi pembelajaran serta keterampilan karena sudah lama sekali anak-anak tidak belajar di sekolah atau karena pembelajaran yang tidak memadai. Bahkan sebelum pandemi, sebuah studi global pada 2018 yang dilakukan oleh OECD (2019) memperkirakan bahwa sekitar 70% siswa Indonesia yang berusia 15 tahun belum mencapai kemampuan minimal membaca dan menghitung. Selain itu, penutupan sekolah yang berkepanjangan akan menggagalkan kemajuan pesat yang telah dicapai Indonesia terkait pencatatan pendaftaran sekolah selama dekade terakhir dan makin memperburuk krisis pembelajaran (UNICEF, 2020a).

Berdasarkan survei, enam bulan setelah mulainya masa pandemi, 3,45% rumah tangga memiliki satu atau lebih anak yang putus sekolah. Alasan utama putus sekolah adalah ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah (31%) dan kurangnya minat bersekolah (30%). Temuan ini dilengkapi oleh hasil survei terpisah berskala besar

yang dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang dampak COVID-19 pada anak sekolah dari September hingga Desember 2020¹². Di antara lebih dari 82.000 keluarga miskin yang memiliki anak-anak berusia 7-18 tahun, hanya 1% persen lebih putus sekolah tetapi 3 dari 4 anak yang masih terdaftar mengalami setidaknya satu faktor risiko yang mendorong mereka untuk putus sekolah dalam jangka pendek. Sebagai contoh, lebih dari 50% anak-anak usia sekolah melakukan pekerjaan tambahan yang tidak dibayar untuk membantu keluarga mereka. Gender dan status disabilitas anak-anak begitu penting. Anak perempuan 10 kali lebih berisiko putus sekolah daripada anak laki-laki sebagian karena peningkatan kasus pernikahan dini. Karena pandemi COVID-19 telah membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan fasilitas pembelajaran yang memadai sesuai dengan kebutuhan mereka, anak-anak dan remaja penyandang disabilitas menghadapi risiko putus sekolah tiga kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang tanpa disabilitas.

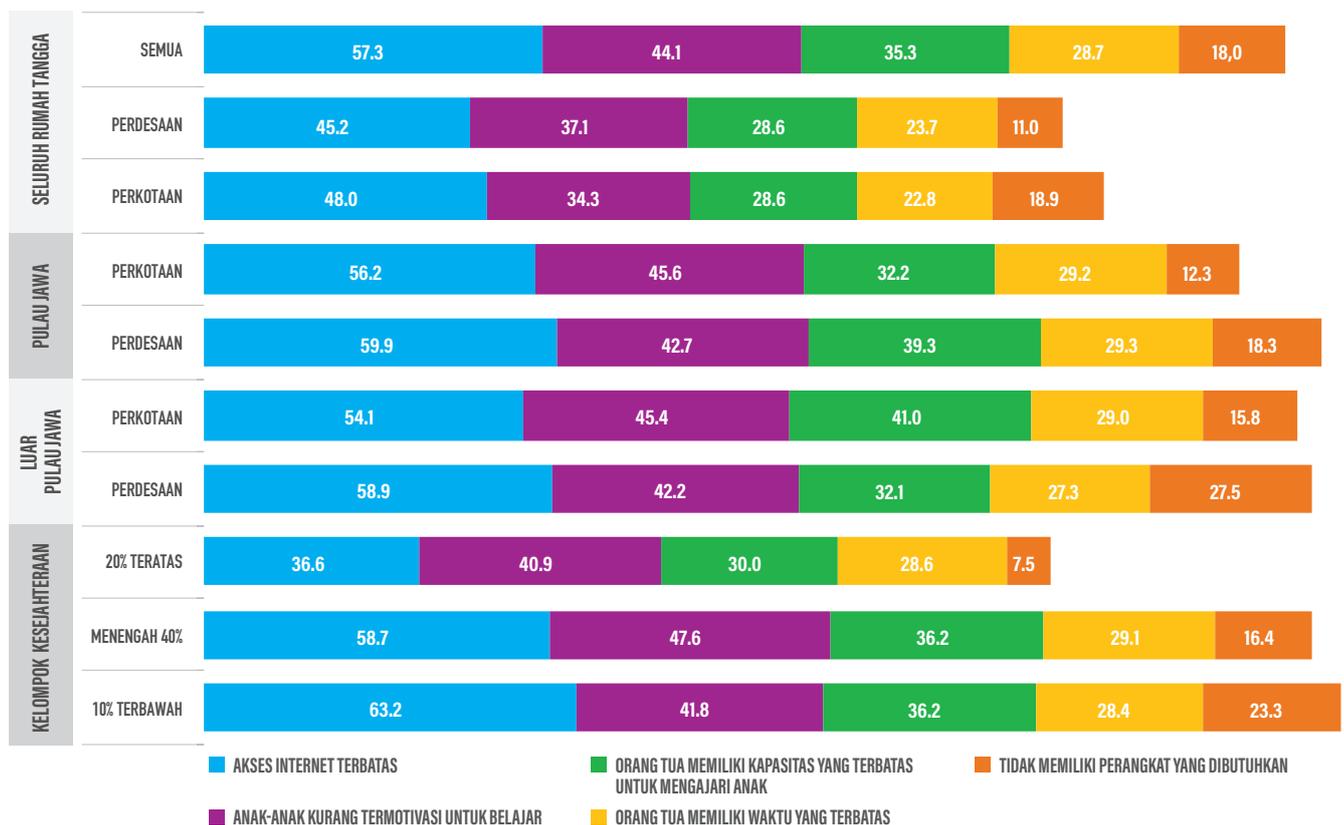
Hasil survei menunjukkan bahwa sulitnya mendapatkan akses internet yang stabil merupakan kendala utama dalam belajar. Proporsi rumah tangga dengan anak-anak jauh lebih tinggi (65%) membelanjakan lebih banyak pulsa telepon/paket internet dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak memiliki anak (28,9%). Perbedaan pengeluaran ini mungkin disebabkan oleh pengeluaran tambahan untuk pembelajaran daring. Namun 57,3% melaporkan bahwa mereka tidak memiliki akses internet yang memadai. Bahkan di antara 20% kelompok konsumsi rumah tangga teratas yang memiliki anak, 36,6% di antaranya mengatakan bahwa akses internet mereka terbatas. Banyak juga rumah tangga yang tidak memiliki peranti elektronik yang memadai (18%) atau harus menggunakannya secara bergantian (15,8%).

Rumah tangga perdesaan dan miskin lebih sulit mendapatkan akses internet dan peranti elektronik daripada rumah tangga perkotaan dan lebih kaya. Sekitar 23% dari 40% rumah tangga terbawah tidak memiliki peranti elektronik, sedangkan untuk 20% rumah tangga teratas hanya 8%. Artinya, kesenjangan cukup signifikan.

12. Pemantauan dilakukan di 1.151 desa di 354 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia (2021a pada 2021).



Gambar 14. Kendala belajar dari rumah berdasarkan kelompok (%)*



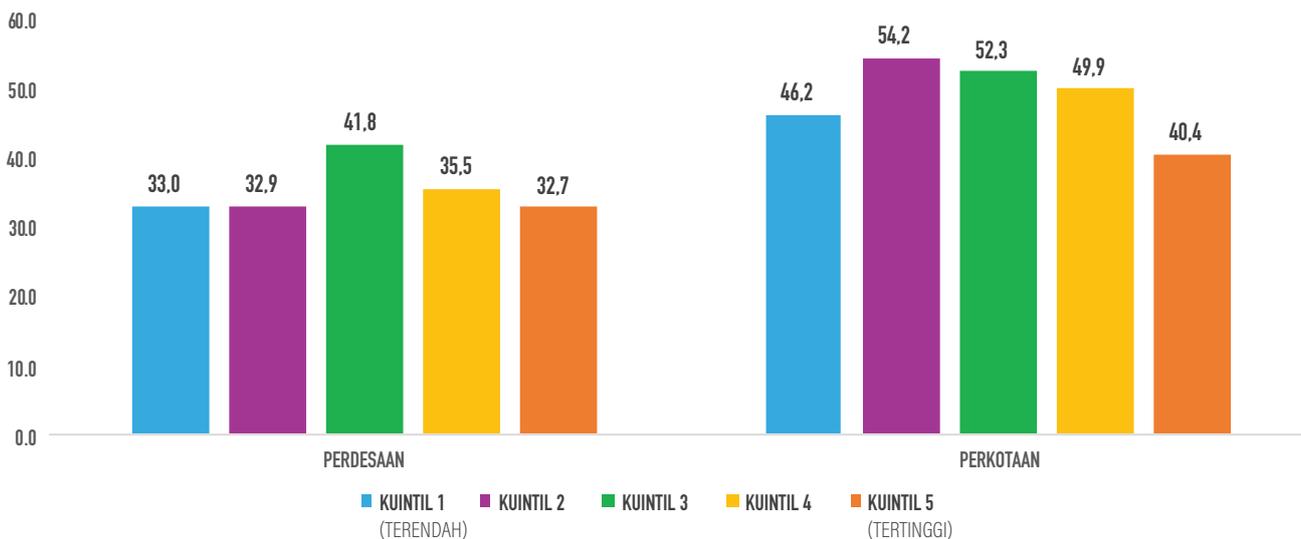
Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

*Catatan: Pertanyaan yang diikuti beberapa jawaban. Persentase dihitung berdasarkan jumlah kelompok rumah tangga dengan anak-anak yang masih bersekolah.

Hasil survei menunjukkan bahwa bantuan kuota internet yang diberikan kepada siswa dan guru cukup membantu tetapi belum cukup untuk mengatasi semua kendala. Rumah tangga dengan anak-anak dari seluruh distribusi kekayaan, dari yang terkaya hingga termiskin, telah merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Akan tetapi, anak-anak perkotaan lebih

merasakan manfaat bantuan dibandingkan anak-anak perdesaan dan tampak adanya kesenjangan dalam Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) serta infrastruktur. Persentase yang lebih tinggi juga tercatat dari kelompok berpenghasilan menengah sehingga terlihat kesenjangan akses peranti di antara rumah tangga yang lebih miskin.

Gambar 15. Proporsi paket internet penerima manfaat di antara rumah tangga dengan anak usia sekolah



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

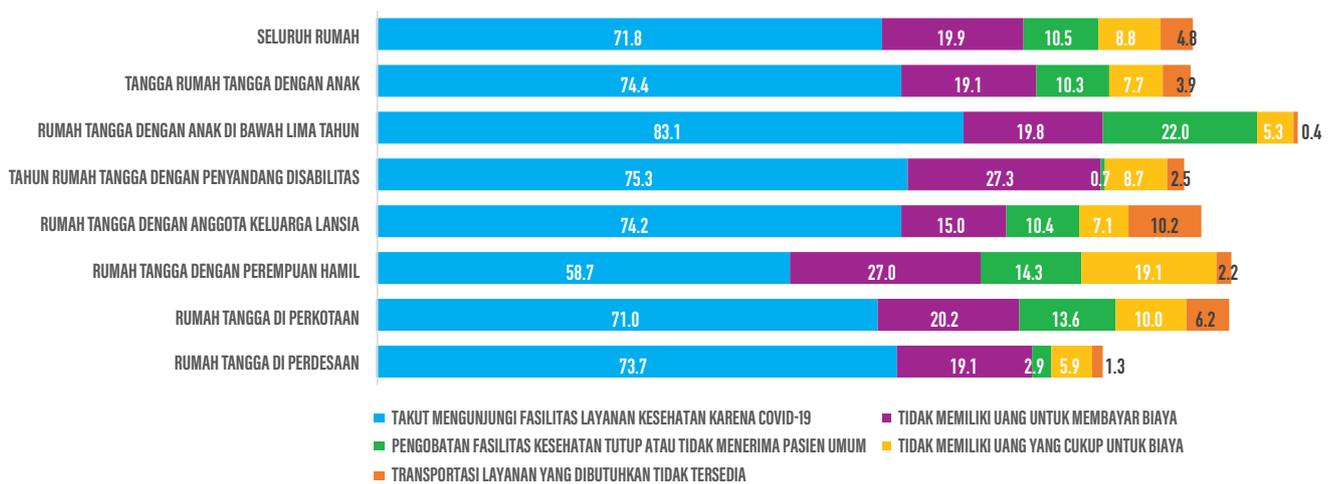
Banyak orang tua melaporkan bahwa mereka tidak memiliki waktu yang cukup (28,7%) dan/atau tidak berkapasitas (25,3%) untuk mendukung anak-anak mereka mengikuti pembelajaran dari rumah. Peralihan pembelajaran sekolah ke rumah mengubah rutinitas dan aktivitas di rumah tidak hanya mengubah rutinitas dan ekspektasi di rumah, tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk pengasuh mereka. Sebanyak 71,5% ibu mau tidak mau menjalankan tanggung jawab baru ini di samping menjalankan tanggung jawab mereka sendiri. Ada juga anak-anak penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan khusus untuk memudahkan mereka belajar tetapi sayangnya tidak bisa dilakukan oleh orang tua mereka di rumah.

Proporsi rumah tangga yang mengakses fasilitas kesehatan untuk ibu dan anak menurun sebesar 7% dan hampir 10% di antara penduduk perkotaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase rumah tangga total (43,4%) yang mengunjungi fasilitas kesehatan untuk imunisasi, pelayanan KB, dan pelayanan kehamilan, persalinan, dan nifas dibandingkan pada 2019 (saat itu sekitar 50%). Persentase rumah tangga di perkotaan (39,3%) yang mengunjungi pusat layanan kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga di perdesaan (48,7%). Sebelum pandemi, 52% rumah tangga perkotaan dan 49% rumah tangga perdesaan mengunjungi pusat kesehatan. Hasil ini mungkin mencerminkan tekanan pada sistem kesehatan karena sumber daya diprioritaskan untuk menangani pandemi dan/atau terganggu oleh pembatasan sosial. Menurut data pemantauan internal UNICEF, setelah pandemi

melanda, setidaknya 3.000 dari 10.000 pos pelayanan terpadu (posyandu) mengurangi jam operasional atau menghentikan aktivitasnya. Posyandu melayani imunisasi, menyediakan obat-obatan dan vitamin A, serta memantau pertumbuhan fisik.



Gambar 16. Alasan tidak mengunjungi fasilitas layanan kesehatan berdasarkan kelompok (%)



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

*Catatan: Pertanyaan jawaban ganda, persentasenya dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang layanan kesehatannya tidak terpenuhi di kelompok masing-masing: 3,8% dari jumlah total rumah tangga dan 3,8% rumah tangga yang memiliki anak.

Sejak April 2020, hanya 1 dari 4 (27,3%) rumah tangga dengan anak balita melakukan imunisasi. Sebanyak 13,1% mengatakan mereka sadar bahwa anak mereka membutuhkan imunisasi tetapi mereka tidak dapat/tidak mengaksesnya. Sementara itu, 36,7% rumah tangga yang memiliki anak penyandang disabilitas menyatakan bahwa mereka belum dapat mengakses terapi dan layanan kesehatan lainnya. World Health Organization (2020) memperingatkan bahwa anak-anak yang tidak mendapatkan vaksin berisiko terkena penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Dalam jangka panjang, risiko ini dapat memunculkan wabah dan/atau meningkatkan morbiditas dan mortalitas anak.

Ketakutan tertular COVID-19 (74,4%) dan kurangnya uang (19,1%) merupakan alasan utama mengapa makin sedikit rumah tangga dengan anak yang mengakses fasilitas kesehatan. Lebih dari seperempat (27%) rumah tangga dengan perempuan hamil mengatakan bahwa mereka tidak mengunjungi fasilitas layanan kesehatan selama pandemi. Rumah tangga dengan anak balita dan wajib melakukan imunisasi menunjukkan tingkat kekhawatiran atau ketakutan tertinggi untuk tertular virus karena kunjungan fasilitas kesehatan (83,1%). Kotak Informasi 7 menggambarkan alasan mengapa orang memilih untuk tidak mengakses fasilitas kesehatan publik dan/atau mengeluarkan biaya tambahan untuk berobat ke rumah sakit swasta.

KOTAK 7

Kekhawatiran mengakses fasilitas kesehatan masyarakat selama pandemi

Bapak Rendi, warga Kota Padang, biasa membawa anaknya yang berusia 18 bulan untuk imunisasi rutin di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat. Namun, puskesmas tersebut ditutup selama dua bulan saat awal pandemi. Meski sudah dibuka kembali, ia tidak mau membawa anaknya ke sana karena dinilai sebagai tempat yang berisiko tinggi untuk penularan COVID-19. Sebaliknya, dia memilih untuk menjaga dan merawat anaknya di rumah dengan caranya sendiri. Bapak Rendi ingin melanjutkan imunisasi, tetapi setelah pandemi berakhir. Beliau berkata: “tidak ada imunisasi untuk anak saya, saya takut COVID-19”.

“Walaupun puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggal saya sekarang sudah dibuka kembali, saya belum ke sana karena takut tertular COVID-19. Saya malah memilih untuk mengimunisasi anak saya di praktik bidan swasta dengan biaya Rp100.000 (US\$ 6,9) per imunisasi. Saya merasa praktik bidan swasta lebih aman daripada puskesmas karena dia mengenakan alat perlindungan diri dan tidak tidak mengizinkan terlalu banyak orang untuk masuk sekaligus. Biaya tersebut terbilang besar bagi saya, tetapi saya harus menanggungnya demi anak dan diri saya sendiri”.

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Dwi, ibu rumah tangga, Kabupaten Tabanan, daerah perdesaan, 14 Desember 2020).

Penutupan sekolah, isolasi sosial serta ketidakpastian ekonomi juga membuat anak-anak menghadapi risiko lain, termasuk kesehatan mental. Survei ini menemukan bahwa 45% rumah tangga melaporkan berbagai masalah perilaku pada anak-anak mereka. Sebanyak 20,5% mengatakan anak-anak mereka lebih sulit berkonsentrasi; 12,9% menjadi lebih sering marah atau memberontak; 7% menjadi lebih sering sedih atau murung; 6,5% sulit tidur. Sekitar 7,15% rumah tangga dilaporkan memiliki setidaknya satu anak yang bekerja. Dari angka tersebut, 2,5% sudah mulai bekerja sejak pandemi (April 2020).

2. 4 Perempuan memikul tanggung jawab perawatan tambahan

Penutupan sekolah selama setahun terakhir menambah beban waktu bagi perempuan. Di 71,5% rumah tangga, ibu adalah pengasuh utama yang mendampingi anak-anak mereka dalam pembelajaran jarak jauh, sedangkan persentase ayah hanya 23,4%. Separuh dari perempuan ini juga bekerja untuk mendukung keluarga. Mereka berupaya keras menyeimbangkan pekerjaan dan tanggung jawab tambahan yang timbul akibat penutupan sekolah. Situasi yang lebih sulit dihadapi oleh 62,3% ibu yang berpendidikan akhir sekolah menengah pertama atau lebih rendah. Mereka kurang menyadari hal apa saja yang diperlukan anak-anak agar dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan efektif.

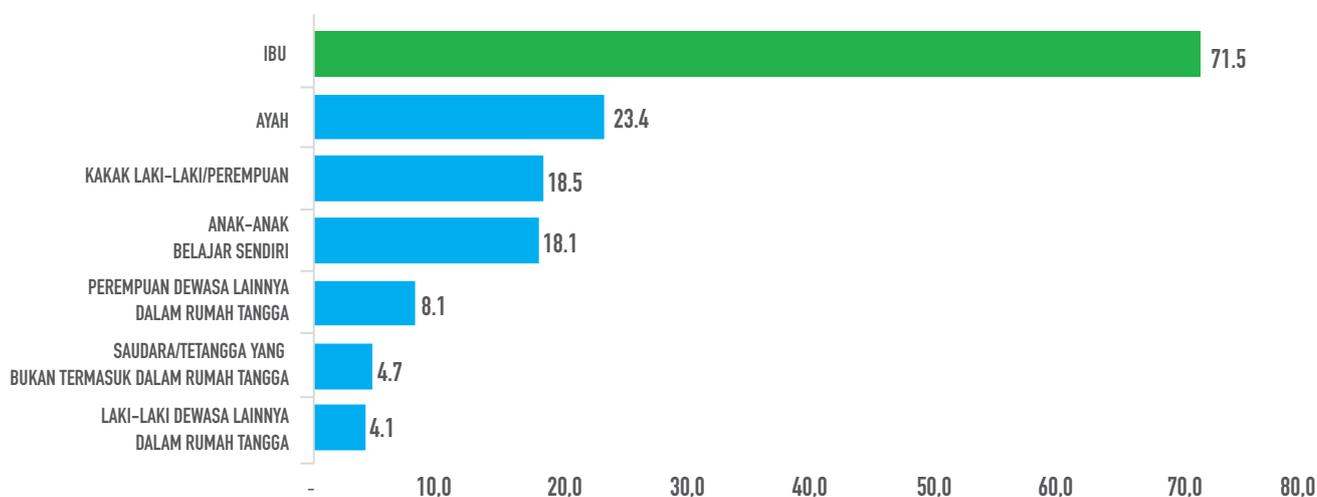
Kutipan wawancara berikut menggambarkan tantangan yang dihadapi seorang ibu dengan anak-anak usia dini:

“Tiap pagi saya merasa kewalahan. Saya harus memasak untuk keluarga, memandikan si kecil, mengepel, menyapu, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Kemudian, saya juga harus membantu anak saya yang lebih besar untuk belajar daring sambil menggendong si kecil.”

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Dwi, ibu rumah tangga, Kabupaten Tabanan, pinggir kota, 14 Desember 2020).

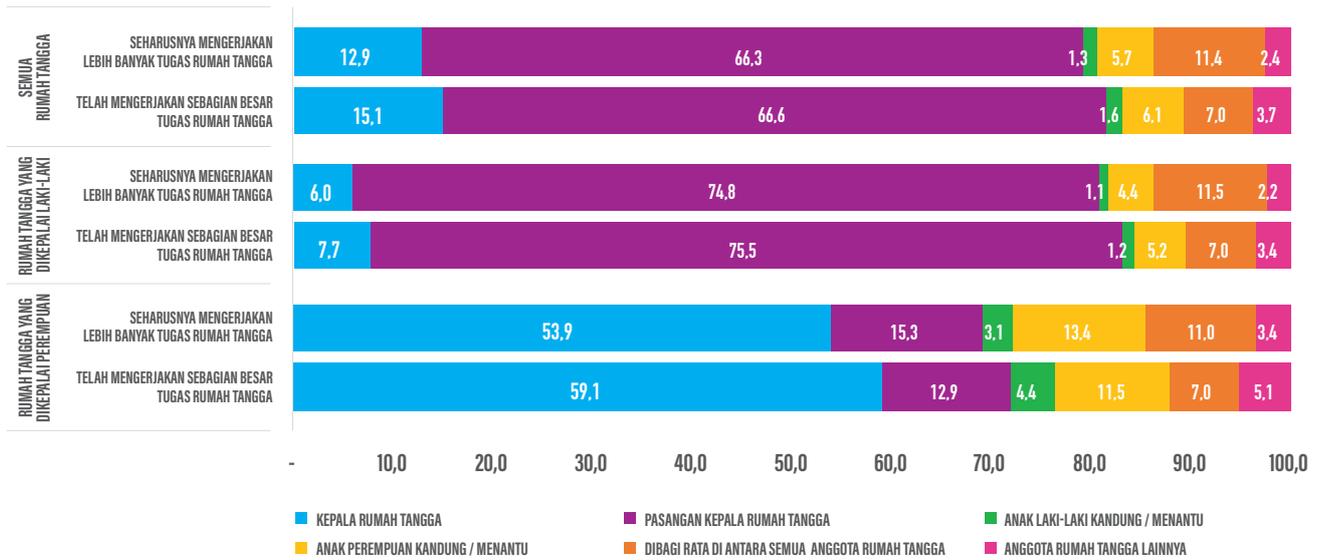
Reaksi ini dapat dimaklumi mengingat tugas rumah tangga umumnya dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, dan perempuan melakukan sebagian besar dari tugas tersebut utamanya di rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (lihat Gambar 18 di halaman selanjutnya). 51,9% rumah tangga yang dikepalai perempuan mengaku melakukan pekerjaan rumah tangga sementara di rumah tangga yang dikepalai laki-laki, 75,5% istri (atau, perempuan) mengaku menyelesaikan pekerjaan rumah lebih banyak dibandingkan suami mereka. Perbandingan antara rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan perempuan ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam pembagian pekerjaan rumah tangga tak berbayar berdasarkan gender kepala rumah tangga. Lebih jauh, hanya 11,4% dari jumlah total rumah tangga beranggapan bahwa tugas rumah harus dibagi secara merata.

Gambar 17. Pengasuh utama yang mendukung anak dalam pembelajaran jarak jauh (%)



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

Gambar 18. Pihak yang seharusnya mengerjakan lebih banyak tugas rumah tangga dan pihak yang telah mengerjakan sebagian besar tugas rumah tangga (%)*



Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

*Catatan: Pertanyaan dengan jawaban tunggal, persentasenya didasarkan atas jumlah rumah tangga di tiap kelompok.

8,6% rumah tangga mengalami konflik di rumah sejak April 2020 akibat menurunnya pendapatan, berkurangnya kesempatan untuk melakukan kontak sosial, dan meningkatnya beban karena penutupan sekolah yang berkepanjangan. 37,5% di antaranya lebih sering mengalami konflik dengan pasangan dan 23,5% dengan anak-anak mereka. 39,4% rumah tangga yang dikepalai laki-laki melaporkan lebih sering mengalami konflik dengan pasangan. Sementara itu, 36,1% rumah tangga yang dikepalai perempuan mengaku lebih sering mengalami konflik dengan anak.

“Sejak pandemi, saya dan suami lebih sering bertengkar dibandingkan sebelum pandemi. Suami merasa makanan yang saya sajikan itu-itu saja, dan ia bosan makan menu yang sama. Tapi saya tak punya cukup uang untuk membeli makanan yang ia sukai”

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Yohana, ibu rumah tangga & pedagang paruh waktu, Flores Timur, perdesaan, 4 Desember 2020).

“Suami saya jarang membantu anak kami belajar karena ia bekerja dan pulang malam. Saya yang memastikan anak disiplin dan semangat belajar. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan rumah, saya mengizinkan anak saya bermain. Tapi suami saya malah memanjakan anak kami dan tidak mendukung keputusan saya”

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Meri, ibu rumah tangga, Bone, perdesaan, 11 November 2020).

Tantangan-tantangan itu menjadikan sekitar 1 dari 5 (19,7%) kepala rumah tangga perempuan tidak bahagia, stres, dan bahkan tertekan, jika dibandingkan dengan 16,8% rumah tangga yang dikepalai laki-laki. Sebagian besar (60,6%) kepala rumah tangga perempuan menyatakan pemicu utama mereka menjadi emosional adalah ‘masalah keuangan dan pekerjaan’, kekhawatiran terhadap penularan COVID-19 (49%), dan masalah perkembangan serta pendidikan anak-anak mereka (10%). Mendampingi anak belajar tak hanya memakan waktu tetapi juga membutuhkan kemampuan mengajar materi dan tugas sekolah. Sekalipun kecemasan meningkat, pemanfaatan dukungan formal minim. Hampir empat dari lima (79,4%) rumah tangga melaporkan mengalami kecemasan dan mencari dukungan moral atau nasihat dari keluarga atau kerabat, sementara hanya sebagian kecil responden mencari dukungan dari tenaga medis, seperti petugas kesehatan/dokter (4,5%) dan psikolog atau psikiater (0,5%).

2. 5 Kerawanan pangan pada kelompok rentan meningkat

Selama setahun terakhir, proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan meningkat. Hampir sepertiga (30%) responden khawatir tidak bisa memberi makan keluarga mereka.

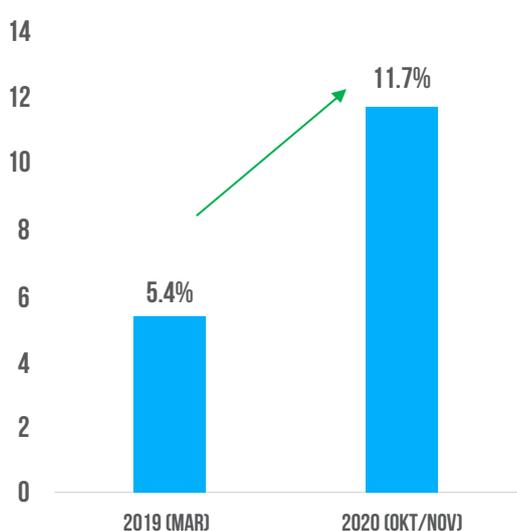
Proporsi keluarga yang menghadapi kerawanan pangan ‘sedang atau parah’ meningkat dua kali lipat: 11,7% rumah tangga mengalami kerawanan pangan tingkat ‘sedang’ (seperti mengurangi kualitas makanan mereka

atau makan makanan yang kurang sehat atau kurang beragam) atau kerawanan pangan 'parah' (seperti tidak makan sehari-hari) sejak April 2020. Realitas ini berbeda jauh jika dibandingkan dengan persentase tahun 2019 yang hanya 5,4% (berdasarkan perhitungan FIES BPS). Rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas paling berisiko mengalami kerawanan pangan (15%), disusul oleh rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (14%), dan yang memiliki anak (12,6%). Dari aspek lokasi, kerawanan pangan paling banyak terjadi di daerah perkotaan dan di Indonesia bagian timur.

Rumah tangga hingga kelas menengah lebih banyak mengalami kerawanan pangan sedang atau parah.

15,7% rumah tangga di kuintil 2 dan 13,5% rumah tangga di kuintil 3 melaporkan kerawanan pangan 'sedang atau parah', dibandingkan dengan 11,7% rumah tangga termiskin. Realitas ini dikonfirmasi oleh hasil regresi (Lampiran VII) yang menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara kedua kelompok tersebut dan prevalensi kerawanan pangan 'sedang atau parah'.

Gambar 19. Proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan 'sedang atau parah'



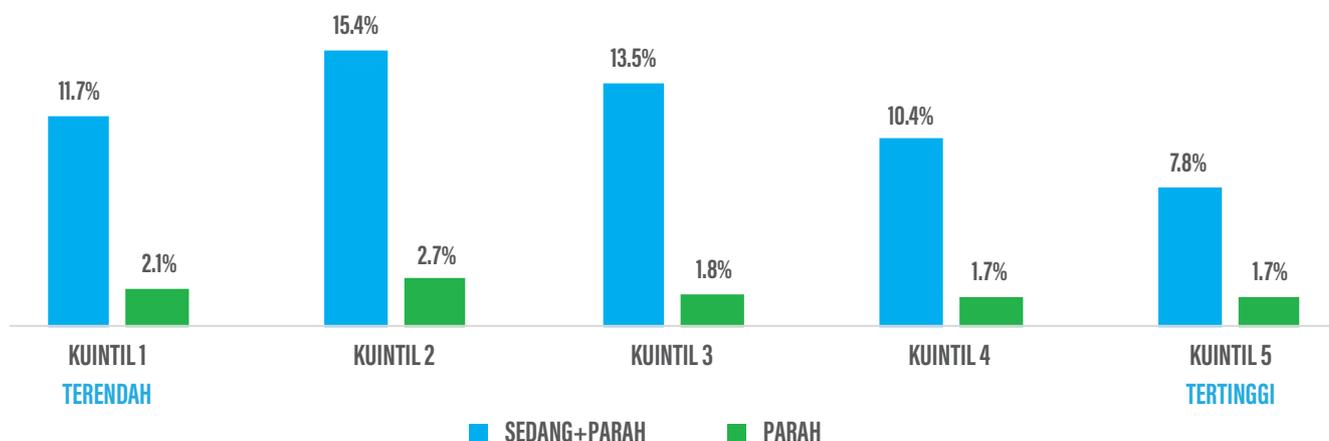
MODUL SURVEI SKALA PENGALAMAN KERAWANAN PANGAN (FIES) (FAO)

Q#	INDIKATOR FIES	Kategori
1	CEMAS	RINGAN
2	TIDAK SEHAT	
3	MAKAN LEBIH SEDIKIT	
4	TIDAK MAKAN	SEDANG
5	MAKAN SEDIKIT	
6	TAK PUNYA MAKANAN	PARAH
7	LAPAR	
8	TIDAK MAKAN SEHARIAN	

Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

*Catatan: Ini merupakan perkiraan kasar berdasarkan hasil survei. Ada perbedaan metodologis dengan perkiraan BPS 2019. Pada Susenas bulan Maret tahun 2019, kerangka waktu yang digunakan adalah "12 bulan terakhir" sedangkan pada survei tahun 2020, kerangka waktu yang digunakan adalah bulan April hingga bulan Oktober/November 2020.

Gambar 20. Proporsi rumah tangga yang menghadapi kerawanan pangan 'sedang atau parah'



Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

*Catatan: berdasarkan kuintil

Berkurangnya pendapatan dan terganggunya sistem distribusi pangan adalah faktor utama penyebab kerawanan pangan. Berkurangnya pendapatan membuat rumah tangga mengurangi dan/atau mengubah anggaran untuk makan, dan rumah tangga yang mengalami kondisi paling kurang beruntung lebih mungkin mengurangi pengeluaran untuk makan. Meskipun ada lebih banyak rumah tangga yang memilih untuk mengurangi pengeluaran selain untuk makan (26,4%), 18% rumah tangga harus mengurangi pengeluaran untuk makan sebagai strategi untuk mengatasi kondisi sulit.

Berkurangnya persediaan pangan kemungkinan merupakan faktor penyebabnya. Salah satu faktor yang menunjukkan korelasi positif dan signifikan dengan kerawanan pangan adalah penurunan mobilitas, sebagaimana yang diukur berdasarkan data mobilitas Google. Data ini menunjukkan bahwa kerawanan pangan meningkat seiring makin terbatasnya mobilitas akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kedua, prevalensi kerawanan pangan lebih sering terjadi di Indonesia bagian timur dan lebih sedikit terjadi di Jawa dan Bali karena provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur sangat bergantung pada pasokan pangan dari pulau-pulau lain. [Lihat Lampiran VII untuk informasi lebih lanjut mengenai hasil regresi]. Penelitian gabungan yang dilakukan oleh Program Pangan Dunia (WFP) dan Pemerintah Indonesia mengonfirmasi bahwa tantangan yang ada terkait penyelenggaraan rantai pasok untuk

makanan bergizi tetapi mudah rusak diperparah oleh pembatasan mobilitas yang bertujuan untuk membatasi penyebaran virus (WFP, 2020).

Proporsi rumah tangga yang memiliki anak menghadapi kerawanan pangan 'sedang hingga parah' (12,6%) lebih tinggi dibandingkan populasi pada umumnya (11,7%). Jatuh miskinnya rumah tangga dan anak-anak yang terjadi dengan cepat mungkin berdampak signifikan pada ketahanan pangan akibat terbatasnya aksesibilitas, ketersediaan, dan keterjangkauan harga bahan-bahan pangan sehat. Kondisi ini dapat menyebabkan lonjakan kasus wasting dan berkurangnya nutrisi mikro pada anak-anak. Anak-anak yang menderita kurang gizi dan wasting berisiko mengalami masalah perkembangan sepanjang hidup mereka dan/atau kematian dini. Sebelum pandemi, lebih dari 7 juta anak di bawah lima tahun diperkirakan mengalami stunting yang menempatkan Indonesia di urutan kelima di dunia untuk kasus anak stunting. Lebih dari 2 juta anak di bawah lima tahun menderita wasting parah (berat badan lebih rendah dari semestinya untuk tinggi badan) (UNICEF, 2020b). Sebelum pandemi, Indonesia sudah mulai mengurangi stunting secara konsisten dan hasilnya turun dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 27,7% pada tahun 2019 (lihat: dashboard.setnas-stunting.id). Bantuan tunai bersyarat secara kumulatif telah berhasil membantu menurunkan kasus tersebut (Cahyadi et al., 2020). Namun, kondisi-kondisi ini bisa jadi mengalami kemunduran.



“Rasa lapar tidak akan membunuh kita, bertahanlah”

Ibu Bunga memiliki seorang putra berusia dua tahun yang mengalami penurunan berat badan karena keluarganya harus mengurangi pengeluaran makan demi menghadapi hilangnya pendapatan selama pandemi. Pada bulan September 2020, setelah beberapa bulan menyesuaikan keuangan keluarga dan mengurangi pengeluaran untuk makan, putra Ibu Bunga diidentifikasi ‘berisiko menderita stunting’ oleh petugas kesehatan pos pelayanan terpadu (posyandu) setempat. Berat badannya jauh lebih rendah dari yang semestinya untuk anak-anak seusianya.

“Sebelum pandemi, ia biasa minum susu formula. Namun, sekarang kami hanya bisa memberinya susu kental manis. Saya tahu susu kental manis mengandung banyak gula. Ia sering mengeluh sakit gigi. Saya merasa sedih, tetapi saya tidak punya pilihan lain”

(Ibu Nisa, ibu seorang anak bawah tiga tahun, Serang, 10 Desember 2020).

Survei menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas yang mengalami kehilangan pendapatan (76,5%) sama dengan populasi pada umumnya. Namun, mereka kurang mampu jika dibandingkan dengan populasi umum yang disurvei karena persentase penyandang disabilitas yang mencari nafkah (89% dibandingkan dengan 91%) sedikit lebih rendah; separuh (50,6%) dari rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas tidak memiliki tabungan. Menurut survei, hanya 11,1% rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas yang mengaku bahwa kebutuhan mereka telah terpenuhi—berbeda dengan rata-rata nasional yakni sebesar 15%. 15% rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas menyatakan mengalami kerawanan pangan ‘sedang atau parah’ sejak bulan April 2020, lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni sebesar 11,7%. Temuan ini sejalan dengan sejumlah survei lain yang meneliti dampak ekonomi akibat pandemi yang dialami penyandang disabilitas (mis. survei Mahkota dan KOMPAK, 2020; J-PAL, 2020).

Dampaknya bervariasi sesuai dengan tingkat disabilitas (ringan, sedang, atau berat) dan ada lebih banyak penyandang disabilitas ‘ringan’ yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan dibandingkan dengan yang menyandang disabilitas sedang atau berat. Survei tersebut menemukan bahwa satu dari 10 (9,12%) rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas ringan

Keluarga Ibu Anita mengalami krisis pangan parah sejak pandemi sampai-sampai mereka harus terus-menerus tidak makan. Putri Ibu Anita yang berusia 12 tahun sering mengeluh kelaparan dan tidak bisa berkonsentrasi saat belajar di rumah. Ibu Anita berupaya mengatasi kondisi tersebut dengan menjanjikan makanan sebagai imbalan untuk tugas yang dapat putrinya selesaikan. Meski demikian, ia tak selalu bisa menepati janjinya. Ibu Anita menuturkan caranya menghibur putrinya:

“Kamu bukan anak kecil lagi; usiamu hampir 12 tahun. Kelaparan tidak akan membunuh kita, bertahanlah.”

(Ibu Anita, rumah tangga dikepala perempuan, Jakarta Utara, 2 Desember 2020).

kehilangan pekerjaan karena COVID-19 (antara 5–6 persen lebih tinggi dibandingkan penyandang disabilitas sedang atau berat) dan lebih dari delapan dari 10 (83,7%) di antaranya mengalami penurunan pendapatan sejak awal pandemi. Persentase penyandang disabilitas yang kehilangan pekerjaan 10% lebih tinggi daripada yang menyandang disabilitas sedang (70%) atau berat (66,5%). Hal ini mengkhawatirkan karena, pada tahun 2019, rumah tangga dengan penyandang disabilitas ‘ringan’ lebih produktif sehingga tingkat partisipasi kerjanya lebih tinggi dan secara ekonomi lebih baik dibandingkan rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas berat (analisis Prospera, disajikan untuk Badan Kebijakan Fiskal, Desember 2020).

Rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas mengatakan bahwa masalah paling signifikan yang dialami sebagai akibat dari COVID-19 adalah terkait akses ke layanan kesehatan (14,5%) dan disusul oleh kegiatan sehari-hari (13,18%). Penyandang disabilitas ringan merasa bahwa kegiatan sehari-hari mereka terganggu, sedangkan penyandang disabilitas sedang dan berat kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. 60% dari seluruh rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas mengaku tidak mengalami perubahan apa pun akibat COVID-19. Situasi ini terjadi karena mereka tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun.

Anak-anak yang membutuhkan tidak mendapatkan terapi

Ibu Kasih memiliki seorang anak yang membutuhkan terapi fisik rutin untuk kakinya dan vitamin untuk memperkuat tulangnya seiring pertumbuhannya. Sebelum pandemi COVID-19, Ibu Kasih memastikan anaknya menjalani terapi fisik bulanan menggunakan 'Kartu Indonesia Sehat'. Tetapi sejak awal pandemi, ia harus menghentikan terapi karena ia tak lagi memiliki cukup uang. Ia juga khawatir putranya akan tertular virus jika menjalani terapi secara langsung.

Sepasang sepatu khusus yang ia pakai juga sudah rusak. Ibu Kasih telah berencana untuk menggantinya lima bulan yang lalu, tetapi ia harus menunda rencananya karena tidak memiliki cukup uang. Hal ini memengaruhi mobilitas anaknya. Ia sering mengeluh sakit dan tidak bisa berjalan lama.

(Wawancara mendalam, narasumber: Ibu Kasih, ibu rumah tangga, Kulon Progo, perdesaan, 18 Desember)

Rumah tangga yang dikepalai perempuan (56,7%) tidak memiliki tabungan untuk meredam dampak pandemi, berbeda dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki (50,6%). Rumah tangga yang dikepalai perempuan mengalami kondisi yang relatif lebih buruk daripada rumah tangga yang dikepalai laki-laki berdasarkan beberapa indikator yang digunakan di survei ini untuk menilai dampak ekonomi akibat COVID-19. Rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki lebih sedikit pencari nafkah (89,8%) dalam seminggu terakhir dibandingkan populasi pada umumnya (91,2%). Proporsi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan (86,3%) mengaku kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki (84,4%). Hasil survei juga menunjukkan bahwa 14% rumah tangga yang dikepalai perempuan menghadapi kerawanan pangan 'sedang hingga parah'—lebih tinggi jika dibandingkan dengan 11,4% rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.

Hampir 20% dari semua rumah tangga yang diwawancarai dengan perempuan sebagai pencari nafkah utama, ada lebih banyak perempuan yang kehilangan pendapatan (75,1%) dibandingkan dengan rumah tangga dengan pencari nafkah laki-laki (74,2%). Kondisi ini dikarenakan perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal (60%) dibandingkan laki-laki (56%). Pencari nafkah laki-laki dan perempuan yang bekerja sebagai karyawan atau pekerja kontrak sama-sama mengalami tingkat kehilangan pekerjaan yang hampir sama akibat pandemi (7%).

Hasil ini membenarkan analisis global baru yang dilakukan oleh UN Women dan Women Count (2020) yang memperkirakan bahwa 435 juta perempuan dan anak perempuan akan hidup dengan jumlah uang kurang dari US\$ 1,90 per hari. Perhitungan ini mencakup 47 juta orang yang diperkirakan akan jatuh miskin.



3. Rekomendasi Kebijakan Strategis

3.1 Dukong anak-anak dengan lebih baik

Pastikan anak-anak terus belajar. Mengingat parahnya kehilangan kesempatan untuk belajar yang dialami oleh anak-anak (lihat Bagian 2.2), dukong sekolah memulai kembali pembelajaran secara bertahap dan dengan aman (lewat infrastruktur dan keterampilan) serta menawarkan pembelajaran dengan metode campuran. Akses ke internet dan perangkat masih menjadi tantangan para guru dan siswa, sehingga melanjutkan suplemen internet untuk mereka serta meningkatkan solusi tanpa teknologi dan teknologi rendah untuk pembelajaran di rumah akan sangat membantu anak-anak. Pertimbangkan untuk meluncurkan “program peningkatan keterampilan” demi memulihkan kesempatan belajar bagi anak-anak, terutama di tahun-tahun awal dan untuk anak penyandang disabilitas, serta lengkapi program dengan kampanye sosialisasi massal agar anak-anak kembali ke sekolah dan menyelesaikan studi.

Tawarkan solusi perlindungan sosial untuk mendukung rumah tangga memenuhi kebutuhan dan menjalankan pengasuhan anak. Upaya ini termasuk mempertahankan peningkatan cakupan dan nilai transfer program bantuan sosial selama pandemi, seperti PKH dan BLT-DD. Hal ini dilakukan demi terjangkaunya semua anak yang tinggal di rumah tangga yang terdampak. Langkah lainnya yaitu melonggarkan sementara persyaratan dalam PKH selama pandemi, seperti kehadiran di sekolah dan kunjungan ke fasilitas kesehatan serta mempercepat integrasi program PKH-PIP untuk membantu anak-anak dari latar belakang keluarga miskin dan rentan untuk terus belajar. Terakhir, meresmikan hubungan antara penerima bantuan tunai dan program pelengkap, seperti Kartu Sembako untuk memastikan rumah tangga dengan anak-anak dapat memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Pilihan lain dapat berupa peluncuran tunjangan khusus anak (atau UCB) yang universal dan tanpa syarat, sebagai solusi sementara untuk mengurangi dampak langsung dan terburuk dari krisis. Hasil survei menjelaskan dampak krisis yang meluas dan belum pernah terjadi

sebelumnya. Bahkan rumah tangga dengan anak-anak yang sebelumnya aman secara ekonomi dan tinggal di daerah perkotaan, kini mengalami penurunan pendapatan yang signifikan dan berada pada risiko kerawanan pangan yang lebih tinggi. Dampak sosial akan jauh lebih buruk jika bukan karena bantuan pemerintah, banyak rumah tangga yang membutuhkan tidak menerima bantuan tunai. UCB adalah transfer tunai atau pajak yang dibayarkan kepada rumah tangga dengan anak-anak. Detail desain tunjangan khusus anak dan sistem transfer pajak yang lebih luas tempat mereka beroperasi, menggabungkan berbagai tingkat universalisme dan selektivitas yang memengaruhi cara kerja manfaat dalam praktik dan dampaknya (lihat: UNICEF & ODI, 2020).

Beberapa negara di kawasan Asia Pasifik telah menyertakan tunjangan khusus anak sebagai bagian dari paket dukungan mereka yang lebih luas dalam merespons pandemi. Misalnya, Thailand menyediakan dana darurat bulanan sebesar 1.000 Bath Thailand (US\$ 32) sebagai tambahan dari Hibah Dukungan Anak yang ada (diluncurkan pada tahun 2015 untuk anak di bawah 6 tahun) antara Mei dan Juli 2020 (UNICEF, 2020d). Pemerintah Bhutan telah menggelontorkan jumlah manfaat 12.000 Ngultrum Bhutan (US\$ 165,7) per orang dan per bulannya, serta manfaat bulanan tambahan sebesar 800 Ngultrum Bhutan (US\$ 11) per anak diberikan kepada penerima manfaat dengan anak-anak (UNICEF & IPC-IG, 2020). Setelah pandemi melanda, Mongolia meningkatkan dana tunjangan anak (The Child Money Programme) sebesar 400% dari 1 April hingga 1 Oktober 2020 (dari 20.000 tugrik Mongolia atau US\$ 7 menjadi 100.000 tugrik Mongolia atau US\$ 35). Skema ini telah menjangkau 1,1 juta anak.

Menjaga anak tetap sehat dan mendapatkan gizi.

Memprioritaskan kelanjutan pemberian vaksin dan obat-obatan untuk melindungi anak-anak dari penyakit dan bekerja sama dengan jaringan logistik dalam mengatasi segala hambatan untuk mempermudah pengiriman pasokan (Lihat Bagian 2.2). Dalam konteks meningkatkan kerawanan pangan (lihat Bagian 2.4), meminimalkan gangguan terhadap layanan gizi dan program masyarakat

untuk deteksi dini serta pengobatan anak telantar juga penting untuk kesehatan anak secara keseluruhan. Kampanye massal untuk mempromosikan diet sehat dan memperkuat sistem kekebalan dapat dipertimbangkan dengan peluncuran program ‘peningkatan kesehatan’ pada 2021/22 dengan klinik keliling untuk mengembalikan imunisasi yang terlewat, suplemen nutrisi, keluarga berencana, dan kesehatan mental.

Lindungi anak dari kekerasan, pelecehan, dan stres

dengan memasukkan layanan kesehatan mental untuk orang tua dan anak sebagai bagian dari respons kesehatan masyarakat terhadap krisis COVID-19 (Lihat bagian 2.2). Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam upaya ini, sehingga mereka perlu dilengkapi dengan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan mencegah serta merespons kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan

3.2 Memperluas bantuan pangan dan mengurangi gangguan rantai pasokan untuk mengatasi kerawanan pangan

Memperluas manfaat Kartu Sembako berdasarkan jumlah anak, lansia, dan penyandang disabilitas di rumah tangga, serta bantuan tunai yang menyertai promosi kesehatan, termasuk makanan bergizi, akan membantu rumah tangga yang terdampak di tengah meningkatnya kerawanan pangan. Pilihan lain termasuk mengulang modul gizi “Sesi Pengembangan Keluarga” PKH dan meluncurkan surveilans gizi di tingkat lokal dan berfokus pada anak-anak. Di sisi penawaran, diperlukan intervensi untuk memastikan bahwa makanan tersedia dan terjangkau. Beberapa contohnya yaitu memantau pasokan dan harga makanan pokok untuk memandu respons kebijakan; bekerja sama dengan jaringan logistik untuk mengurangi gangguan pasokan dari pembatasan COVID-19; mendukung petani untuk melanjutkan produksi, dan lain-lain.

3.3 Mempertahankan dukungan kepada kelompok miskin berpenghasilan rendah dan menengah yang sekarang makin miskin dan rentan

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga mengalami hilangnya pendapatan. Dalam situasi yang begitu dinamis, sangat penting untuk terus mengidentifikasi dan mendaftarkan rumah tangga

yang terkena dampak dalam program bantuan sosial dan pasar tenaga kerja. Rumah tangga baru tersebut dapat diidentifikasi melalui aplikasi sesuai permintaan, penargetan masyarakat, dan kemudian divalidasi melalui sumber data catatan sipil dan non-konvensional seperti ponsel, listrik, rekening bank (Karina, 2020).

Pemerintah Indonesia telah berupaya sebaik mungkin, mengingat skala krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk mulai menerapkan langkah-langkah kebijakan dalam membantu pekerja mempertahankan pekerjaan mereka selama pandemi, serta langkah-langkah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan kemudahan penyesuaian terhadap pekerjaan baru setelah pandemi mereda. Upaya ini termasuk langkah-langkah untuk menekan penyebaran virus dengan mendukung kerja jarak jauh untuk pekerja jika memungkinkan dan membutuhkan standar kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat di tempat kerja; Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja yang dirumahkan atau mengalami pemotongan gaji; serta pelatihan peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang melalui program andalan Kartu Prakerja, yang juga merupakan tindakan jalur ganda untuk mendistribusikan tunjangan pengangguran kepada pekerja informal dan wiraswasta yang terkena dampak COVID-19.

Langkah-langkah ini sejalan dengan kebijakan yang diterapkan secara global dan di negara-negara rekan untuk meredam dampak negatif dan mendorong pemulihan pasar tenaga kerja yang lebih cepat (Bluedorn 2021). Beberapa pertimbangan lain untuk pekerja di sektor formal dapat mencakup perpanjangan atau peningkatan hak cuti sakit berbayar untuk memungkinkan pekerja isolasi mandiri (seperti di Korea Selatan, AS, Prancis); peraturan untuk membatasi pemecatan kolektif atau individu (Turki, Spanyol dan Prancis). Langkah-langkah pencarian kerja dan penempatan kerja juga dapat menjadi jalan untuk menjangkau pekerja informal Indonesia dan/atau mendukung transisi ke sektor formal setelah krisis. Prancis, Jerman, dan Belanda merupakan negara-negara yang telah mulai menggunakan alat daring untuk menghubungkan pencari kerja dengan lowongan dan/atau mempromosikan platform pencarian kerja daring yang ada (ILO & OECD, 2020). Terakhir, pekerja yang diharuskan mengasuh anak dan/atau anggota keluarga lainnya dapat didukung dengan memperpanjang cuti orang tua (untuk pekerja sektor formal) atau layanan pengasuhan anak yang aman dan terjangkau bagi mereka yang membutuhkan (ILO & OECD, 2020). Lihat Lampiran VIII untuk informasi lebih lanjut..

3. 4 Terus membantu usaha keluarga agar pulih

Upaya ini dapat mencakup kelanjutan program hibah usaha (seperti BPUM) untuk usaha keluarga karena mereka cenderung tidak mengambil pinjaman karena ketidakpastian. Program tersebut dapat didukung dengan mengizinkan bisnis yang memenuhi syarat untuk mendaftar mandiri melalui aplikasi sesuai permintaan agar mereka dikenal. Menghubungkan penerima hibah bisnis dengan program pelengkap lain yang mereka butuhkan sehingga dukungan lebih holistik. Contoh dukungan dapat berupa modal tambahan dengan persyaratan yang menguntungkan; dukungan dukungan usaha terpadu; akses ke pasar baru untuk mengimbangi gangguan pasokan dan permintaan akibat pandemi. Pentingnya memastikan usaha milik perempuan dapat mengakses dan memperoleh manfaat dari dukungan secara setara.

3. 5 Mengurangi beban perempuan dalam perawatan

Membuka sekolah secara bertahap dan aman akan menguntungkan anak-anak dan para ibu yang harus bertindak sebagai guru pengganti selama penutupan sekolah dan/atau menyeimbangkan peran sebagai ibu dan pekerjaan berbayar. Menggelar kampanye yang melibatkan pria terkenal yang dapat bertindak sebagai “agen perubahan” juga dapat mendorong pembagian pekerjaan rumah tangga yang setara. Sementara sekolah tetap tutup dan/atau pembelajaran campuran ditawarkan, penting untuk melengkapi orang tua dengan keterampilan dan dukungan yang mereka butuhkan agar berhasil mendukung anak-anak mereka. Tawaran dukungan kesehatan mental dapat menjadi bagian dari dukungan yang disediakan.

3. 6 Memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan dan perawatan

Penyandang disabilitas dan keluarganya dapat didukung melalui program-program sosial khusus yang ditargetkan kepada mereka, dan melalui program-program tambahan hingga arus utama. Gangguan terhadap layanan kesehatan saat ini yang dialami oleh orang dewasa dan anak penyandang disabilitas dapat diatasi dengan memastikan kesinambungan layanan

dan bantuan, mengadaptasi modalitas alternatif untuk penyediaan layanan kesehatan, seperti melalui program kunjungan rumah. Terlibat dengan organisasi yang mewakili penyandang disabilitas akan membantu menilai kebutuhan khusus mereka dan memberikan bantuan secara lebih efektif.

3. 7 Memasukkan pendaftaran baru untuk bantuan sosial ke dalam basis data tunggal untuk menentukan sasaran di masa mendatang

Peluncuran berbagai program pemerintah memberikan peluang berharga untuk pengumpulan data yang dapat menjadi sumber data awal untuk memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, beberapa langkah yang perlu diperhatikan antara lain: mengintegrasikan data penerima bantuan langsung tunai (BPUM, BLT-DD, Kartu Prakerja) yang belum tercatat di DTKS ke dalam DTKS, dan mencocokkan data tambahan ini dengan catatan administratif (misalnya, data pelanggan PLN). Aspek penting lainnya dari pembuatan basis data terpadu adalah aturan dan pedoman pengembangan untuk mengumpulkan informasi standar yang diperlukan untuk intervensi pada masa mendatang. Pengumpulan informasi ini dapat mencakup data tambahan tentang pendidikan dan kesehatan serta pekerjaan anak-anak. Terakhir, memastikan bahwa basis data lain (seperti pendaftaran usaha mikro baru, basis data semua penyandang disabilitas) menyertakan pengenal rumah tangga dan individu yang akan berguna untuk tujuan penggabungan data pada masa mendatang.

3. 8 Mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai bantuan pemerintah

Mengingat rendahnya kesadaran akan bantuan yang tersedia bagi penerima manfaat, coba untuk mengembangkan media yang mudah digunakan¹³ dengan informasi terkini tentang bantuan sosial dan program bantuan usaha. Empat fungsi utama dari media tersebut adalah: (1) menyebarkan – menyebarkan informasi menggunakan media sosial dan saluran bantuan; (2) melibatkan: tambahkan fitur “tanyakan kepada saya” untuk menanggapi pertanyaan umum dan menggunakan agen untuk mempersonalisasi tanggapan; (3) mengoordinasikan: menyosialisasikan semua fasilitator program bantuan sosial untuk berbagi informasi terkini kepada penerima manfaat; dan (4) menyuarakan – izinkan calon penerima manfaat untuk mendaftarkan kebutuhan mereka; berlaku untuk program tertentu; berbagi keluhan. Media tersebut dapat diakses oleh penyandang disabilitas, dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan jelas dan ringkas, tipe huruf sesuai, layanan interpretatif bahasa isyarat disertakan, dan video teks tersedia.

13. Respons suara interaktif (IVR) bebas pulsa, situs web, dan media lainnya

3.9 Usulan untuk perbaikan program

Tabel 4. Hasil dan rekomendasi untuk beberapa program

PROGRAM BANTUAN SOSIAL	RINGKASAN HASIL 2020	REKOMENDASI
Subsidi listrik	Program paling efektif dari segi anggaran (6T) dan jangkauan (46%) dari seluruh rumah tangga yang disurvei. Populasi termiskin paling diuntungkan Memungkinkan rumah tangga untuk mengimbangi biaya dan bekerja/ belajar dari rumah.	Meningkatkan subsidi listrik dengan pendaftaran sesuai permintaan dan memperluas ke penerima BLT Dana Desa untuk bantuan pelengkap.
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Target jumlah penerima manfaat tercapai. Keluarga miskin dan rentan (kuintil 1-3) paling diuntungkan.	Manfaatkan peluang untuk menjangkau rumah tangga dengan anak-anak yang lebih luas dan terkena dampak yang tidak mendapatkan bantuan saat ini dengan mengidentifikasi dan mendaftarkan mereka melalui penargetan komunitas yang berkelanjutan dan pelaporan mandiri.
Program Keluarga Harapan (PKH)	Target jumlah penerima manfaat tercapai. Keluarga termiskin (kuintil 1) yang paling diuntungkan.	Setarakan manfaat dengan program bantuan tunai lainnya. Mempercepat integrasi dengan program lain yang menargetkan anak-anak miskin untuk mengatasi kemiskinan anak dan kehilangan kesempatan belajar.
Program Prakerja	Mencapai kuintil 3-5 dan penerima manfaat di perkotaan. Penerima tidak tumpang tindih dengan transfer tunai lainnya. Hasil mencerminkan rancangan program – jaring pengaman yang ditargetkan untuk desil 5 ke atas di daerah perkotaan; penerima program tunai lainnya yang tidak memenuhi syarat.	Mendorong orang-orang di DTKS (atau 40% terbawah dari distribusi pengeluaran) untuk mengakses pelatihan keterampilan setelah program ini terbuka untuk semua.
Bantuan internet	Rumah tangga dengan anak-anak di seluruh distribusi pendapatan diuntungkan. Namun, proporsi penerima manfaat yang lebih tinggi berada di daerah perkotaan (menunjukkan kesenjangan dalam infrastruktur TIK) dan di kelompok berpenghasilan menengah (menunjukkan kesenjangan dalam akses ke perangkat).	Lanjutkan dukungan. Lengkapi dengan perangkat gratis/ bersubsidi kepada yang membutuhkan. Berinvestasi dalam infrastruktur TIK untuk jangkauan internet yang murah dan andal.
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)	Pelaksanaan program masih dalam proses pada saat survei. Lebih dari sepertiga responden dengan bisnis keluarga tidak mengetahui bahwa mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan. Namun, mereka yang memang menerima bantuan menggunakannya sebagai tambahan modal, kebutuhan pokok rumah tangga, dan membayar kembali pinjaman.	Terus dukung bisnis keluarga karena mereka cenderung tidak mengambil pinjaman karena ketidakpastian. Izinkan pendaftaran mandiri. Cocokkan penerima dengan dukungan pelengkap (pinjaman, pelatihan bisnis, akses istimewa ke pasar).

Rekomendasi menyeluruh dan khusus program ini bertujuan untuk mendukung rumah tangga dan bisnis yang dijalankan keluarga selama masa pandemi dan masa pemulihan. Dari perspektif fiskal, mereka tidak dapat menjaga berkelanjutan dalam penerapan jangka panjang kecuali pendapatan meningkat secara dramatis. Untuk mengurangi dampak berkepanjangan pada rumah

tangga akibat pandemi COVID-19 dan untuk membangun ketahanan terhadap krisis di masa depan, rekomendasi ini dapat dilengkapi dengan upaya untuk terus mereformasi keseluruhan sistem dan langkah-langkah perlindungan sosial melalui penilaian fiskal, pendampingan program, dan perluasan cakupan perlindungan sosial untuk semua orang.

Daftar Referensi

- Badan Pusat Statistik (2020a). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/11/05/1673/agustus-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-7-07-persen.html> (Accessed: March 2nd 2021).
- Badan Pusat Statistik (2020b). Minimum Living Needs in a Month (Rupiah) by Province 2005- 2015 Table. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212> (Accessed: March 2nd 2021).
- Badan Pusat Statistik (2021a). Pertumbuhan Ekonomi: Produk Domestik Bruto. Available at: https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- Badan Pusat Statistik (2021b). Sumber Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen), 2020. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/indicator/11/554/1/-seri-2010-sumber-pertumbuhan-pdb-seri-2010.html> (Accessed: March 18th 2021).
- Badan Pusat Statistik (2021c). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. Tersedia di: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> (Accessed: March 2nd 2021).
- Bluedorn, J. (2021). Working out the Differences: Labour Policies for a Fairer Recovery, IMF Blog, Tersedia di: https://blogs.imf.org/2021/03/31/working-out-the-differences-labor-policies-for-a-fairer-recovery/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery (Accessed: March 31st 2021).
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E. & Syamsulhakim, E. (2020). 'Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia', *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), pp. 88-110.
- Hastuti, Ruhmaniyati & Widyaningsih, D. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam Rangka Mitigasi Dampak COVID-19. Tersedia di: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02_covidpkh_in.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- ILO (2019). Financing Small Businesses in Indonesia. Tersedia di: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/documents/publication/wcms_695134.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- ILO (2020a). COVID-19 and the world of work: Country policy responses. Tersedia di: <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/regional-country/country-responses/lang-en/index.htm#TH> (Accessed: March 2nd 2021).
- ILO (2020b). Temporary Wage Subsidies. Tersedia di: https://www.ilo.org/global/topics/wages/publications/WCMS_745666/lang-en/index.htm (Accessed: March 2nd 2021).
- ILO (2020c). The socioeconomic impacts of COVID-19 in Malaysia: Policy review and guidance for protecting the most vulnerable and supporting enterprises. Tersedia di: https://www.ilo.org/asia/publications/WCMS_751600/lang-en/index.htm (Accessed: March 2nd 2021).
- ILO (2021). Social Protection Responses to COVID-19. Tersedia di: <https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?id=3417> (Accessed: March 18th 2021).
- ILO & OECD (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on jobs and incomes in G20 economies. Tersedia di: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/multilateral-system/g20/reports/WCMS_756331/lang-en/index.htm (Accessed: March 2nd 2021).

- IMF (2021). Policy Responses to COVID-19. Tersedia di: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#P> (Accessed: March 18th 2021).
- JPAL (2020). Online Survey on Economic Impact of COVID-19 in Indonesia: Results from Week 22. J-PAL Southeast Asia.
- Karina, N. (2020). Strengthening Indonesia's social protection in the COVID-19 era: Strategy and lessons from evidence. Tersedia di: <https://www.povertyactionlab.org/blog/11-20-20/strengthening-indonesias-social-protection-covid-19-era-strategy-and-lessons-evidence> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Sosial (2020a). Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Tersedia di: <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20200629111004.pdf> (Accessed: March 30th, 2021).
- Kementerian Sosial (2020b). Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial No. 02/3/BS.02.01/01/2020 tentang Indeks dan Faktor Penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2020. Tersedia di: <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20201015042924.pdf> (Accessed: March 30th, 2021).
- Kementerian Desa, P. D. T., dan Transmigrasi Republik Indonesia, (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015. Tersedia di: <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2016/08/pm-des-a-no-1-th-2015-tentang-pedoman-kewenangan-berdasarkan-hak-asal-usul-dan-kewenangan-lokal-berskala-des-a.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2020). Kemnaker Sosialisasi Hasil Kajian Komponen dan KHL Kepada Dewan Pengupahan. Tersedia di: <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-sosialisasi-hasil-kajian-komponen-dan-khl-kepada-dewan-pengupahan> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020a). Ini Realisasi PEN Hingga 25 November 2020. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisasi-pen-hingga-25-november-2020/> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020b). Media Briefing: Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020c). 'Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020'. Tersedia di: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/05/PMK-Nomor-50-Tahun-2020-2.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). APBN KITA: Kinerja dan Fakta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia,. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id/media/17266/apbn-kita-februari-2021.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020). Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 14 Tahun 2020. Tersedia di: https://anggunpaud.kemdikbud.go.id/images/upload/images/19092020_SALINAN_PERSESJEN_NOMOR_14_TAHUN_2020-merged.pdf (Accessed: March 18th 2021).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT Dana Desa). Tersedia di: https://www.bappenas.go.id/files/3415/9549/4158/Buku_Saku_Pendataan_BLT-Dana_Desa_FINAL.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) (2021). Peta Sebaran Tersedia di: <https://covid19.go.id/peta-sebaran> (Accessed: March 2nd).

- Kurniawan, A. (2020). Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa untuk Menangani Dampak Pandemi COVID-19: Cerita dari Desa. Tersedia di: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp04_covidblt_in.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (2021). Bantuan Prihatin Rakyat. Tersedia di: <https://bpr.hasil.gov.my/> (Accessed: March 18th 2021).
- Malaysian Investment Development Authority (2021). Perlindungan Ekonomi dan Rakyat Malaysia (PERMAI). Tersedia di: <https://www.mida.gov.my/perlindungan-ekonomi-dan-rakyat-malaysia-permai/> (Accessed: March 18th 2021).
- MAHKOTA & KOMPAK (2020). Dampak Ekonomi Krisis COVID-19 dan Peran Perlindungan Sosial dalam Memitigasi Kerentanan: Pengalaman Penyandang Disabilitas di Indonesia. Tersedia di: <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/covid-19-crisis-experiences-people-disabilities-indonesia-id.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- OECD (2019). PISA 2018: Insights and Interpretations. Tersedia di: <https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf> (Accessed: March 18th 2021).
- OECD (2020). Coronavirus (COVID-19): SME policy responses. Tersedia di: <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/> (Accessed: March 2nd 2021).
- Pratiwi, A.M., G., Tureah, G.G., Vanya, H., Irawan, K.I., Adirespati, S. and Eke, Z. (2020). Kumpulan Rekomendasi Kebijakan: Penanganan Krisis Multidimensi Pandemi COVID-19, Knowledge Sector Society, Available at: <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2021/01/ksi-1611332690.pdf> (Accessed on April 6th 2021).
- Prospera (2020). Concessions to Promote Economic Participation of Persons with Disabilities in Indonesia: Preliminary Report. Jakarta, Indonesia.
- Republic of the Philippines (2020). Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2020. Tersedia di: <https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200328-JOINT-MEMORANDUM-CIRCULAR-NO-1-S-2020.pdf> (Accessed: March 18th 2021).
- Schaefer, M. (2020). Life or livelihoods? Indonesia's social policy response to COVID-19. Tersedia di: <https://socialprotection.org/discover/blog/life-or-livelihoods-indonesia%E2%80%99s-social-policy-response-covid-19> (Accessed: March 2nd 2021).
- Sudarno, S. (2020). Weathering the Storm: Poverty and Indonesia's Social Protection System Amidst the COVID-19 Pandemic. Asia Health Policy Program (AHPP) 2020-21 Colloquium series "Health, medicine, and longevity: Exploring public and private roles, Freeman Spogli Institute for International Studies. Stanford University. <https://fsi.stanford.edu/events/weathering-storm-poverty-and-indonesia%E2%80%99s-social-protection-system-amidst-covid-19-pandemic> (Accessed: March 3rd 2021)
- Suryahadi, A., Izzati, R. A. & Suryadarma, D. (2020). The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia. Tersedia di: https://smeru.or.id/sites/default/files/publication/wp_covid19impact_draft.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- The Asian Development Bank (2020). Asia Small and Medium-Sized Enterprise Monitor 2020: The Asian Development Bank. Tersedia di: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/650251/asia-sme-monitor-2020-volume-2.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- The Asian Development Bank (2021). ADB COVID-19 Policy Database. Tersedia di: <https://covid19policy.adb.org/policy-measures/INO> (Accessed: March 2nd 2021).

- UN Women & Women Count (2020). From Insights to Action: Gender Equality in the Wake of COVID-19. Tersedia di: <https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142> (Accessed: March 18th 2021).
- UNICEF (2020a). COVID-19 and Children in Indonesia: An Agenda for Action to Address Socio-Economic Challenges. Tersedia di: https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-05/COVID-19-and-Children-in-Indonesia-2020_0.pdf (Accessed: March 2nd 2021).
- UNICEF (2020b). Laporan Kajian Cepat Kesehatan: Memastikan Keberlangsungan Layanan Kesehatan Esensial Anak dan Ibu di Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. Tersedia di: <https://www.unicef.org/indonesia/media/5371/file/Laporan%20Kajian%20Cepat%20Layanan%20Kesehatan%20Esensial%20Ibu%20Anak.pdf> (Accessed: March 2nd 2021).
- UNICEF (2020c). COVID-19 and social protection in South Asia: India. Tersedia di: <https://www.unicef.org/rosa/media/10076/file/India.pdf> (Accessed: March 18th 2021).
- UNICEF (2020d). Cash transfer offer a lifeline to vulnerable families during COVID-19: The pandemic has taken a devastating toll on families, but cash transfers are helping ease the strain. Tersedia di: <https://www.unicef.org/thailand/stories/cash-transfers-offer-lifeline-vulnerable-families-during-covid-19> (Accessed: March 24th 2021).
- UNICEF & Fiscal Policy Agency (2021a). The Impact of the COVID-19 Economic Crisis on Child Poverty and Mobility in Indonesia.
- UNICEF & International Policy Centre for Inclusive Growth (IPC-IG) (2020). Profiles of pre-COVID-19 social protection systems in Bhutan, Bangladesh and Maldives and a snapshot of their COVID-19 responses Tersedia di: <https://socialprotection.org/profile-pre-covid-19-social-protection-system-bhutan-bangladesh-and-maldives-and-snapshot-their> (Accessed: March 24th 2021).
- UNICEF & Overseas Development Institute (ODI) (2020). Briefing – Universal child benefits: policy issues and options. Tersedia di: <https://www.unicef.org/media/70416/file/Universal-child-benefits-Briefing-2020.pdf> (Accessed: March 26th 2021)
- Wells, M. and Sijapati Basnett, B. (2020). Why gender matters in Indonesia's Covid-19 policy responses. ANU Indonesia Project Global Seminar, Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=At3DCjs5AQA> (Accessed: March 31 2021).
- World Health Organization (2020). At least 80 million children under one at risk of diseases such as diphtheria, measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, warns Gavi, WHO and UNICEF. Tersedia di: [At least 80 million children under one at risk of diseases such as diphtheria, measles and polio as COVID-19 disrupts routine vaccination efforts, warn Gavi, WHO and UNICEF](https://www.who.int/news/item/20-03-2020-at-least-80-million-children-under-one-at-risk-of-diseases-such-as-diphtheria-measles-and-polio-as-covid-19-disrupts-routine-vaccination-efforts-warn-gavi-who-and-unicef) (Accessed: March 31st 2021).
- World Bank (2019). Aspiring Indonesia: Expanding the Middle Class, Washington DC: The World Bank. Tersedia di: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class> (Accessed: March 2nd 2021).
- World Bank (2020) Indonesia Economic Prospects, December 2020: Towards a Secure and Fast Recovery, Available at: <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/december-2020-indonesia-economic-prospects> (Accessed: 19 March 2021).

Lampiran I. Tinjauan tentang program bantuan pemerintah

No	Nama Skema	Perincian	Perluasan/Modifikasi atau Program Baru	Penerima Manfaat Sasaran	Cakupan Populasi ¹⁴	Nilai Transfer/Manfaat Barang (Mata Uang Lokal dan dolar AS)	Mekanisme Penargetan	Durasi yang direncanakan awal pada 2020	Lanjutan pada tahun 2021	Total Anggaran (Mata Uang Lokal dan dolar AS)	Biaya Tanggap Darurat (% dari PDB)
Bantuan Sosial											
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	Bantuan Tunai Bersyarat untuk rumah tangga dengan perempuan hamil, anak usia sekolah, bayi, dan lansia	Perluasan	10 Juta rumah tangga per 2021	14%	Mulai dari Rp 900.000 (US\$ 62) menjadi Rp 10.000.000 (US\$ 696) per tahun	DTKS	3 bulan	Ya	Rp 28,71 T (US\$ 1,99 M) per 2021	0.18%
2	Bantuan Beras PKH ¹⁵	Bantuan beras untuk penerima PKH	Perluasan	10 Juta rumah tangga per tahun 2020	14%	15 kg / keluarga / bulan	DTKS	3 bulan	-	Rp 5 T (US\$ 347,48 M) per tahun 2020	0.03%
3	Kartu Sembako	Bantuan Pangan untuk konsumsi nasi, telur, sayur	Perluasan	20 Juta rumah tangga per tahun 2021	28%	Rp 200,000 (US\$ 134)	DTKS	9 bulan	Ya	Rp 45,12 T (US\$ 3,14 M) per 2021	0.28%
4	Perluasan Bantuan Tunai ¹⁶	Bantuan tunai bagi penerima program kartu Sembako yang tidak menerima PKH	Perluasan	9 Juta rumah tangga per 2020	13%	Rp 500,000 (US\$ 35)	DTKS	1 bulan	Ya	Rp 4,5 T (US\$ 312,73 M) per 2020	0.03%
5	Subsidi listrik	Subsidi listrik berdasarkan ukuran VA	Perluasan	31,2 Juta rumah tangga per tahun 2020	45%	Gratis untuk 450 VA dan diskon 50% untuk 900 VA	DTKS	3 bulan untuk rumah tangga, 6 bulan untuk UKM dan industri	Ya	Rp 3,5 T (US\$ 242,8 M)	0.02%

14. Angka proporsi rumah tangga sasaran penerima manfaat masing-masing program dihitung dari rumah tangga sasaran masing-masing program dibagi total KK (69 juta).

15. Dikarenakan masalah waktu dan program ini baru diperkenalkan, program-program ini belum dimasukkan dalam survei

16. Dikarenakan masalah waktu dan program ini baru diperkenalkan, program-program ini belum dimasukkan dalam survei

No	Nama Skema	Perincian	Perluasan/ Modifikasi atau Program Baru	Penerima Manfaat Sasaran	Cakupan Populasi ¹⁴	Nilai Transfer/Manfaat Barang (Mata Uang Lokal dan dolar AS)	Mekanisme Penargetan	Durasi yang direncanakan awal pada 2020	Lanjutan pada tahun 2021	Total Anggaran (Mata Uang Lokal dan dolar AS)	Biaya Tanggap Darurat (% dari PDB)
6	Bantuan Sembako-Jabodetabek	Bantuan sembako bagi yang tidak tercakup program PKH dan Kartu Sembako	Baru	1,36 Juta rumah tangga per 2020	2%	Rp 600.000 (US\$ 42) dari Apr hingga Jun 2020, Rp 300.000 (US\$ 21) dari Juli hingga Des 2020	DTKS	9 bulan	Ya, dikonversi menjadi uang tunai	Rp 4,57 T (US\$ 317,6 M) per 2021	0.03%
7	Bansos Tunai	Transfer Tunai bagi yang tidak tercakup kartu PKH dan Sembako	Baru	10 Juta rumah tangga per 2021	13%	Rp 600.000 (US\$ 42) dari Apr hingga Jun 2020, Rp 300.000 (US\$ 21) dari Juli hingga Des 2020	DTKS	9 bulan	Ya	Rp 12,0 T (US\$ 834,78 M) per 2021	0.07%
8	BLT Dana Desa	<i>Bantuan Tunai bagi mereka yang tidak tercakup kartu PKH, Sembako, dan Prakerja yang didanai melalui Dana Desa</i>	Perluasan	11 Juta rumah tangga per 2020	16%	Rp 600.000 (US\$ 42) dari Apr hingga Jun 2020, Rp 300.000 (US\$ 21) dari Juli hingga Des 2020	Penargetan Masyarakat	9 bulan	Ya	Rp 14,4 T (US\$ 1 M) per 2021	0.09%
9	Kartu Pra-Kerja ¹⁸	Tunjangan Pengangguran dan Bantuan Pelatihan bagi para pengusaha UKM dan mereka yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) COVID-19	Modifikasi	5,6 Juta individu per 2021	5.40%	Rp 3.550.000 (US\$ 247)	Aplikasi Sesuai Permintaan, menargetkan desil 5 ke atas	9 bulan	Ya	Rp 20 T (US\$ 1,391 M) per 2021	0.12%
10	Paket Internet	Bantuan kuota internet untuk siswa dan guru	Baru	54,1 Juta orang per 2020	-	Kuota internet bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan	Dapodik and PDDiktii	4 bulan	Ya	Rp 7,2 T (US\$ 499,37 M) per 2020	0.04%

18 Untuk program dengan target individu, seperti Kartu Prakerja, diasumsikan ada 1,5 anggota yang memenuhi syarat per KK

No	Nama Skema	Perincian	Perluasan/Modifikasi atau Program Baru	Penerima Manfaat Sasaran	Cakupan Populasi ¹⁴	Nilai Transfer/Manfaat Barang (Mata Uang Lokal dan dolar AS)	Mekanisme Penargetan	Durasi yang direncanakan awal pada 2020	Lanjutan pada tahun 2021	Total Anggaran (Mata Uang Lokal dan dolar AS)	Biaya Tanggap Darurat (% dari PDB)
UMKM											
1	Bantuan Presiden untuk UMKM (BPUM) ¹⁹	Bantuan tunai kepada UMKM (bantuan modal kerja)	Baru	12 Juta UMKM per 2021	8.80%	Rp 2.400.000 (US\$ 167)	Campuran	5 Bulan	Ya	Rp 17,34 T (US\$ 1,21 M) per 2021	0.11 %
2	Bantuan Subsidi Upah	Subsidi upah kepada pekerja yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan	Baru	15,7 Juta pekerja per 2020	15.20%	Rp 2.400.000 (US\$ 167)	BPJS Data Ketenagakerjaan, pekerja yang berpenghasilan < Rp5 Juta per bulan	4 Bulan	Tidak	Rp 29,4 T (US\$ 2,04 M) per 2020	0.18 %
3	Pajak Penghasilan Final (0,5%) Ditanggung oleh Pemerintah	Kompensasi pajak penghasilan final UKM	Baru	-	-	-	Direktorat Jenderal Pajak	-	Ya	Rp 2,4 T (US\$ 167.46 M) per 2021	0.01 %
4	Subsidi Bunga	Subsidi bunga pinjaman sebesar Rp 10 Miliar (US\$ 693,5 K)	Baru	29,9 Juta debitur per 2021	-	2% hingga 6% tergantung pada jumlah pinjaman	Bank dan lembaga non-keuangan	-	Ya	Rp 31,95 T (US\$ 2,23 M) per 2021	0.20 %
5	Collateral Subsidy (Subsidi Imbal Jasa Penjaminan)	Pemerintah mensubsidi agunan pinjaman yang dibuat oleh UKM	Baru	-	-	-	-	-	Ya	Rp 8,5 T (US\$ 593,1 M) per 2021	0.05 %
6	Penangguhan Pinjaman	Perpanjangan jatuh tempo pinjaman satu tahun	Baru				Bank dan lembaga non-keuangan	12 Bulan	Ya		

Sumber: Menteri Keuangan, Pratiwi et al., 2020, Schaefer 2020, Kemdikbud, 2020.

¹⁹ Untuk program dengan target individu, seperti BPUM, diasumsikan ada 1,5 anggota yang memenuhi syarat per KK.

Lampiran II. Catatan Metodologi - perbandingan antara Survei COVID-19 2020 dan SUSENAS 2019

Tabel A1 membandingkan karakteristik rumah tangga antara survei ini dan Susenas 2019. Karena ini merupakan survei probabilitas yang mengikuti desain pengambilan sampel Susenas 2019, sehingga laporan menggunakan metode pembobotan untuk memastikan komparabilitasnya dengan Susenas 2019. Secara keseluruhan, sebagai survei perwakilan nasional, survei 2020 sebanding dengan Susenas 2019 dalam hal proporsi perdesaan perkotaan dan gender kepala rumah tangga.

Namun, perbedaan utama dengan Susenas 2019 yaitu seputar usia dan pendidikan kepala rumah tangga. Survei tahun 2020 memiliki proporsi kepala rumah tangga berusia 29 tahun ke bawah yang sedikit lebih rendah dan proporsi individu berusia 30-59 tahun yang sedikit lebih tinggi. Survei ini juga memiliki proporsi kepala rumah tangga yang tidak pernah atau tidak menyelesaikan pendidikan yang lebih rendah dan proporsi tingkat sekolah menengah atas yang sedikit lebih tinggi.

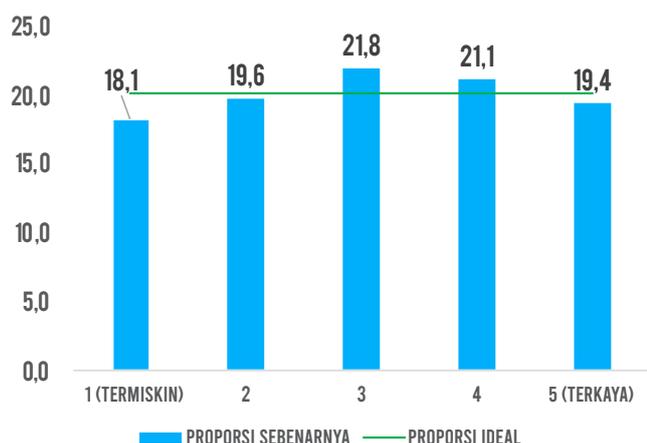
Tabel A1. Perbandingan karakteristik rumah tangga (%)

Kategori	Bobot survei 2020 (%)	Susenas 2019(%)
(1)	(3)	(4)
Perkotaan/Perdesaan		
Perkotaan	56	58,2
Perdesaan	44	41,8
Total	100.0	100.0
Gender kepala rumah tangga		
Laki-laki	85,7	86,4
Perempuan	14,3	13,6
Total	100.0	100.0
Rentang usia kepala rumah tangga		
29 tahun atau lebih muda	3,7	8,3
30-39 tahun	16,6	20,9
40-49 tahun	28,9	25,9
50-59 tahun	26,9	22,7
60 tahun atau lebih tua	22,8	22,2
Tidak tahu	1,2	Ta
Total	100.0	100.0
Status perkawinan kepala rumah tangga		
Menikah	83,1	81,8
Janda/Duda	12,2	11,3
Bercerai	3,1	3,2
Lajang	1,6	3,7
Total	100.0	100.0
Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga		
Tidak pernah bersekolah atau tidak tamat	14,6	21,5
Sekolah Dasar (MI/Paket A)	30,7	28,5
Sekolah Menengah Pertama (MTs/Paket B)	16,9	16,1
Sekolah Menengah Atas (SMK/MA/Paket C)	28,7	25,1
Gelar diploma	2,1	2,1
Gelar S1/S2/S3/profesi	7	6,8
Tidak tahu	0,1	Ta
Total	100.0	100.0
Ukuran rumah tangga		
1-2 anggota	15,5	17,5
3-4 anggota	50,3	52,5
5-6 anggota	27,4	24,3
7 anggota atau lebih	6,8	5,6
Total	100.0	100.0

Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

Distribusi kuintil yang digunakan dalam laporan ini didasarkan pada rumah tangga yang disurvei dalam distribusi pengeluaran di seluruh sampel Susenas 2019. Idealnya, setiap kuintil harus terdiri dari tepat 20% dari total sampel (tertimbang). Namun, dalam survei kami, kuintil 3 dan 4 sedikit lebih dari 20%, sedangkan sisanya sedikit di bawah 20% (lihat Gambar A1). Distribusi tersebut menunjukkan bahwa dibandingkan dengan Susenas Maret 2019, survei COVID-19 sedikit melebih-lebihkan rumah tangga di bagian tengah distribusi. Meskipun perbedaan-perbedaan ini penting untuk dicatat, tetapi tidak ada perbedaan yang substansial.

Gambar A1. Proporsi Ideal vs Realisasi Kuintil Pengeluaran/Kapita (2019) dihitung dari sampel penuh Susenas 2019



Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

*Catatan: Persentase didasarkan pada jumlah rumah tangga di setiap sub-kelompok.

Tabel A2. Komposisi rumah tangga dan anggota rumah tangga perorangan dengan kondisi kerentanan khusus

Jumlah anak (0-17 tahun)	
Nihil	28,5
1 anggota	32,5
2 anggota	26,3
3 anggota atau lebih	12,7
Proporsi KK dengan anggota yang berkarakteristik	
Anak usia prasekolah	25,4
Anak usia sekolah	57,96
Penyandang disabilitas	6,86
Ibu hamil	3,2
Penyakit kronis	15,8
Lansia	30,4

Penjelasan tambahan tentang status sosial ekonomi tahun 2019

Data survei digabungkan dengan data Susenas 2019 untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi rumah tangga sampel sebelum pandemi dan posisi rumah tangga dalam distribusi pengeluaran. Gambar-gambar ini membantu untuk memantau dengan lebih baik konsekuensi dari hilangnya pendapatan akibat COVID-19 (seperti yang dilaporkan di bagian berikutnya) pada posisi ekonomi rumah tangga.

Karena survei gabungan hanya merupakan sub-sampel dari data Susenas 2019, maka proporsi rumah tangga di setiap kuintil tidak lagi tepat masing-masing 20%. Sebaliknya, distribusi rumah tangga di seluruh kuintil dalam studi bersama adalah sebagai berikut: kuintil 1 (16%), kuintil 2 (18%), kuintil 3 (19%), kuintil 4 (21%) dan kuintil 5 (24%). Oleh karena itu, dalam hal status sosial-ekonomi, survei bersama sedikit bias ke atas terhadap sampel Susenas 2019; hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa kepemilikan telepon digunakan sebagai kriteria pemilihan dalam prosedur pengambilan sampel survei bersama.

Tabel A3. Statistik deskriptif pengeluaran per kapita dan pengeluaran rumah tangga menurut kelompok pengeluaran

Kelompok pengeluaran	Pengeluaran per kapita (Rp 000)			Pengeluaran Rumah Tangga (Rp 000)		
	Minimal	Rata-rata	Maksimal	Minimal	Rata-rata	Maksimal
Kuintil 1 (16% dari total KK)	168	423	560	270	1,900	6,100
Kuintil 2 (18% dari total KK)	560	676	800	580	2,900	12,000
Kuintil 3 (19% dari total KK)	803	971	1,150	800	4,000	13,400
Kuintil 4 (21% dari total KK)	1,147	1,401	1,750	1,150	5,100	20,200
Kuintil 5 (24% dari total KK)	1,737	2,890	26,400	1,775	9,350	119,000

Sumber: dihitung dari Susenas Maret 2019 dan survei rumah tangga 2020

Lampiran III. Analisis untuk mendukung simulasi dampak perubahan pendapatan dan pengeluaran pada distribusi kuintil 2019

Kami menyajikan simulasi sederhana untuk menggambarkan implikasi perubahan pendapatan dan pengeluaran selama pandemi terhadap status ekonomi rumah tangga (atau posisi mereka dalam distribusi kuintil pada tingkat 2019). Mengikuti penggunaan pengeluaran Badan Pusat Statistik sebagai ukuran kesejahteraan, simulasi ini berfokus pada mereka yang melaporkan bahwa keduanya Pengeluaran dan pendapatan mereka berkurang selama pandemi. Hampir seperempat (23,4%) dari 63 juta rumah tangga yang disurvei melaporkan penurunan pendapatan dan pengeluaran²⁰.

Asumsi yang mendasari simulasi ini adalah bahwa rumah tangga menghadapi pengurangan pendapatan “dipaksa” untuk mengurangi pengeluaran mereka. Asumsi tambahan meliputi: keranjang barang yang dikonsumsi dan ukuran rumah tangga tidak berubah antara 2019 dan 2020. Karena kami tidak mengumpulkan data tentang ukuran pengurangan pengeluaran, untuk tujuan simulasi, kami mengadopsi perkiraan perubahan rata-rata pengeluaran per kapita (PCE) seperti yang ditunjukkan dalam Suryahadi et al. (2020) tetapi kami menerapkannya pada pertumbuhan ekonomi aktual sebesar -2,07% pada tahun 2020 (BPS, 2021a). Rata-rata perubahan PCE yang kami gunakan adalah 10%²¹. Kami berasumsi bahwa pengurangan pengeluaran ini dialami secara merata di semua rumah tangga dalam sub-kelompok ini. Besaran simulasi pengeluaran rumah tangga kemudian dibagi dengan ukuran rumah tangga rata-rata untuk memperkirakan pengeluaran per kapita. Kuintil baru ditentukan berdasarkan simulasi pengeluaran per kapita.

Gambar 4 mengilustrasikan pengacakan ulang kuintil yang akan dilakukan jika semua rumah tangga dalam sub-kelompok mengalami pengurangan pengeluaran sebesar 10%. Proporsi rumah tangga pada kuintil 1 dan 2 akan meningkat masing-masing sebesar 5,9 pp dan 1,9 pp. Peningkatan 5,9-pp, jika kami menunjukkannya sebagai persentase dari komposisi awal kuintil 1 (17,3%), merupakan peningkatan 34,1% – yang signifikan. Demikian pula peningkatan 1,9-pp sama dengan peningkatan 8% dalam komposisi kuintil 2.

Ukuran kuintil 3 dan 4 akan berkurang masing-masing sebesar 0,8 pp dan 1,9 pp. Penurunan terbesar akan terlihat pada kuintil 5, penurunan 10% dalam pengeluaran akan menghasilkan penurunan 4,8-pp. Ini merupakan pengurangan hampir sepertiga (28,9%) rumah tangga yang berada di kuintil 5 pada tahun 2019.²²

Penurunan pengeluaran dan pendapatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan. Sebelum simulasi, 8,1% rumah tangga di antara kelompok yang kami pantau (mereka yang melaporkan bahwa pendapatan dan pengeluaran berkurang sebagai akibat pandemi) hidup di bawah garis kemiskinan.

Tingkat kemiskinan naik menjadi 12,3% setelah simulasi pengurangan pengeluaran sebesar 10%. Penurunan relatif dalam pengeluaran akan menghasilkan peningkatan 4,2 pp dalam proporsi rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Ini berarti peningkatan 50% dalam jumlah individu yang miskin.

20. Harus dicatat bahwa banyak rumah tangga dalam sampel kami mengalami penurunan pendapatan dan sekaligus peningkatan pengeluaran. Kami percaya bahwa banyak dari rumah tangga ini kesejahteraannya mungkin memburuk. Namun, karena ukuran kesejahteraan yang digunakan dalam menentukan status ekonomi adalah pengeluaran, ketika pengeluaran meningkat, hal ini berarti peningkatan kesejahteraan, sehingga yang termasuk dalam kelompok ini dapat keliru. Selain itu, data kami tidak cukup lengkap untuk sepenuhnya mengukur mekanisme koping yang terlibat di setiap rumah tangga. Oleh karena itu, simulasi dampak pada kelompok ini juga akan membutuhkan banyak asumsi tambahan yang dapat mengurangi validitas simulasi kami. Oleh karena itu, kami memfokuskan pada kelompok rumah tangga yang memburuk dari segi pendapatan dan pengeluaran.

21. Kami menggunakan logika berikut untuk memperkirakan 10% perubahan rata-rata PCE: Perubahan pertumbuhan ekonomi antara 2019 dan 2020 adalah -7,09, yang kami gandakan dengan koefisien korelasi 1,424, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3 dari Suryahadi et al. 2020.

22. Matriks transisi pergeseran posisi kuintil disajikan pada Tabel A5 Lampiran III

Tabel A4. Tabulasi perubahan pengeluaran dan pendapatan karena pandemi

Keadaan Rumah Tangga	Pengeluaran meningkat	Pengeluaran sama	Pengeluaran berkurang
Pendapatan meningkat	2.16	0.51	0.26
Pengeluaran sama	6.16	15.09	1.47
Pengeluaran berkurang	26.63	24.32	23.4
Total	34.96	39.92	25.13

Tabel A5. Matriks transisi dengan asumsi penurunan pengeluaran sebesar 10%

		Kuintil setelah 90% pengurangan pengeluaran					Total
		Kuintil 1	Kuintil 2	Kuintil 3	Kuintil 4	Kuintil 5	
Sebelum	Kuintil 1	100	0	0	0	0	17.3
	Kuintil 2	25.39	74.61	0	0	0	22.9
	Kuintil 3	0	30.02	69.98	0	0	23.0
	Kuintil 4	0	0	28.92	71.08	0	20.1
	Kuintil 5	0	0	0	23.48	76.52	16.6
	Total	23.18	24.82	22.23	18	11.77	

Lampiran IV. Rangkuman respons kebijakan bantuan sosial terhadap COVID-19 di sejumlah negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Pasifik

Nama Skema	Perincian	Jumlah Penerima	Total Anggaran (Mata Uang Lokal dan Dolar AS)	Nilai Transfer (Mata Uang Lokal dan Dolar AS)	Biaya Tanggap Darurat (% dari PDB)
Malaysia (per 2021)²³					
Bantuan Prihatin Rakyat	Bantuan tunai satu kali ditargetkan untuk individu dan rumah tangga. Untuk rumah tangga, nominalnya didasarkan pada kategori pendapatan dan ukuran rumah tangga	8,1 Juta penerima	6,5 M Ringgit Malaysia (US\$ 1,58 M)	250 Ringgit Malaysia (US\$ 61) untuk individu dan 500 Ringgit Malaysia (US\$ 122) hingga 1800 Ringgit Malaysia (US\$ 438) untuk rumah tangga	0.60%
Filipina (per 2020)²⁴					
Program Subsidi Darurat	Subsidi tunai dua bulan untuk keluarga berpenghasilan rendah berdasarkan wilayah tempat tinggal	18 Juta keluarga berpenghasilan rendah	100 M Peso Filipina (US\$ 2,06 M)	5000 Peso Filipina (US\$ 103) hingga 8000 Peso Filipina (US\$ 165) per bulan	0.55 %
Thailand (per 2020)²⁵					
Pembayaran Tunai Darurat untuk Pekerja Informal	Bantuan tunai tiga bulan kepada pekerja informal yang tidak ditanggung oleh Dana Jaminan Sosial	16 Juta pekerja	331,5 M Bath Thailand (US\$ 7,817 M)	5.000 Bath Thailand (US\$ 163) per bulan	1.4%
Bantuan Keuangan bagi pemegang Kartu Sejahtera	Transfer tunai untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk kampanye lain	1,16 Juta orang	3,58 M Bath Thailand (US\$ 116,65 M)	3.000 Bath Thailand	0.02%
India (per 2020)²⁶					
PM-KISAN	Dukungan Pendapatan Minimum untuk Petani, berlaku selama 3 bulan	86,9 Juta petani	521,4 M Rupee India (US\$ 7,16 M)	6.000 Rupee India (US\$ 83)	0.2%
Bantuan Tunai untuk kelompok rentan	Bantuan Tunai untuk Lansia miskin, Janda, dan divyang (penyandang disabilitas) diberikan dalam dua kali angsuran	30 Juta individu	30 M Rupee India (US\$ 412 M)	1.000 Rupee India (US\$ 14)	0.01%
Inklusi Keuangan Jan Dhan	Transfer Tunai untuk perempuan, dicicil selama 3 bulan	200 Juta perempuan	300 M Rupee India (US\$ 4,12 M)	500 Rupee India (US\$ 7) per bulan	0.14%

Sumber: Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (2021); Republic of the Philippines (2020); ILO (2021); UNICEF (2020c)

23. <https://bpr.hasil.gov.my/>

24. <https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2020/03mar/20200328-JOINT-MEMORANDUM-CIRCULAR-NO-1-S-2020.pdf>

25. <https://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowWiki.action?id=3417>

26. <https://www.unicef.org/rosa/media/10076/file/India.pdf>

Lampiran V. Rangkuman Respons kebijakan UMKM terhadap COVID-19 di sejumlah negara berpenghasilan rendah dan menengah di kawasan Asia Pasifik

Pengukuran	Jumlah Penerima	Total Anggaran (Mata Uang Lokal dan Dolar AS)	Nilai Transfer (Mata Uang Lokal dan Dolar AS)	Biaya Tanggap Darurat (% dari PDB)
Malaysia (per 2021)²⁷				
Dukungan Likuiditas				
• Skema kredit mikro untuk UMKM	-	1 M Ringgit Malaysia (US\$ 243,1 M)		0.07%
• Hibah Khusus PERMAI Prihatin	500.000 UKM di negara bagian MCO (dibatasi secara sosial) dan 300.000 UKM di negara bagian lain	650 M Ringgit Malaysia (US\$ 158 M)	1.000 Ringgit Malaysia (US\$ 242) untuk UKM di Negara bagian MCO dan 500 Ringgit Malaysia untuk UKM di negara bagian lain	0.04%
• Kampanye e-Commerce UKM dan Mikro UKM		300 M Ringgit Malaysia (US\$ 72,9 M)		0.02%
Penangguhan Pembayaran Pajak/Pinjaman				
• Bantuan Pelunasan Pinjaman yang Ditargetkan (moratorium 3 bulan/pelunasan fleksibel)				
Philippines (per 2020)²⁸				
Dukungan Likuiditas				
• Tindakan perlindungan sosial bagi pekerja yang rentan dan UMKM		65 M Peso Filipina (US\$ 1,34 M)		0.36%
• Dana Rehabilitasi Perusahaan (P3-ERF), pembiayaan untuk UMKM terdampak COVID-19		1 M Peso Filipina (US\$ 20,63 M)		0.01%
Penangguhan Pembayaran Pajak/Pinjaman				
• Masa tenggang 30 hari untuk pembayaran utang				
Thailand (per 2020)				
Dukungan Likuiditas				
• Pinjaman Bunga Rendah untuk UKM (2%)		500 M Bath Thailand (US\$ 16,36 M)		3.01%
• Pengurangan beban bunga 150% untuk UKM				
Penangguhan Pembayaran Pajak/Pinjaman				
• Masa tenggang 30 hari untuk pembayaran utang				
India (per 2020)²⁹				
Dukungan Likuiditas				
• Pinjaman tanpa agunan untuk UKM		3 T Rupee India (US\$ 41,30 M)		1.44%
• Dukungan ekuitas untuk perusahaan yang tertekan	2 Juta UKM	200 M Rupee India (US\$ 2,75 M)		0.10%
• Skema MUDRA (program pinjaman untuk PKL)	5 Juta PKL	50 M Rupee India (US\$ 688,37 M)	Pinjaman hingga 10.000 Rupee India (US\$ 14)	0.02%
Penangguhan Pembayaran Pajak/Pinjaman				
• Moratorium pembayaran pokok 12 bulan				
• Penangguhan pembayaran pajak untuk UKM				

Sumber: Malaysian Investment Development Authority (2021); OECD (2020); IMF (2021)

27. <https://www.mida.gov.my/perindungan-ekonomi-dan-rakyat-malaysia-permai/>

28. <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19#P>

29. <http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/coronavirus-covid-19-sme-policy-responses-04440101/>

Lampiran VI. Perbandingan antara penerima dan bukan penerima bantuan tunai menurut kuintil 1–3

Kondisi Rumah Tangga	Kuintil 1		Kuintil 2		Kuintil 3		Total	
	Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima	Menerima	Tidak menerima
<i>Kondisi pengeluaran di tahun 2019</i>								
Pengeluaran per kapita	416019.7	433645.3	677208.8	680068.2	970698.3	971994	682807.8	724229.8
Pengeluaran makanan per kapita	274309.4	277124.2	426210.3	418094	557562.9	547226.7	416384.9	428733.2
Rasio makanan per total pengeluaran	0.66	0.64	0.63	0.62	0.58	0.57	0.62	0.60
<i>Dampak COVID-19 pada rumah tangga, Kondisi pendapatan</i>								
Penghasilan berkurang dibandingkan Januari*	74.1%	69.0%	78.7%	76.1%	74.9%	77.2%	75.9%	74.5%
Pengeluaran berkurang dibandingkan dengan Januari	24.0%	25.7%	25.5%	34.0%	27.4%	24.3%	25.6%	28.0%
<i>Kondisi ketahanan pangan</i>								
Tidak mampu makan makanan sehat	9.6%	14.7%	17.2%	17.9%	15.1%	20.4%	13.8%	18.0%
Makan dengan porsi lebih kecil dari biasanya	4.6%	10.8%	11.7%	10.9%	9.1%	14.5%	8.3%	12.3%
Tidak makan sepanjang hari	1.0%	5.1%	2.8%	3.3%	2.9%	4.1%	2.2%	4.1%
<i>Kondisi merugikan lainnya</i>								
Mengalami kesulitan memenuhi biaya pendidikan**	56.7%	62.1%	60.9%	60.1%	40.6%	58.4%	52.8%	59.9%

Sumber: dihitung dari Susenas 2019 dan survei rumah tangga 2020

*Persentase yang disajikan di sini hanya di antara mereka yang memberikan tanggapan yang tidak hilang

**Persentase yang disajikan di sini hanya di antara mereka yang memiliki biaya pendidikan

Lampiran VII. Hasil regresi pada faktor risiko rumah tangga

(a) Hasil estimasi faktor risiko yang terkait dengan dampak paling signifikan dari pandemi 2020

	Kehilangan pekerjaan	Peningkatan biaya rumah	Gangguan kesehatan	Gangguan pendidikan	Kesulitan pelayanan kesehatan
Kasus COVID-19/ 100 populasi	0.088** (0.043)	-0.001 (0.016)	-0.044** (0.018)	0.005 (0.029)	0.024 (0.016)
Perubahan mobilitas ke tempat kerja	0.110 (0.212)	-0.004 (0.083)	-0.180** (0.082)	0.024 (0.150)	0.136** (0.058)
Rumah tangga yang dikepalai perempuan	-0.090*** (0.024)	0.030** (0.014)	0.004 (0.008)	-0.001 (0.016)	0.026** (0.012)
Kepala rumah tangga berusia <30	0.065 (0.040)	0.011 (0.021)	0.016 (0.024)	-0.061*** (0.024)	0.016 (0.011)
Kepala rumah tangga berusia 30–50	0.046** (0.019)	-0.005 (0.008)	0.002 (0.007)	0.014 (0.014)	-0.005 (0.004)
Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah	0.104*** (0.019)	-0.024*** (0.008)	-0.008 (0.007)	-0.067*** (0.014)	-0.010** (0.004)
Kehadiran anak-anak berusia <18	0.045** (0.020)	0.006 (0.008)	-0.031*** (0.010)	0.128*** (0.011)	-0.002 (0.005)
Kehadiran penyandang disabilitas	0.007 (0.034)	-0.007 (0.007)	0.007 (0.011)	-0.015 (0.023)	0.014 (0.011)
Tinggal di perkotaan	0.140*** (0.019)	-0.006 (0.007)	-0.028*** (0.010)	-0.061*** (0.013)	-0.002 (0.004)
20% terbawah	0.016 (0.030)	0.004 (0.013)	-0.036** (0.015)	0.011 (0.021)	-0.012* (0.007)
40% Menengah	0.041 (0.028)	0.017 (0.011)	-0.019 (0.016)	-0.003 (0.019)	-0.003 (0.010)
60% Menengah	0.061** (0.027)	-0.005 (0.008)	-0.025* (0.014)	0.005 (0.019)	-0.011* (0.007)
80% Menengah	0.039 (0.026)	0.013 (0.011)	-0.016 (0.014)	-0.018 (0.016)	-0.016*** (0.006)
Jawa dan Bali	0.141*** (0.026)	0.002 (0.010)	0.009 (0.009)	-0.089*** (0.020)	-0.017** (0.007)
Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan	0.101*** (0.032)	-0.011 (0.010)	0.014 (0.009)	-0.048* (0.025)	-0.015 (0.010)
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua	0.098*** (0.030)	0.007 (0.011)	0.011 (0.008)	-0.104*** (0.022)	-0.000 (0.013)
Konstan	0.329*** (0.051)	0.036* (0.019)	0.044*** (0.016)	0.179*** (0.034)	0.067*** (0.016)
Pengamatan	12,066	12,066	12,066	12,066	12,066
R-kuadrat	0.054	0.010	0.020	0.072	0.022
Rata-rata variabel terikat	0.643	0.0325	0.0267	0.123	0.0143

Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

Lampiran VII (lanjutan). Hasil regresi pada faktor risiko rumah tangga

(b) Hasil estimasi faktor risiko pada hasil kesejahteraan alternatif selama pandemi dan rawan pangan

	Peningkatan biaya	Penurunan pendapatan	Kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi	Menghabiskan lebih banyak di internet	Beberapa Indikasi kerawanan pangan	Kerawanan pangan sedang dan berat	Kerawanan pangan berat
Kasus COVID-19/ 100 populasi	0.125*** (0.045)	0.031 (0.042)	-0.044 (0.035)	0.111*** (0.040)	-0.065 (0.043)	0.008 (0.027)	-0.024* (0.014)
Perubahan mobilitas ke tempat kerja	0.136 (0.217)	-0.058 (0.215)	-0.407** (0.174)	0.222 (0.209)	-0.930*** (0.205)	-0.266** (0.112)	-0.172*** (0.064)
Rumah tangga yang dikepalai perempuan	-0.036 (0.023)	-0.116*** (0.024)	0.039** (0.017)	-0.030 (0.023)	0.020 (0.021)	-0.000 (0.011)	-0.003 (0.006)
Kepala rumah tangga berusia <30	0.078* (0.044)	0.033 (0.044)	0.092*** (0.026)	-0.107** (0.044)	0.067* (0.039)	0.015 (0.018)	0.004 (0.010)
Kepala rumah tangga berusia 30–50	0.030 (0.018)	0.050*** (0.018)	0.011 (0.015)	0.051*** (0.018)	0.067*** (0.018)	0.023** (0.010)	0.010 (0.006)
Kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah	-0.022 (0.019)	0.064*** (0.018)	0.084*** (0.015)	-0.143*** (0.018)	0.033* (0.018)	0.013 (0.010)	0.018*** (0.005)
Kehadiran anak-anak berusia <18	0.123*** (0.019)	0.065*** (0.020)	0.049*** (0.016)	0.360*** (0.019)	0.049*** (0.018)	0.005 (0.010)	-0.010 (0.007)
Kehadiran penyandang disabilitas	-0.022 (0.031)	-0.004 (0.034)	0.052** (0.022)	-0.024 (0.034)	0.055* (0.032)	-0.028** (0.011)	-0.022*** (0.005)
Tinggal di perkotaan	0.010 (0.019)	0.076*** (0.019)	0.035** (0.015)	0.106*** (0.018)	0.100*** (0.018)	0.023** (0.010)	0.003 (0.006)
20% terbawah	-0.107*** (0.030)	0.004 (0.030)	0.149*** (0.025)	-0.109*** (0.029)	0.036 (0.027)	0.001 (0.016)	-0.007 (0.010)
40% Menengah	-0.096*** (0.028)	0.050* (0.028)	0.161*** (0.021)	-0.070*** (0.025)	0.110*** (0.026)	0.037** (0.015)	0.002 (0.009)
60% Menengah	-0.048* (0.027)	0.048* (0.026)	0.130*** (0.022)	-0.037 (0.024)	0.083*** (0.025)	0.031** (0.015)	-0.003 (0.009)
80% Menengah	-0.023 (0.027)	0.012 (0.026)	0.068*** (0.023)	-0.044* (0.023)	0.070*** (0.023)	0.012 (0.013)	-0.006 (0.007)
Jawa dan Bali	-0.087*** (0.026)	0.057** (0.026)	-0.019 (0.018)	-0.003 (0.024)	-0.033 (0.022)	-0.010 (0.012)	-0.003 (0.006)
Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan	-0.094*** (0.031)	0.066** (0.031)	0.023 (0.023)	-0.088*** (0.030)	0.115*** (0.033)	0.030 (0.019)	0.008 (0.010)
Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua	-0.063** (0.030)	0.060** (0.029)	-0.052** (0.026)	-0.077*** (0.029)	0.054** (0.027)	0.030* (0.017)	-0.002 (0.008)
Konstan	0.382*** (0.051)	0.455*** (0.051)	0.521*** (0.043)	0.429*** (0.049)	-0.138*** (0.048)	-0.048* (0.026)	-0.018 (0.016)
Pengamatan	12,066	12,066	12,066	12,066	11.721	11.721	11.721
R-kuadrat	0.034	0.032	0.055	0.182	0.051	0.021	0.011
Rata-rata variabel terikat	0.344	0.681	0.818	0.569	0.292	0.0732	0.0259

Sumber: dihitung dari survei rumah tangga 2020

Lampiran VIII. Ringkasan tentang respons kebijakan pasar tenaga kerja untuk COVID-19 di berbagai negara

Sasaran	Saluran	Tindakan/Dukungan	Negara
Mengurangi paparan pekerja terhadap COVID-19 di tempat kerja	Mengizinkan Bekerja Jarak Jauh	Dukungan keuangan dari pemerintah <ul style="list-style-type: none"> Subsidi untuk biaya pengaturan kerja yang fleksibel 	Jepang dan Korea Selatan
		Dukungan non-finansial dari pemerintah <ul style="list-style-type: none"> Penyederhanaan prosedur Amandemen kode tenaga kerja dalam bekerja jarak jauh Digitalisasi UMKM 	Italia, Rusia, Spanyol
	Standar kesehatan dan keselamatan yang ketat di tempat kerja	Pembatasan operasi bisnis <ul style="list-style-type: none"> Peraturan ketat dalam industri daging Membatasi operasi bisnis hanya untuk bisnis penting 	Jerman, Inggris
		Pedoman sanitasi yang lebih ketat dan penyediaan informasi termasuk kelompok rentan <ul style="list-style-type: none"> Protokol yang direkonstruksi dan diperbarui Praktik kerja yang aman dan penggunaan APD Panduan terbaru tentang kesehatan dan keselamatan pekerja konstruksi 	Italia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Prancis
	Pemberian tunjangan sakit dan cuti berbayar kepada semua pekerja	Perpanjangan/pengumuman cuti sakit untuk memungkinkan pekerja melakukan isolasi mandiri <ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan cuti sakit berbayar untuk mencakup mereka yang dikarantina/dirawat di rumah sakit karena COVID-19 Peningkatan hak cuti sakit berbayar dan perluasan akses ke pekerja wiraswasta 	Korea Selatan dan AS, Prancis, Australia, dan Spanyol
Penyediaan kebutuhan perawatan	Perpanjangan durasi cuti berbayar khusus dan penyediaan sarana untuk layanan perawatan <ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan cuti orang tua (berkisar dari 10 hari per orang tua di Korea Selatan hingga empat bulan di Kanada) Membiarkan fasilitas penitipan anak tetap terbuka untuk pekerja layanan penting 	Korea Selatan, Kanada, Australia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea, Inggris, AS, Prancis, Jerman, Rusia	
Mengamankan pekerjaan, menyelamatkan perusahaan, mempertahankan penyediaan layanan penting	Skema Retensi Pekerjaan (menjaga pekerjaan di perusahaan dengan mengurangi bagian perusahaan dari biaya tenaga kerja sementara untuk menghindari kekurangan likuiditas perusahaan dalam menanggapi komitmen keuangan mereka)	Langsung mensubsidi jam tidak bekerja <ul style="list-style-type: none"> Skema kerja jangka pendek dan pemutusan hubungan kerja sementara 	Jerman, Italia, Prancis, Spanyol
		Subsidi jam kerja atau tingkatkan penghasilan keseluruhan pekerja dengan pengurangan jam	Australia
		Perluas skema STW yang ada <ul style="list-style-type: none"> Menyederhanakan akses dan memperluas cakupan Memperluas cakupan ke pekerja lepas Menaikkan level dukungan 	Brasil, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Turki
Membatasi pemecatan ekonomi dan melindungi pekerja dari pemecatan yang tidak adil		Memperkenalkan pembatasan pada pemecatan kolektif dan individu <ul style="list-style-type: none"> Atas dasar alasan ekonomi Atas dasar kenaikan biaya 	Italia dan Turki Spanyol dan Prancis

Lampiran VIII (lanjutan). Ringkasan tentang respons kebijakan pasar tenaga kerja untuk COVID-19 di berbagai negara

Sasaran	Saluran	Tindakan/Dukungan	Negara
	Dukungan likuiditas untuk perusahaan	<p>Bantuan langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaminan pinjaman Subsidi Langkah-langkah terkait pajak 	Banyak Negara G20
		<p>Bantuan tidak langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> Penangguhan untuk pajak dan kontribusi jaminan sosial Perpanjangan jatuh tempo pinjaman 	Rusia
Memberikan jaminan pendapatan dan dukungan pekerjaan kepada pekerja yang terkena dampak	Bantuan pendapatan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan/penghasilan wiraswasta	<p>Meningkatkan akses ke cakupan tunjangan pengangguran</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengurangi atau sepenuhnya mengabaikan persyaratan kontribusi minimum Perpanjang periode kualifikasi Mencakup wiraswasta atau pekerja rumah tangga 	Spanyol dan AS Prancis dan AS Spanyol, Tiongkok, dan Prancis
		<p>Perpanjang durasi manfaat Pengangguran</p>	Argentina, Jerman, Italia, Luksemburg
		<p>Menaikkan tingkat tunjangan pengangguran</p>	Australia, Rusia, AS, Austria, Inggris
		<p>Memperkenalkan atau memperluas skema bantuan tunai kepada kelompok rentan</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan ukuran kerentanan Berdasarkan kebutuhan khusus Berdasarkan kelompok pekerjaan Transfer tunai tanpa syarat 	Australia, Argentina, Tiongkok, Italia, dan Jerman Inggris dan Brasil Jepang dan Korea Selatan
		<p>Meningkatkan dan melatih kembali tenaga kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Beralih ke pelatihan online Pendanaan tambahan untuk memperkuat pembelajaran jarak jauh dan pendidikan berbasis internet Memberikan insentif untuk pelatihan 	Austria, Belgia, Denmark, Prancis, Thailand, Singapura
	Layanan ketenagakerjaan dan pelatihan pencari kerja dan pekerja	<p>Mendukung pencarian kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat alat online untuk menghubungkan pekerja terlantar dengan lowongan Promosikan platform pencocokan pekerjaan online yang ada 	Prancis dan Jerman, Belanda

Lampiran IX. Daftar pertanyaan

KUESIONER PENILAIAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI PANDEMI COVID-19 TERHADAP RUMAH TANGGA DI INDONESIA

ID RUMAH TANGGA:

Waktu Mulai Wawancara	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
-----------------------	---

ID MODUL. IDENTITAS RUMAH TANGGA

Var	Pertanyaan	Jawaban
ID1	Provinsi	Pramuat
ID2	Kabupaten/Kota	Pramuat
ID3	Kecamatan	Pramuat
ID4	Desa/Kelurahan (kelurahan adalah wilayah administrasi setingkat desa yang terletak di pusat kota)	Pramuat
ID5	Kategori Desa/Kelurahan	Pramuat
ID6	Nomor Blok Sensus	Pramuat
ID7	Contoh Nomor Kode	Pramuat
ID8	Kode Enumerator	Pramuat
ID9	Kode Pengawas	Pramuat
ID10	Tanggal kunjungan wawancara	[format: HH/BB/2020]
ID11	Nama lengkap kepala rumah tangga	
ID12	Apakah rumah tangga ditemukan?	1. Ya 2. Tidak → MODUL J
ID13	Apakah rumah tangga bersedia untuk diwawancarai?	1. Ya 2. Tidak → MODUL J

PENDAHULUAN

Perkenalkan, Nama saya _____. Saat ini saya ditugaskan oleh DTS Indonesia yang ditunjuk oleh UNICEF, UNDP dan PROSPERA untuk melakukan pendataan dampak sosial ekonomi pandemi COVID-19 terhadap rumah tangga di Indonesia. Survei ini dilakukan di 310 kabupaten/kota di 34 provinsi di Indonesia. Semua data dan informasi yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Terima kasih atas partisipasi dan kesediaan Anda untuk mengikuti survei ini.

Apakah Anda bersedia untuk diwawancarai?

- Ya, **SILAKAN LANJUTKAN WAWANCARA**
- Tidak

MODUL A. INFORMASI DASAR

Var	Pertanyaan	Jawaban
A1	Nama lengkap kepala rumah tangga	Pramuat berdasarkan daftar sebelumnya
A_Ch eck_1	CATATAN PEWAWANCARA: APAKAH NAMA KEPALA RUMAH TANGGA SAMA DENGAN YANG DI DAFTAR CONTOH?	1. Ya → A4 2. Tidak

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Jawaban
A2	Apa alasan pergantian kepala rumah tangga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian 2. Perceraian 3. Migrasi 4. Lain-lain
A3	Nama lengkap kepala rumah tangga saat ini	
A4	Nama lengkap responden	
A5	Alamat lengkap rumah tangga <i>Nama Komplek Perumahan/Jalan/Gang, Rukun Komplek/Lingkungan, nomor rumah</i>	
A6	Adakah nomor telepon rumah, atau nomor ponsel anggota rumah tangga yang bisa kami hubungi? <i>KOLOM YANG HARUS DIISI sebagai tim peneliti perlu menghubungi nomor tersebut selama survei pemantauan.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="text"/> Nama Pemilik: 96. NIHIL → MODUL J
A7	Apakah ada nomor telepon lain milik ART atau kerabat dekat/tetangga yang bisa kami hubungi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="text"/> Nama Pemilik: 96. NIHIL

MODUL B. UMUM

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
B1	Apa hubungan Anda dengan kepala rumah tangga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya adalah kepala rumah tangga ini 2. Suami/istri 3. Anak/anak tiri/anak angkat 4. Menantu 5. Cucu 6. Ibu/ayah atau ibu-/ayah mertua 95. Anggota rumah tangga lainnya
B2	Pertama-tama, saya ingin bertanya tentang kepala rumah tangga ini. Apakah kepala rumah tangga pria atau wanita?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pria 2. Wanita
B3	Berapa usianya? <i>Enumerator dapat menyelidiki dari tanggal lahir kepala rumah tangga</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <input type="text"/> tahun 8. Tidak tahu
B4	Apa tingkat pendidikan tertinggi yang diselesaikan oleh kepala rumah tangga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. 2. Sekolah dasar atau pendidikan sederajat (MI/Paket A) 3. Sekolah Menengah Pertama atau pendidikan yang sederajat (MTs/Paket B) 4. SMA atau pendidikan sederajat (SMK/MA/Paket C) 5. Gelar Diploma (D1/D2/D3/D4) 6. Gelar S1/S2/S3/profesi 8. Tidak tahu
B5	Bagaimana status perkawinan kepala rumah tangga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menikah 2. Janda/Duda 3. Bercerai 4. Lajang
B6	Jika responden bukan kepala rumah tangga [B1#1], Apakah responden pria atau wanita?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pria 2. Wanita

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
B7	Berapa orang yang tinggal di rumah Anda?	____ orang
B8	Berapa banyak anggota rumah tangga Anda yang memiliki kondisi berikut?	
	a. Lebih dari 60 tahun	____ orang
	b. Ibu hamil	____ orang
	c. Memiliki riwayat penyakit kronis, seperti: diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kanker	1. ____ orang 98. Tidak tahu
	d. Memiliki penyakit menular yang memerlukan pengobatan rutin, seperti TBC, HIV/AIDS, dan Pneumonia	1. ____ orang 98. Tidak tahu
	e. Bekerja sebagai tenaga medis atau bekerja di fasilitas layanan kesehatan	____ orang
	f. Memiliki pekerjaan di luar rumah atau berinteraksi dengan banyak orang	____ orang
B_Ch eck_1	CATATAN PEWAWANCARA: PERIKSA ULANG BAHWA JUMLAH JAWABAN SETIAP ITEM DI B8 TIDAK LEBIH DARI JAWABAN DI B7	
B9	Sejak April 2020, apakah ada orang yang positif COVID-19 di sekitar rumah Anda (<i>RT/unit masyarakat terkecil</i>)?	1. Ya, di sekitar rumah ini 2. Tidak ada 8. Tidak tahu
B10	Apa dampak terbesar dari pandemi COVID-19 pada rumah tangga Anda?	1. Kehilangan pekerjaan/penghasilan berkurang 2. Peningkatan beban kerja dan pekerjaan rumah tangga 3. Gangguan kondisi kesehatan fisik 4. Gangguan kesehatan mental (stres) 5. Terganggunya pendidikan anak 6. Kesulitan mengakses layanan kesehatan, termasuk tumbuh kembang anak 7. Kesulitan dalam mengakses layanan publik lainnya 8. Kehilangan anggota keluarga 95. Lain-lain 96. Nihil
B11	Sejak April 2020, siapa yang paling banyak melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan merawat anak-anak dan orang tua? <i>Pastikan jenis kelaminnya.</i>	1. Kepala rumah tangga 2. Istri/suami kepala rumah tangga 3. Anak atau menantu laki-laki kepala rumah tangga 4. Anak atau menantu perempuan kepala rumah tangga 5. Ayah atau ayah mertua dari kepala rumah tangga 6. Ibu atau ibu mertua kepala rumah tangga 7. Anggota rumah tangga lainnya 8. Dibagi rata di antara semua anggota rumah tangga 9. Pembantu/asisten rumah tangga 96. Lainnya/bukan anggota rumah tangga ini
B12	Menurut Anda, siapa yang harus melakukan lebih banyak pekerjaan rumah tangga itu? <i>Pastikan jenis kelaminnya.</i>	1. Kepala rumah tangga 2. Istri/suami kepala rumah tangga 3. Anak atau menantu laki-laki kepala rumah tangga 4. Anak atau menantu perempuan kepala rumah tangga 5. Ayah atau ayah mertua dari kepala rumah tangga 6. Ayah atau ibu mertua dari kepala rumah tangga

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		7. Anggota rumah tangga lainnya 8. Dibagi rata di antara semua anggota rumah tangga 9. Pembantu/asisten rumah tangga 96. Lainnya/bukan anggota rumah tangga ini
B13	Sejak April 2020, secara umum, bagaimana keputusan tentang siapa yang melakukan pekerjaan rumah tangga (seperti memasak, mencuci, dan merawat anak-anak/orang tua)?	1. Diputuskan bersama oleh semua anggota rumah tangga 2. Diputuskan oleh kepala rumah tangga dan pasangannya 3. Diputuskan oleh kepala rumah tangga sendiri 4. Diputuskan oleh pasangan kepala rumah tangga saja 5. Diputuskan oleh anggota yang lebih tua di rumah tangga
B14	Sejak April 2020, apakah ada perbedaan waktu yang Anda habiskan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Pertanyaan ditujukan kepada responden saja.</i>	1. Menghabiskan lebih banyak waktu dari sebelumnya 2. Waktu yang dihabiskan sama saja. 3. Menghabiskan lebih sedikit waktu dari sebelumnya 96. Tidak relevan (bukan bagian dari tanggung jawab saya)
B15	Sejak April 2020, apakah anggota rumah tangga di rumah ini sudah menggunakan internet, termasuk mengaksesnya dari ponsel? Jika ya, apakah ada perbedaan intensitas penggunaan? (frekuensi, durasi, kuota internet) dibandingkan sebelum April 2020?	1. Ya, baru mulai menggunakannya 2. Ya, sering menggunakan 3. Ya, tapi tidak ada bedanya 4. Ya, jarang menggunakan 96. Tidak pernah menggunakan internet

MODUL C. BANTUAN SOSIAL

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
C1	Apakah rumah tangga ini telah menerima program bantuan sosial berikut dari pemerintah?	
	a. Bantuan tunai sejak April 2020 <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawabannya bisa lebih dari satu</i>	A. Menerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) B. Menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Non-Jabodetabek C. Menerima Bantuan Langsung Tunai Usaha Mikro dan Kecil: Banpres Produktif Usaha Mikro/BPUM (BLT-UMKM) D. Menerima transfer tunai tetapi tidak tahu program apa W. Tidak menerima transfer tunai
	b. Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Ya, sudah diterima sejak sebelum April 2020 2. Ya, sudah diterima sejak April 2020 3. Tidak
	c. Subsidi upah bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang berpenghasilan kurang dari Rp 5.000.000 per bulan	1. Ya 2. Tidak 96. Tidak relevan karena tidak ada anggota rumah tangga yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
	d. Kartu Prakerja	1. Ya 2. Tidak, tapi sudah melamarnya 3. Tidak menerima dan tidak melamar
C_Check_1	CATATAN PEWAWANCARA: APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA BANTUAN TUNAI? Persyaratan: setidaknya satu pertanyaan C1 adalah menjawab "Ya"	1. Ya 2. Tidak → C3

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
C2	<p>Jika rumah tangga menerima bantuan tunai karena pandemi COVID-19, untuk apa sebagian besar pengeluaran Anda?</p> <p><i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i></p> <p><i>Tidak termasuk Program Indonesia Pintar/PIP</i></p>	<p>A. Bahan makanan dan pengeluaran sehari-hari</p> <p>B. Keperluan</p> <p>C. Pulsa atau paket internet</p> <p>D. Biaya transportasi</p> <p>E. Biaya kesehatan</p> <p>F. Biaya pendidikan</p> <p>G. Pembayaran sewa rumah atau kamar</p> <p>H. Sumbangan atau pengeluaran amal</p> <p>I. Uang benih</p> <p>J. Angsuran atau pelunasan utang</p>
C3	<p>Sejak April 2020, apakah rumah tangga ini telah menerima program bansos berikut dari pemerintah?</p>	
	a. Bantuan sembako	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p>
	b. Bantuan paket internet dari pemerintah/sekolah/lembaga pendidikan	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p> <p>96. Tidak relevan</p>
	c. Pengurangan pajak penghasilan atau bisnis	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p> <p>96. Tidak relevan</p>
	d. Penundaan angsuran	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak digunakan atau tidak menerima meskipun dalam skema cicilan</p> <p>96. Tidak relevan</p>
C4	<p>Tidak digunakan atau tidak menerima meskipun dalam skema cicilan (Perusahaan Listrik Negara) listrik di rumah ini?</p>	<p>1. 450 watt</p> <p>2. 900 watt</p> <p>3. 1.300 watt → C_Check2</p> <p>4. 2.200 watt → C_Check2</p> <p>5. Lebih dari 2.200 watt → C_Check2</p> <p>6. Tidak memiliki meteran listrik/menggunakan listrik tetangga → C_Check2</p> <p>7. Tidak menggunakan listrik dari PLN/tidak ada listrik di rumah ini → C_Check2</p>
C5	<p>Jika memiliki listrik 450 watt atau 900 watt [C4=1,2], sejak April 2020, apakah rumah tangga ini mendapatkan listrik gratis atau diskon tagihan listrik?</p>	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p> <p>8. Tidak tahu</p>
C_Check_2	<p>CATATAN PEWAWANCARA: APAKAH RUMAH TANGGA MENERIMA BANTUAN SOSIAL ATAU BANTUAN EKSTERNAL?</p> <p>Persyaratan: setidaknya satu pertanyaan C1 atau C3 atau C5 dijawab "Ya"</p>	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p>
C6	<p>Menurut Anda, bagaimana penyaluran bantuan sosial (tunai atau paket sembako) di lingkungan Anda?</p>	<p>1. Sangat adil</p> <p>2. Cukup adil</p> <p>3. Tidak terlalu adil → C6_2</p> <p>4. Tidak adil → C6_2</p> <p>5. Mengetahui informasi mengenai bantuan sosial yang disalurkan di lingkungan sekitar, tetapi tidak mengetahui proses pencairannya → C7</p> <p>6. Tidak pernah mendengar adanya pencairan bantuan sosial → C7</p>

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
C6_1	Mengapa menurut Anda hal tersebut sudah adil? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Petugas Rukun Tetangga (RT ¹ /RW ²) mengadakan rapat B. Petugas Rukun Tetangga (RT/RW) memeriksa kondisi masing-masing keluarga C. Keluarga miskin mendapatkan bantuan D. Bantuan yang tersedia didistribusikan secara adil V. Lainnya Apa pun jawabannya, → C7
C6_2	Mengapa menurut Anda hal tersebut tidak adil? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Sistemnya adil, tetapi jumlah/stok bantuan sosial terbatas B. Petugas Rukun Tetangga memprioritaskan keluarga mereka C. Terdapat keluarga miskin yang tidak menerima bantuan D. Data tidak diperbarui E. Bantuan yang tersedia didistribusikan secara merata F. Orang yang sama menerima beberapa/banyak program bantuan V. Lainnya
C7	Apakah Anda merasa bahwa rumah tangga Anda saat ini membutuhkan bantuan dari pemerintah?	1. Ya 2. Tidak → C9
C8	Jika menurut Anda memang perlu [C7=1], bantuan apa yang paling dibutuhkan rumah tangga Anda??	1. Uang 2. Sembako 3. Diskon tagihan listrik 4. Penundaan angsuran 5. Bantuan modal usaha 6. Pengurangan biaya Pendidikan/bentuk bantuan lain untuk biaya pendidikan 7. Subsidi pulsa atau paket internet 8. Peralatan/layanan kesehatan 9. Lainnya
C9	Sejak bulan April 2020, apakah rumah tangga Anda menerima bantuan dari keluarga besar atau tetangga Anda? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Ya, berupa uang B. Ya, berupa sembako atau kebutuhan pokok sehari-hari C. Ya, berupa layanan D. Ya, berupa barang lainnya W. Tidak
C10	Sejak bulan April 2020, apakah rumah tangga Anda menerima bantuan dari korporasi, organisasi amal, atau LSM? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban bisa lebih dari satu.</i>	A. Ya, berupa uang B. Ya, berupa sembako C. Ya, berupa layanan D. Ya, berupa alat kesehatan healthcare E. Ya, berupa barang lainnya W. Tidak
C_Check_3	CATATAN PEWAWANCARA APAKAH JAWABAN PADA C_Check_2, JAWABAN= 1? Pemeriksaan ulang:	1. Ya 2. Tidak → MODUL D

¹Rukun tetangga adalah satuan terkecil pemerintahan daerah yang terdiri atas beberapa rumah tangga.

²Rukun warga, satuan pemerintahan daerah yang terdiri dari beberapa RT (rukun tetangga) dalam satu kelurahan.

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
	<ul style="list-style-type: none"> - Jika C_CHECK2=1, DAN C9=W DAN C10=W → HANYA MENYEDIKAN OPSI 5&6 - Jika C_CHECK2=2, DAN C9≠W ATAU C10≠W → HANYA MENYEDIKAN OPSI 7&8 - Jika C_CHECK2=1, DAN C9≠W ATAU C10≠W → MENYEDIKAN SEMUA OPSI (1-4) 	
C11	Seberapa membantu bantuan dari pemerintah atau pihak lain dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Anda?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat bantuan dari keduanya, tetapi bantuan pemerintah lebih membantu 2. Mendapat bantuan dari keduanya, tetapi bantuan dari lembaga swadaya masyarakat lebih membantu 3. Menerima bantuan dari keduanya dan sama-sama membantu 4. Menerima bantuan dari keduanya dan tidak ada yang membantu 5. Hanya menerima bantuan pemerintah dan sangat membantu 6. Hanya menerima bantuan pemerintah tetapi tidak membantu 7. Hanya menerima bantuan dari pihak lain dan sangat membantu 8. Hanya menerima bantuan dari pihak lain tetapi tidak membantu

MODUL D. KONSUMSI DAN KEUANGAN RUMAH TANGGA

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
D1	Dalam seminggu terakhir, apa yang paling sering menentukan jenis makanan yang akan dimakan/dimasak setiap hari?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nafsu makan kepala rumah tangga 2. Nafsu makan orang dewasa lain dalam rumah tangga 3. Nafsu makan anak-anak dalam rumah tangga 4. Selera makan setiap anggota keluarga (memasak berbagai jenis makanan) 5. Apa yang tersedia di rumah pada hari tersebut 6. Apa yang dijual di pasar/oleh pedagang 7. Kecukupan uang sembako 95. Lainnya
D2	Selanjutnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan mengenai akses pangan dalam periode bulan April hingga Oktober 2020.	
	a. Sejak bulan April 2020, pernahkah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga mengkhawatirkan kecukupan persediaan makanan/bahan makanan karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
	b. Sejak bulan April 2020, pernahkah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga sampai tidak bisa makan makanan sehat dan bergizi karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
	c. Sejak bulan April 2020, apakah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga makan dengan menu yang itu-itu saja karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
	d. Sejak bulan April 2020, apakah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga tidak makan pada hari tertentu karena kekurangan uang atau sumber daya lain untuk mendapatkan makanan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
	e. Sejak bulan April 2020, apakah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga pernah makan dengan porsi yang lebih sedikit dari biasanya karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
	f. Sejak bulan April 2020, apakah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga pernah kehabisan persediaan makanan atau bahan makanan karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
	g. Sejak bulan April 2020, apakah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga pernah pernah merasa lapar tetapi tidak makan karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
	h. Sejak bulan April 2020, apakah Anda atau anggota lain dalam rumah tangga pernah tidak makan sehari-hari penuh karena kekurangan uang atau sumber daya lainnya?	1. Ya, karena pandemi COVID-19 2. Ya, karena alasan lain 3. Tidak 8. Tidak tahu 97. Tidak mau menjawab
D3	Berapa pengeluaran rumah tangga Anda untuk kebutuhan makan dalam seminggu terakhir? <i>Tim enumerator harus menyelidiki pengeluaran untuk makanan harian/mingguan rumah tangga. Tim enumerator bisa mulai menyelidiki dengan menyebutkan kisaran nilai, kemudian bertanya kepada responden tentang nilai nominal yang tepat.</i>	1. Rp <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 997. Tidak mau menjawab 998. Tidak Tahu
D4	Berapa pengeluaran rumah tangga Anda untuk kebutuhan non-makanan dalam sebulan terakhir? <i>Tim enumerator harus menyelidiki pengeluaran sehari-hari rumah tangga untuk kebutuhan selain makanan, seperti kebutuhan bayi, komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial, sumbangan, dan lain-lain.</i>	1. Rp <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 997. Tidak mau menjawab 998. Tidak Tahu
D5	Sejak bulan April 2020, apakah rata-rata pengeluaran rumah tangga Anda berubah jika dibandingkan dengan bulan Januari?	1. Pengeluaran saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Januari 2. Pengeluaran saat ini sama atau tidak berubah dibandingkan dengan bulan Januari → D8 3. Pengeluaran saat ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan Januari → D7
D6	Sejak bulan April 2020, pengeluaran rumah tangga Anda mana yang meningkat atau lebih tinggi dari biasanya? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Biaya sembako dan kebutuhan sehari-hari B. Biaya utilitas C. Biaya pulsa atau paket internet D. Biaya transportasi E. Biaya kesehatan F. Biaya pendidikan G. Pembayaran sewa rumah atau kamar H. Sumbangan atau pengeluaran amal I. Uang benih J. Angsuran atau pelunasan utang V. Lainnya Apa pun jawabannya, → D8
D7	Sejak bulan April 2020, pengeluaran rumah tangga Anda mana yang mengalami penurunan atau semakin sedikit dari biasanya?	A. Biaya sembako dan kebutuhan sehari-hari B. Biaya utilitas

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
	<i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	C. Biaya pulsa atau paket internet D. Biaya transportasi E. Biaya kesehatan F. Biaya pendidikan G. Pembayaran sewa rumah atau kamar H. Sumbangan atau pengeluaran amal I. Uang benih J. Angsuran atau pelunasan utang V. Lainnya
D8	Sejak bulan April 2020, dari mana sumber pendapatan rumah tangga Anda? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Keuntungan operasi bisnis, termasuk pendapatan dari bertani B. Gaji, upah, atau tunjangan C. Uang pensiun → D12 D. Bantuan keuangan dari kerabat → D12 E. Bantuan langsung tunai dari pemerintah → D12 F. Bantuan langsung tunai dari donatur atau LSM → D12 G. Uang beasiswa → D12 H. Keuntungan investasi → D12 I. Lainnya → D12 W. Tidak ada pemasukan sama sekali → D12
D9	Sejak bulan April 2020, apakah pendapatan rata-rata rumah tangga Anda dari bekerja atau berbisnis berubah jika dibandingkan dengan bulan Januari?	1. Pendapatan saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Januari 2. Penghasilan saat ini sama atau tidak berubah dibandingkan dengan Januari → D11 3. Pendapatan saat ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan Januari
D10	Jika pendapatan rumah tangga Anda yang berasal dari hasil bekerja atau berbisnis berubah, berapa persentase rata-rata perubahannya? <i>Tim enumerator harus menyelidiki perubahan pendapatan dari nilai nominal pendapatan bulan Januari dan pendapatan rata-rata dari bulan April hingga saat ini.</i>	1. <input type="text"/> % 997. Tidak mau menjawab 998. Tidak Tahu
D11	Dalam sebulan terakhir, berapa total pendapatan bersih yang berasal dari hasil bekerja atau berbisnis yang didapatkan oleh semua anggota rumah tangga? <i>Tim enumerator dapat mulai menyelidikinya dari sisaran nilai, kemudian menanyakan kepada responden nilai nominal yang tepat.</i>	1. Rp <input type="text"/> 997. Tidak mau menjawab 998. Tidak Tahu
D12	Sejak bulan April 2020, apa yang dilakukan anggota rumah tangga Anda untuk memenuhi kebutuhan hidup? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Meminjam uang dari kerabat atau teman B. Meminjam uang dari bank atau rentenir C. Mencari pekerjaan sampingan D. Mempersiapkan/mendirikan bisnis baru E. Mencari/memohon bantuan dari pemerintah F. Mencari/memohon bantuan dari pihak swadaya masyarakat G. Menggunakan pesangon atau tabungan yang dimiliki H. Mengubah alokasi konsumsi I. Mengurangi pengeluaran makanan J. Mengurangi pengeluaran non-makanan K. Menjual atau menggadaikan barang-barang L. Bukan dari salah satu dari yang tersebut di atas W. Tidak berlaku karena kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi
D_CH ECK_ 1	CATATAN PEWAWANCARA Apakah rumah tangga mengubah alokasi konsumsi atau mengurangi pengeluaran untuk makanan (D12==H,I)?	1. Ya 2. Tidak → D14

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		3. Tidak relevan (tidak menjawab H, I di D12) → D14
D13	Dalam seminggu terakhir, apakah rumah tangga Anda mengonsumsi:	
	a. Makanan pokok (seperti nasi, mie, roti, singkong, sereal, sagu, ubi, jagung)	1. Ya 2. Tidak
	b. Kacang-kacangan (termasuk tempe dan tahu)	1. Ya 2. Tidak
	c. Ikan, cumi, udang, hasil laut, tetapi tidak termasuk ikan asin	1. Ya 2. Tidak
	d. Ayam, bebek, unggas	1. Ya 2. Tidak
	e. Daging merah (seperti daging sapi, kambing, kuda, kerbau, rusa, atau babi)	1. Ya 2. Tidak
	f. Telur	1. Ya 2. Tidak
	g. Susu dan produk susu (seperti keju dan yogurt)	1. Ya 2. Tidak
	h. Sayuran	1. Ya 2. Tidak
	i. Buah-buahan	1. Ya 2. Tidak
D14	Apakah rumah tangga Anda memiliki tabungan atau aset likuid yang cukup untuk menghidupi rumah tangga saat ini?	1. Ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya selama lebih dari 6 bulan 2. Ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya selama 4 hingga 6 bulan 3. Ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya selama 1 hingga 3 bulan 4. Ya, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya selama kurang dari satu bulan 5. Tidak
D15	Saat ini, apakah rumah tangga Anda memiliki barang-barang berikut?	
	a. Tabung gas dengan kapasitas 5,5 kg atau lebih tinggi	1. Ya 2. Tidak
	b. Kulkas	1. Ya 2. Tidak
	c. Pendingin ruangan (AC)	1. Ya 2. Tidak
	d. Ponsel pintar	1. Ya 2. Tidak
	e. Komputer atau laptop	1. Ya 2. Tidak
	f. Emas atau perhiasan dengan berat minimal 10 gram	1. Ya 2. Tidak
	g. Sepeda motor	1. Ya 3. Tidak
	h. Mobil	1. Ya 2. Tidak
	i. Televisi layar datar dengan lebar minimal 30 inci	1. Ya 2. Tidak
	j. Lahan pertanian atau tanah, termasuk lahan dengan bangunan rumah di atasnya	1. Ya 2. Tidak
	k. Rumah milik sendiri	1. Ya 2. Tidak
	l. Ternak yang bisa dijual <i>Ayam/ikan/sapi/kambing/kerbau/babi</i>	1. Ya 2. Tidak
D16	Sejak bulan April 2020, apakah Anda pernah menjual atau menggadaikan aset berikut demi memenuhi kebutuhan hidup?	

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
	a. Perhiasan	1. Ya 2. Tidak 96. Tidak berlaku
	b. Kendaraan	1. Ya 2. Tidak 96. Tidak berlaku
	c. Peralatan elektronik rumah tangga	1. Ya 2. Tidak 96. Tidak berlaku
	d. Rumah atau tanah	1. Ya 2. Tidak 96. Tidak berlaku
	e. Hasil ternak <i>Pastikan bahwa ternak tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan karena Idul Adha atau upacara lainnya</i>	1. Ya 2. Tidak 96. Tidak berlaku
D17	Sebelum bulan April 2020, apakah ada anggota rumah tangga Anda yang berutang atau mengambil pinjaman non-komersial dan, sejak saat itu, melakukan pelunasan hutang/pinjaman dengan cara mencicil hingga sekarang? Utang atau pinjaman untuk tujuan konsumtif; tidak termasuk pinjaman komersial.	1. Ya, dan telah membayar cicilan secara teratur 2. Ya, tetapi tidak dapat membayar cicilan 3. Ya, dan utang atau pinjaman tersebut tengah ditangguhkan sementara 4. Tidak memiliki utang yang dimulai sebelum bulan April
D18	Sejak bulan April 2020, apakah ada anggota rumah tangga Anda yang baru berutang atau mengambil pinjaman non-komersial baru? Utang atau pinjaman untuk tujuan konsumtif; tidak termasuk pinjaman komersial.	1. Ya, dan telah membayar cicilan secara teratur 2. Ya, tetapi tidak dapat membayar cicilan 3. Ya, dan utang atau pinjaman tersebut tengah ditangguhkan sementara 4. Tidak memiliki utang yang dimulai sejak bulan April

MODUL E. ANAK DAN PENDIDIKAN (Anak = anggota rumah tangga di bawah usia 18 tahun)

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
E1	Berapa banyak anggota rumah tangga Anda yang merupakan anak dengan usia antara 13 hingga 17 tahun?	<input type="text"/> anak
E2	Berapa banyak anggota rumah tangga Anda yang merupakan anak dengan usia antara 5 hingga 12 tahun?	<input type="text"/> anak
E3	Berapa banyak anggota rumah tangga Anda yang merupakan anak dengan usia antara 0 hingga 4 tahun?	<input type="text"/> anak
E_Check_1	CATATAN PEWAWANCARA APAKAH RUMAH TANGGA INI MEMILIKI ANAK DENGAN USIA 0-4?	1. Ya 2. Tidak → E_Check_2
E4	Jika terdapat anak dengan usia kurang dari 5 tahun, Dalam sebulan terakhir, apakah anak dalam rumah tangga Anda telah makan secara teratur seperti anggota rumah tangga lainnya?	1. Ya, sama seperti anggota rumah tangga lainnya → E_Check_2 2. Tidak
E5	Jika konsumsi anak berbeda dengan anggota rumah tangga lainnya [E4=2], apa alasannya? Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.	A. Anak lebih banyak mengonsumsi protein hewani B. Anak lebih banyak mengonsumsi sayuran C. Anak lebih banyak mengonsumsi buah-buahan D. Anak hanya menyukai jenis makanan tertentu E. Anak memiliki alergi F. Anak berusia kurang dari 6 bulan atau belum mengonsumsi makanan pengganti air susu ibu (MPASI)

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
		V. Lainnya
E_Check_2	CAPI: JIKA E1+E2+E3=0 MAKA LANJUTKAN KE E16	
E6	Sejak bulan April 2020, siapa yang <u>biasanya</u> merawat anak-anak dan menemani atau membantu mereka belajar? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Ayah dari anak-anak B. Ibu dari anak-anak C. Kakak laki-laki/perempuan dari anak-anak D. Laki-laki dewasa lainnya dari anggota rumah tangga E. Perempuan dewasa lainnya dari anggota rumah tangga F. Kerabat/tetangga yang tidak termasuk dalam rumah tangga ini G. Anak-anak belajar sendiri/tanpa pendamping V. Lainnya W. Tidak relevan (tidak terdapat anak yang sekolah)
E7	Sejak bulan April 2020, apa tiga kekhawatiran utama Anda mengenai kehidupan anak-anak di rumah tangga ini?	A. Anak-anak tidak bisa bermain di luar rumah B. Proses belajar anak terganggu C. Anak-anak terganggu secara emosional D. Konsumsi makanan anak-anak kurang dari biasanya/tidak bisa makan secara teratur E. Anak-anak mudah sakit F. Anak-anak terinfeksi COVID-19 G. Anak-anak terlalu banyak bermain dengan ponsel atau menonton TV H. Anak-anak kurang aktivitas fisik I. Anak-anak kurang bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman sebayanya V. Lainnya W. Tidak ada
E8	Sejak bulan April 2020, secara umum, perubahan perilaku seperti apa yang ditunjukkan anak-anak?	A. Menjadi lebih sering marah atau memberontak B. Menjadi lebih sering sedih atau murung C. Merasa lebih sulit berkonsentrasi D. Merasa lebih sulit makan E. Merasa lebih sulit tidur F. Menjadi lebih malas W. Tidak berubah
E9	Apakah terdapat anak dalam rumah tangga ini yang sedang bersekolah di tingkat SD, SMP, atau SMA pada tahun 2020/2021?	A. Ya, SD atau pendidikan sederajat (MI/Paket A) <input type="checkbox"/> anak B. Ya, SMP atau pendidikan sederajat (MTs/Paket B) <input type="checkbox"/> anak C. Ya, SMA atau sederajat (SMK/MA/Paket C) <input type="checkbox"/> anak D. Tidak ada → E14
E10	Sejak diterapkannya pembelajaran dari rumah, apa saja kendala yang dihadapi anggota rumah tangga Anda? <i>Merujuk pada anak-anak dan anggota rumah tangga lainnya. Pilihan jawaban</i>	A. Tidak memiliki perangkat yang diperlukan B. Harus bergiliran menggunakan perangkat yang diperlukan di rumah C. Keterbatasan akses internet (baik paket data maupun jaringan/sinyal internet) D. Kondisi rumah/sekitar tidak kondusif untuk kegiatan belajar

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
	<i>dapat dibacakan kepada responden untuk tujuan menyelidik Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	E. Anak jadi kurang termotivasi untuk belajar F. Keterbatasan waktu orang tua untuk mendampingi/mengajari anak G. Keterbatasan kapasitas orang tua untuk mengajari anak-anak H. Tidak ada masalah → E12 W. Tidak relevan (tidak belajar dari rumah, sudah melanjutkan belajar tatap muka) → E12
E11	Jika rumah tangga menghadapi kendala [E10 ≠ H,W], apa yang telah dilakukan orang tua untuk mengatasi kendala tersebut? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Membeli ponsel pintar atau laptop B. Meminjam perangkat yang diperlukan dari kerabat/tetangga C. Berlangganan ke penyedia Wi-Fi atau internet kabel D. Mengajak anak belajar di tempat lain yang memiliki akses internet E. Mendampingi atau membantu anak belajar F. Membuat kesepakatan dengan anak, misalnya seperti yang terkait dengan hadiah, waktu bermain yang ditentukan sebelumnya, atau rutinitas yang dijadwalkan G. Menegur atau memukul anak, atau mencubit telinga mereka H. Memberitahu anak-anak apa yang harus dilakukan I. Berkomunikasi atau berkonsultasi dengan guru J. Membayar guru untuk datang dan mengajari anak-anak di rumah atau mencari anak-anak tempat kursus untuk pelajaran tambahan W. Tidak ada
E12	Apakah rumah tangga mengalami kesulitan terkait biaya pendidikan anak, termasuk biaya sekolah, buku, perangkat belajar, dan pulsa?	1. Ya 2. Tidak → E14
E13	Jika mengalami kesulitan terkait biaya pendidikan anak [E12 = 1], langkah apa yang dilakukan rumah tangga Anda? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Menyesuaikan alokasi dana untuk pengeluaran lain/menghemat B. Mengajukan permohonan keringanan biaya sekolah C. Meminta bantuan dari pihak sekolah D. Menyekolahkan anak-anak ke sekolah lain E. Menyekolahkan anak-anak di rumah F. Menyuruh anak laki-laki berhenti sekolah G. Menyuruh gadis-gadis berhenti sekolah H. Meminjam uang atau meminta bantuan keuangan dari kerabat I. Meminjam uang dari pihak non-keluarga J. Mencari penghasilan tambahan K. Menggadaikan atau menjual aset/barang yang dimiliki
E14	Apakah ada anak dari rumah tangga ini yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SD, SMP, atau SMA pada tahun akademik 2020/2021 ini?	A. Ya, anak laki-laki B. Ya, anak perempuan C. Tidak → E16
E15	Jika terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran ini [E14 = A,B], apa penyebabnya? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Terlalu muda atau tidak mendapatkan kesempatan menjadi siswa baru karena sistem zonasi berdasarkan usia B. Disabilitas/menderita penyakit C. Gagal mencapai nilai kelulusan yang dipersyaratkan D. Tidak terdapat sekolah di sekitar lingkungan tempat tinggal/sekolah yang tersedia terlalu jauh dari rumah E. Tidak mampu membayar uang sekolah F. Khawatir tentang kemungkinan infeksi COVID-19

Lampiran IX (Lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
		G. Merasa sulit untuk mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh H. Bekerja I. Menganggap bahwa perlu melakukan tugas/bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga J. Menikah K. Mengalami perundungan L. Tidak tertarik untuk sekolah atau tidak menganggap pendidikan sebagai hal yang penting
E16	Jika terdapat rumah tangga di lingkungan Anda yang menghadapi dampak pandemi COVID-19, kehilangan penghasilan, apakah mereka biasa melakukan hal-hal berikut?	
	a. Meninggalkan anak mereka dalam perawatan kerabat yang lebih mampu	1. Ya, untuk anak laki-laki 2. Ya, untuk anak perempuan 3. Ya, untuk anak laki-laki dan perempuan 4. Tidak 8. Tidak tahu
	b. Menyekolahkan anak mereka di pesantren atau lembaga pendidikan informal lainnya	1. Ya, untuk anak laki-laki 2. Ya, untuk anak perempuan 3. Ya, untuk anak laki-laki dan perempuan 4. Tidak 8. Tidak tahu
	c. Meninggalkan anak mereka di panti asuhan	1. Ya, untuk anak laki-laki 2. Ya, untuk anak perempuan 3. Ya, untuk anak laki-laki dan perempuan 4. Tidak 8. Tidak tahu
	d. Menyuruh anak mereka bekerja	1. Ya, untuk anak laki-laki 2. Ya, untuk anak perempuan 3. Ya, untuk anak laki-laki dan perempuan 4. Tidak 8. Tidak tahu
	e. Menikahkan anak mereka	1. Ya, untuk anak laki-laki 2. Ya, untuk anak perempuan 3. Ya, untuk anak laki-laki dan perempuan 4. Tidak 8. Tidak tahu

MODUL F. KESEHATAN

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
F1	Sejak bulan April 2020, apakah ada anggota rumah tangga Anda yang mengunjungi/mengakses fasilitas kesehatan, seperti <i>posyandu</i> (pos pelayanan terpadu), <i>puskesmas</i> (pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit, dan klinik atau dikunjungi oleh petugas kesehatan?	1. Ya 2. Tidak → F4
F2	Jika salah satu anggota rumah tangga Anda pernah mengakses fasilitas kesehatan [F1 = 1], fasilitas apa yang dikunjungi? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Rumah sakit umum B. Rumah Sakit swasta C. Praktek swasta (dokter/bidan) D. Klinik/praktik umum E. <i>Puskesmas or pustu</i> (puskesmas pembantu) F. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat/UKBM (<i>poskesdes</i> or pos kesehatan desa, <i>polindes</i> or pondok bersalin desa, <i>posyandu</i> , dan balai pengobatan) G. Klinik pengobatan tradisional, <i>mantri</i> (asisten dokter atau kepala perawat)

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		H. Apotek, laboratorium, klinik terapi fisik
F3	<p>Apa tujuan anggota rumah tangga Anda dalam mengunjungi fasilitas kesehatan tersebut?</p> <p>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</p>	<p>A. Imunisasi</p> <p>B. Layanan kontrasepsi (<i>keluarga berencana</i>)</p> <p>C. Layanan pemantauan/pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan</p> <p>D. Pengobatan atau terapi, pemeriksaan kesehatan rutin</p> <p>E. Memeriksa diri terkait penyakit yang dirasakan</p> <p>F. Menjalani operasi atau rawat inap (tidak termasuk persalinan)</p> <p>G. Perawatan untuk COVID-19</p> <p>H. Mengunjungi fasilitas kesehatan untuk meminta surat kesehatan</p> <p>I. Melakukan tes COVID-19 (rapid atau swab)</p>
F4	<p>Sejak bulan April 2020, apakah ada anggota rumah tangga Anda yang menggunakan pelayanan kesehatan online berbasis aplikasi untuk berbagai hal, seperti konsultasi dan pembelian obat?</p>	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p>
F5	<p>Sejak bulan April 2020, apakah ada anggota rumah tangga Anda yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetapi tidak mendapatkannya?</p> <p><i>Termasuk mereka yang, misalnya, tidak mengakses pelayanan kesehatan karena takut tertular COVID-19.</i></p>	<p>1. Ya</p> <p>2. Tidak → F8</p>
F6	<p>Jika salah satu anggota rumah tangga Anda tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan [F5 = 1], pelayanan kesehatan apakah itu?</p> <p>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</p>	<p>A. Imunisasi</p> <p>B. Layanan kontrasepsi (<i>keluarga berencana</i>)</p> <p>C. Layanan pemantauan/pemeriksaan kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan</p> <p>D. Pengobatan atau terapi, pemeriksaan kesehatan rutin</p> <p>E. Memeriksa diri terkait penyakit yang dirasakan</p> <p>F. Menjalani operasi atau rawat inap (tidak termasuk persalinan)</p> <p>G. Perawatan untuk COVID-19</p> <p>H. Mengunjungi fasilitas kesehatan untuk meminta surat kesehatan</p> <p>I. Melakukan tes COVID-19 (rapid atau swab)</p>
F7	<p>Apa alasan atau penyebab anggota rumah tangga tersebut tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan?</p> <p>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</p>	<p>A. Takut mengunjungi fasilitas kesehatan karena takut terinfeksi COVID-19</p> <p>B. Tidak memiliki cukup uang untuk biaya pengobatan</p> <p>C. Tidak ditanggung oleh asuransi atau BPJS Kesehatan</p> <p>D. Tidak memiliki cukup uang untuk biaya transportasi atau tidak memiliki alat transportasi</p> <p>E. Tidak memiliki pendamping untuk menemani</p> <p>F. Layanan yang dibutuhkan tidak tersedia, atau fasilitas kesehatan kehabisan vaksin/obat</p> <p>G. Fasilitas kesehatan ditutup atau tidak menerima pasien umum</p> <p>H. Sudah melakukan pengobatan sendiri untuk mengobati sakitnya atau tidak merasa perlu berobat ke fasilitas kesehatan</p>
F8	<p>Sejak April 2020, apakah ada anggota rumah tangga dewasa di rumah tangga Anda yang telah merasa tidak bahagia, tertekan, atau mengalami kecemasan yang berlebihan?</p> <p>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</p>	<p>A. Ya, kepala rumah tangga</p> <p>B. Ya, isteri/suami</p> <p>C. Ya, kepala rumah anak laki-laki atau menantu laki-laki kepala rumah tangga</p> <p>D. Ya, anak perempuan atau menantu perempuan kepala rumah tangga</p> <p>E. Ya, ayah atau mertua laki-laki kepala rumah tangga</p> <p>F. Ya, ibu atau mertua perempuan kepala rumah tangga</p> <p>G. Anggota keluarga laki-laki lainnya</p> <p>H. Anggota keluarga perempuan lainnya</p>

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan Jawaban
		V. Ya, lainnya (orang yang tidak punya hubungan keluarga dengan kepala rumah tangga) W. Tidak satupun → F11
F9	Apa alasan anggota rumah tangga Anda menunjukkan perilaku tersebut? <i>Pilihan jawaban dapat dibaca kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Seorang anggota keluarga atau kenalan terinfeksi virus corona B. Kekhawatiran terinfeksi COVID-19 dan risiko kematian keluarga C. Masalah uang dan pekerjaan D. Masalah perawatan, perkembangan dan pendidikan anak E. Masalah rumah tangga (pertengkaran, perceraian, perselingkuhan, dan lain-lain) Y. Tidak tahu
F10	Bila ada anggota rumah tangga yang merasa cemas, siapa yang telah memberikan dukungan moral atau konseling? <i>Pilihan jawaban dapat dibaca kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu. Termasuk mengakses fasilitas kesehatan.</i>	A. Keluarga atau kerabat B. Teman atau tetangga C. Pemimpin keagamaan atau masyarakat D. LSM E. Tenaga medis seperti dokter F. Psikolog atau psikiater G. Tidak ada H. Tidak memerlukan dukungan eksternal
F11	Sejak April 2020, apakah ada perdebatan antara Anda dan pasangan Anda, atau antara anggota rumah tangga?	1. Ya 2. Tidak → MODUL G 97. Tidak mau menjawab → MODUL G
F12	Selama pandemi COVID-19, seberapa sering terjadi perdebatan di antara anggota rumah tangga ini?	A. Lebih sering dengan pasangan B. Lebih sering dengan anak-anak C. Lebih sering dengan anggota rumah tangga yang lain D. Sama dengan pasangan E. Sama dengan anak-anak F. Sama dengan anggota rumah tangga yang lain G. Lebih jarang dengan pasangan H. Lebih jarang dengan anak-anak I. Lebih jarang dengan anggota rumah tangga yang lain X. Tidak mau menjawab

MODUL G. DISABILITAS

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
G1	Apakah ada anggota rumah tangga ini yang mengalami salah satu hal berikut ini dengan banyak atau tanpa kesulitan?	A. Mengalami kesulitan atau masalah penglihatan B. Mengalami kesulitan atau masalah pendengaran C. Mengalami kesulitan atau masalah berjalan atau naik tangga D. Mengalami kesulitan atau masalah menggunakan atau menggerakkan tangan dan jari E. Mengalami kesulitan atau masalah dengan ingatan atau konsentrasi F. Mengalami masalah perilaku dan/atau emosi G. Mengalami kesulitan atau masalah berbicara dan/atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain H. Mengalami kesulitan atau masalah merawat dirinya sendiri (seperti mandi, makan, berpakaian, kencing, BAB) I. Tidak tahu → MODUL H Y. Tidak ada yang sesuai (tidak ada penyandang disabilitas) → MODUL H
G2	Siapa anggota rumah tangga yang menyandang disabilitas?	A. Balita (2–4 tahun) → G4 B. Anak-anak (5–17 tahun) C. Dewasa (18–59 tahun) D. Lanjut usia (60 tahun ke atas)

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
G3	Tentang rumah tangga yang mempunyai anggota penyandang disabilitas, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apakah mereka memerlukan bantuan dari orang lain, ataukah mereka mampu melakukan aktivitas sendiri?	A. Sepenuhnya mandiri B. Belum mandiri, masih perlu ditemani dalam beberapa aktivitas C. Sepenuhnya tergantung pada yang menemani
G4	Bagi rumah tangga yang memiliki anggota penyandang disabilitas, apa yang paling terdampak atau terpengaruh oleh pandemi COVID-19?	1. Aktivitas harian (ibadah, pertemuan) 2. Aktivitas bekerja 3. Akses ke obat-obatan, layanan terapi atau fasilitas layanan kesehatan 4. Gangguan psikologis (gangguan makan, sulit tidur, dan lain-lain) 5. Akses air bersih dan sanitasi 95. Lain-lain 96. Nihil
G5	Sejak April 2020, bantuan apa yang diterima oleh anggota rumah tangga Anda yang menyandang disabilitas sehubungan dengan pandemi COVID-19? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Tunai (termasuk PKH) B. Bahan pangan/makanan C. Vitamin/obat-obatan D. Peralatan medis (kursi roda, kaki buatan, alat bantu dengan, dan lain-lain) E. Pelatihan keterampilan untuk bekerja F. Pelatihan keterampilan untuk melakukan terapi mandiri V. Lain-lain W. Tidak menerima bantuan apapun → G7
G6	Kalau mereka menerima bantuan [G5 ≠ W], dari mana asal bantuan tersebut? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Pemerintah Pusat/Daerah B. Pemerintah Desa C. Perusahaan Swasta D. LSM E. Individu F. Tidak tahu
G7	Apakah anggota rumah tangga Anda yang menyandang disabilitas pernah menerima penjelasan tentang pencegahan COVID-19 khusus untuk penyandang disabilitas dengan cara bertemu langsung?	1. Ya 2. Tidak → G9
G8	Kalau mereka pernah menerima penjelasan [G6 = 1], siapa yang memberikan penjelasan? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Perangkat desa B. Tenaga medis C. Fasilitator Disabilitas dari Kementerian Sosial D. Masyarakat setempat E. Organisasi Nonpemerintah (LSM) F. Tim CSR sebuah perusahaan G. Keluarga v. Lainnya
G9	Apakah saat ini ada anggota rumah tangga penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan mengunjungi fasilitas kesehatan karena pandemi COVID-19?	1. Ya 2. Tidak → G11
G10	Kalau penyandang disabilitas mengalami kesulitan [G9 = 1], apa keluhannya? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	A. Tidak mengunjungi fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19 B. Waktu kunjungan sangat terbatas C. Fasilitas yang dibutuhkan tidak tersedia/jarang D. Fasilitas kesehatan tutup atau tidak menerima pasien umum E. Jumlah personel medis terbatas karena pandemi, yang mengakibatkan antrian panjang F. Kenaikan biaya G. Pasien penyandang disabilitas tidak diterima H. Akses ke transportasi menuju fasilitas kesehatan sulit I. Lainnya

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
G11	Apakah ada anggota rumah tangga penyandang disabilitas yang memerlukan pendampingan atau terapi teratur, paling tidak setiap 3 bulan?	1. Ya 2. Tidak → MODUL H
G12	<p>Kalau mereka memerlukannya [G11 = 1], bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pendampingan atau terapi bagi penyandang disabilitas?</p> <p><i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i></p>	A. Durasi layanan dikurangi B. Layanan dihapuskan C. Tarif layanan meningkat D. Layanan dilakukan secara online E. Anggota rumah tangga harus mendampingi atau memberikan terapi F. Tidak ada layanan profesional yang bisa diakses v. Lainnya

MODUL H. PEKERJAAN

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
H1	Sejak April 2020, siapa yang telah bekerja mencari nafkah untuk rumah tangga ini? Pastikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila responden atau anggota rumah tangga memiliki usaha atau pekerjaan sampingan 2. Apabila ada anak-anak atau anggota rumah tangga yang membantu bekerja 	A. Kepala rumah tangga B. Istri/suami kepala rumah tangga C. Anak atau menantu laki-laki kepala rumah tangga D. Anak atau menantu perempuan kepala rumah tangga E. Ayah atau ayah mertua dari kepala rumah tangga F. Ibu atau ibu mertua kepala rumah tangga G. Laki-laki lain anggota rumah tangga H. Perempuan lain anggota rumah tangga I. Orang lain/bukan anggota rumah tangga ini W. Tidak ada yang bekerja → H3
H2	Berapa banyak anggota keluarga Anda yang bekerja mencari nafkah?	□□□ orang
H3	Sejak April 2020, siapa pencari nafkah utama dalam rumah tangga ini? Pencari nafkah utama adalah orang yang memiliki kontribusi keuangan terbesar yang dibutuhkan oleh rumah tangga	1. Kepala rumah tangga 2. Suami/istri 3. Anak laki-laki atau menantu laki-laki 4. Anak perempuan atau menantu perempuan 5. Ayah atau ayah mertua 6. Ibu atau ibu mertua 7. Anggota keluarga laki-laki lainnya 8. Anggota keluarga perempuan lainnya 95. Lain-lain 96. Tidak ada yang bekerja atau bertindak sebagai pencari nafkah utama → H5
H4	Dalam seminggu terakhir, apakah pencari nafkah utama bekerja?	1. Ya → H_cek1 2. Tidak
H5	Kalau ia tidak bekerja [H1=W atau H4=2], di seminggu terakhir, apakah pencari nafkah utama mempunyai pekerjaan/usaha, tapi ia sementara tidak bekerja? Termasuk kalau ia diberhentikan sementara/dirumahkan tanpa konfirmasi pemutusan hubungan kerja	1. Ya 2. Tidak → H_Cek1
H6	Apakah alasan utama pencari nafkah utama sementara tidak bekerja selama seminggu terakhir berhubungan dengan pandemi COVID-19?	1. Ya 2. Tidak → H_Cek1
H7	Kalau pencari nafkah utama sementara tidak bekerja karena pandemi COVID-19, kapan bulan terakhir ia bekerja?	1. Maret 2020 2. April 2020 3. Mei 2020 4. Juni 2020 5. Juli 2020 6. Agustus 2020 7. September 2020

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
		8. Oktober 2020
H8	Apakah pencari nafkah utama masih memperoleh pendapatan/gaji/upah selama kurun waktu ketika ia sementara tidak bekerja?	1. Ya, dan jumlahnya sama 2. Ya, tetapi jumlahnya berkurang 3. Tidak
H9	Apakah ada jaminan bahwa pencari nafkah utama bisa kembali bekerja di unit usaha/tempat kerja saat ini?	1. Ya 2. Tidak 8. Tidak tahu
H_Cek1	CATATAN PEWAWANCARA APAKAH PENCARI NAFKAH UTAMA BEKERJA MINGGU LALU ATAU BIASANYA BEKERJA TETAPI TIDAK BEKERJA MINGGU LALU? Syarat: H4=1 atau H5=1	1. Ya 2. Tidak → H17
H10	Dalam seminggu terakhir, apa jenis usaha/bidang pekerjaan pencari nafkah utama? <i>Kalau pencari nafkah utama sementara waktu tidak bekerja, maka informasi mengenai pekerjaan diisi dengan informasi mengenai pekerjaan yang ditinggalkan oleh responden untuk sementara waktu</i>	1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 2. Penambangan dan Penggalian 3. Industri 4. Keperluan 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Restoran, dan Jasa Akomodasi 7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 8. Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Rental & Layanan Perusahaan 9. Layanan masyarakat, sosial dan individu
H11	Apa status/posisi pencari nafkah utama dalam pekerjaan utamanya?	1. Wiraswasta 2. Pemilik usaha yang dibantu oleh pekerja tidak tetap/pekerja tidak dibayar/keluarga 3. Pemilik usaha yang dibantu oleh pekerja tetap/dibayar 4. Buruh/karyawan 5. Tenaga kerja lepas di bidang pertanian 6. Tenaga kerja lepas di bidang nonpertanian 7. Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar
H12	Berapa jam pencari nafkah utama bekerja di minggu lalu? <i>Mulailah menyelidiki dari hari dan jam kerja. Berapa hari ia bekerja dalam seminggu? Berapa jam ia bekerja dalam sehari? Tidak termasuk waktu istirahat.</i> <i>Jika pencari nafkah utama saat ini sedang tidak bekerja, informasi mengenai pekerjaan diisi dengan informasi jumlah jam kerja dalam seminggu</i>	1. <input type="text"/> jam 888. Tidak tahu
H13	Apakah pencari nafkah bekerja dari rumah? <i>Tempat kerja bisa berupa kantor, pabrik, pasar, sawah, laut, dan lain-lain</i>	1. Sepenuhnya bekerja dari rumah sejak sebelum pandemi/April 2020 2. Sepenuhnya bekerja dari rumah sejak pandemi/April 2020 3. Secara bergantian bekerja dari rumah dan di tempat kerja 4. Sepenuhnya bekerja di tempat kerja
H14	Apakah ia bekerja sebagai buruh/tenaga kerja lepas [H11=4,5,6], upah atau imbalan yang dibayarkan untuk pekerjaan itu dihitung berdasarkan apa?	1. Bulanan 2. Mingguan 3. Harian 4. Dibayarkan sekaligus 5. Dibayarkan per unit yang selesai 6. Komisi atau tip 7. Musiman 96. Tidak relevan → H16

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
H15	Kalau ia bekerja sebagai buruh/pekerja lepas [H11=4,5,6], apa dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan pencari nafkah utama sebagai tenaga kerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji dan tunjangan meningkat 2. Gaji dan tunjangan dikurangi/dipotong 3. Diberhentikan sementara 4. Diberhentikan oleh perusahaan (PHK tetap) 5. Bekerja di rumah kurang kondusif 6. Tidak ada tawaran pekerjaan/jumlah pekerjaan yang ditolak 95. Lainnya 96. Tidak terpengaruh
H16	Apakah pencari nafkah utama mempunyai pekerjaan/usaha sampingan?	<ol style="list-style-type: none"> A. Ya, sejak sebelum April 2020 B. Ya, sejak April 2020 C. Tidak
H17	Apakah pencari nafkah utama sedang mencari pekerjaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, sejak sebelum April 2020 2. Ya, sejak April 2020 3. Tidak
H18	Apakah pencari nafkah utama sedang mendirikan usaha? <i>Kalau usaha tersebut sudah berjalan, pilih "Tidak".</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, sejak sebelum April 2020 2. Ya, sejak April 2020 3. Tidak
H_Cek 2	CATATAN PEWAWANCARA: APAKAH PENCARI NAFKAH UTAMA SAAT INI SEDANG MENCARI PEKERJAAN ATAU MENDIRIKAN USAHA? Syarat: H17 atau H18 dijawab 1 atau 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak → H20
H19	Kalau ia sedang mencari pekerjaan atau mendirikan usaha, apa alasan utama pencari nafkah utama mencari pekerjaan dan/atau mendirikan usaha?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa bertanggung jawab untuk mencari nafkah/membantu perekonomian rumah tangga atau keluarga 2. Mendapatkan lebih banyak penghasilan 3. Pekerjaan saat ini kurang sesuai 4. Diberhentikan secara tetap 5. Usaha ditutup 6. Tidak ada kontrak/kontrak tidak diperpanjang 7. Membantu orang lain/lingkungan sekitar 95. Lainnya
H20	Apakah pencari nafkah utama sebelumnya pernah memiliki pekerjaan/usaha?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, pekerjaan/usaha berhenti/berubah karena pandemi COVID-19 2. Ya, pekerjaan/usaha berhenti/berubah karena alasan lain → H24 3. Tidak → H24
H21	Kalau pencari nafkah utama berhenti/berganti pekerjaan/usaha karena pandemi COVID-19, bulan apa ia terakhir kali bekerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maret 2020 2. April 2020 3. Mei 2020 4. Juni 2020 5. Juli 2020 6. Agustus 2020 7. September 2020 8. Oktober 2020
H22	Apa jenis usaha/pekerjaan pencari nafkah utama sebelumnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 2. Penambangan dan Penggalan 3. Industri 4. Keperluan 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Restoran, dan Jasa Akomodasi 7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 8. Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Rental & Layanan Perusahaan 9. Layanan masyarakat, sosial dan individu

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
H23	Apa status/posisi pencari nafkah utama dalam pekerjaan sebelumnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wiraswasta 2. Pemilik usaha yang dibantu oleh pekerja tidak tetap/pekerja tidak dibayar/keluarga 3. Pemilik usaha yang dibantu oleh pekerja tetap/dibayar 4. Buruh/karyawan 5. Tenaga kerja lepas di bidang pertanian 6. Tenaga kerja lepas di bidang nonpertanian 7. Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar
H24	Sejak April 2020, apakah anggota rumah tangga yang lain berganti pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan atau mendirikan usaha? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Ya, mereka sedang mencari pekerjaan B. Ya, mereka memperoleh pekerjaan baru C. Ya, mereka memperoleh pekerjaan sampingan D. Ya, mereka sedang mendirikan usaha E. Ya, mereka telah membuka usaha baru F. Seseorang kehilangan pekerjaan W. Tidak ada yang berubah → H27
H25	Apakah alasan anggota rumah tangga berganti pekerjaan/mencari pekerjaan/mendirikan usaha berhubungan dengan pandemi COVID-19?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak → H27
H26	Kalau saat ini sedang mendirikan usaha [H24=D dan H25=1 atau H18=1,2], dari mana mereka mendapatkan modal awal? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i> <i>Kalau usaha tersebut sudah berjalan, tidak perlu menjawab pertanyaan ini (jawab pertanyaan di Modul I)</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Menggunakan tabungan sebagai modal awal B. Menjual aset untuk modal awal C. Mencari pinjaman dari keluarga atau teman untuk modal awal D. Mencari pinjaman dari bank atau lembaga keuangan untuk modal awal E. Mencari pinjaman dari program pemerintah seperti KUR, Mekaar, UMI untuk modal awal Y. Belum tahu W. Tidak sesuai
H27	Sejak April 2020, adakah anggota rumah tangga yang mengklaim Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan setelah mereka berganti pekerjaan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 96. Tidak relevan karena mereka tidak mempunyai JHT
H28	Sejak April 2020, adakah anggota rumah tangga yang mengubah status kepesertaan BPJS Kesehatan mereka menjadi peserta mandiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 96. Tidak relevan karena mereka tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan
H29	Adakah anggota rumah tangga berusia di bawah 18 tahun yang sedang bekerja atau membantu bekerja untuk mencari nafkah? <i>Jawaban bisa dibacakan untuk menyelidiki. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Ya, sejak sebelum April 2020 B. Ya, sejak April 2020 C. Tidak → MODUL I W. Tidak relevan karena tidak ada anggota rumah tangga yang berusia di bawah 18 tahun → MODUL I
H30	Apa jenis usaha/pekerjaan anggota rumah tangga? <i>Jawaban bisa dibacakan untuk menyelidiki. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan B. Penambangan dan Penggalian C. Industri D. Keperluan E. Konstruksi F. Perdagangan, Restoran, dan Jasa Akomodasi G. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi H. Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Rental & Layanan Perusahaan I. Layanan masyarakat, sosial dan individu

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

MODUL I. USAHA MIKRO DAN KECIL

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
I1	Adakah anggota rumah tangga Anda yang memiliki usaha? <i>Enumerator menyelidiki, siapa yang terutama mengelola usaha. Kalau ada lebih dari satu usaha, pilih yang utama atau yang memberikan keuntungan terbanyak</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya, anggota rumah tangga laki-laki 2. Ya, anggota rumah tangga perempuan 3. Ya, dijalankan bersama oleh semua anggota rumah tangga 4. Ya, dijalankan oleh orang lain (bukan anggota rumah tangga) 5. Tidak → MODUL J
I2	Kapan usaha tersebut dimulai?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih dari 10 tahun yang lalu 2. 5-10 tahun yang lalu 3. <5 tahun yang lalu sampai sebelum April 2020 4. Dimulai April 2020
I3	Apa yang membuat anggota rumah tangga ini memutuskan memulai usaha? <i>Jawaban bisa dibacakan untuk menyelidiki. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Kehilangan pendapatan utamanya B. Mencari pendapatan tambahan C. Memanfaatkan waktu luang D. Terinspirasi/mengikuti rekan-rekan E. Membantu orang lain/lingkungan sekitar F. Pendapatan tambahan v. Lainnya
I4	Apa jenis usahanya? <i>Kalau ada lebih dari satu usaha, pilih usaha yang menurut responden adalah yang utama.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan 2. Penambangan dan Penggalian 3. Industri 4. Keperluan 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Restoran, dan Jasa Akomodasi 7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi 8. Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Rental & Layanan Perusahaan 9. Layanan masyarakat, sosial dan individu
I5	Bagaimana usaha tersebut beroperasi saat ini? <i>Selidikilah, kalau usaha tersebut buka, apakah menerapkan protokol kesehatan, yaitu mengenakan masker, dan lain-lain.</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka/menerima pesanan seperti biasa 2. Buka seperti biasa, dengan menerapkan protokol kesehatan 3. Buka dengan jam operasional terbatas atau dengan kapasitas terbatas, dengan menerapkan protokol kesehatan 4. Tutup sementara 95. Lainnya
I6	Sejak April 2020, apakah ada perbedaan dalam cara Anda memasarkan produk Anda? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Menambahkan pemasaran melalui media sosial (instagram, Facebook, Whatsapp, Line) B. Menambahkan pemasaran melalui marketplace (Shopee, Tokopedia, Bukalapak.) C. Menambahkan pemasaran melalui aplikasi jasa pengantaran online (GoFood, GrabFood, dan lain-lain.) D. Tidak ada perubahan, sebelumnya sudah menggunakan platform online E. Tidak ada perubahan, hanya menggunakan pemasaran konvensional (menjual produk secara tatap muka) F. Menimbun produk sambil menunggu saat menjual v. Lainnya
I7	Efek apa yang ditimbulkan COVID-19 pada usaha? <i>Pilihan jawaban dapat dibacakan kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i>	<ol style="list-style-type: none"> A. Pembeli meningkat B. Pembeli menurun C. Biaya operasi dan bahan mentah meningkat D. Biaya operasi dan bahan mentah menurun E. Penyaluran/distribusi barang sulit dilakukan F. Ketersediaan bahan mentah terganggu G. Pendapatan meningkat H. Pendapatan menurun I. Modal menurun

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
		J. Tidak bisa membayar angsuran pinjaman usaha V. Lainnya W. Tidak ada yang sesuai (tidak terdampak COVID-19)
I8	<p>Kalau pandemi COVID-19 mempengaruhi usaha [I7 ≠ W], sejak April 2020, strategi apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya?</p> <p><i>Pilihan jawaban dapat dibaca kepada responden untuk keperluan penyelidikan. Jawaban boleh lebih dari satu.</i></p>	<p>A. Mengurangi jumlah tenaga kerja (Memberhentikan)</p> <p>B. Memberhentikan sementara sebagian tenaga kerja</p> <p>C. Meningkatkan jumlah tenaga kerja</p> <p>D. Tidak membayar tenaga kerja</p> <p>E. Mengurangi gaji tenaga kerja</p> <p>F. Menaikkan gaji tenaga kerja</p> <p>G. Tidak memberikan bonus</p> <p>H. Mengurangi pembelian/pengeluaran yang kurang penting</p> <p>I. Mengurangi jam operasional</p> <p>J. Menjual secara online/melalui aplikasi</p> <p>K. Mengurangi modal awal/menjual aset</p> <p>L. Meningkatkan modal awal/membeli aset</p> <p>M. Mengganti produk</p> <p>N. Menutup usaha sementara</p> <p>V. Lainnya</p> <p>W. Tidak ada yang sesuai (Tidak ada strategi khusus yang diterapkan)</p>
I9	<p>Apakah ada anak usia 18 tahun yang membantu atau bekerja dalam usaha ini?</p> <p><i>Pilihan jawaban bisa dibaca untuk menyelidiki Jawaban bisa lebih dari satu.</i></p>	<p>A. Ya, seorang anak/anak-anak di rumah tangga ini</p> <p>B. Ya, seorang anak/anak-anak tetapi bukan dari rumah tangga ini</p> <p>C. Tidak → I11</p>
I10	<p>Kalau ya, apakah mereka dibayar?</p> <p><i>Pilihan jawaban bisa dibaca untuk menyelidiki Jawaban boleh lebih dari satu.</i></p>	<p>A. Ya, dengan uang</p> <p>B. Ya, dengan barang</p> <p>C. Pembayaran tidak pasti</p> <p>D. Tidak dibayar</p>
I11	<p>Dari mana asal modal usaha yang digunakan?</p> <p><i>Pilihan jawaban bisa dibaca untuk menyelidiki Jawaban boleh lebih dari satu.</i></p>	<p>A. Keuntungan usaha</p> <p>B. Tabungan</p> <p>C. Aset</p> <p>D. Keluarga atau teman</p> <p>E. Koperasi</p> <p>F. Bank komersial (Program Kredit Usaha Rakyat)</p> <p>G. Bank komersial atau bank perkreditan (BPR), program selain KUR</p> <p>H. Leasing</p> <p>I. Pegadaian</p> <p>J. Pinjaman online</p> <p>K. Program kredit mikro seperti: Mekaar, UMI untuk modal awal</p> <p>L. Lintah darat</p> <p>M. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p>
I12	<p>Apakah usaha tersebut saat ini mempunyai hutang atau pinjaman yang belum lunas?</p>	<p>A. Dari keluarga atau teman</p> <p>B. Dari koperasi</p> <p>C. Dari bank komersial (Program Kredit Usaha Rakyat)</p> <p>D. Dari bank komersial atau bank perkreditan (BPR), program selain KUR</p> <p>E. Dari leasing</p> <p>F. Dari pegadaian</p> <p>G. Dari pinjaman online</p> <p>H. Dari program mikro kredit seperti: Mekaar, UMI untuk modal awal</p> <p>I. Dari lintah darat</p> <p>J. Dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p> <p>W. Tidak mempunyai hutang/pinjaman → I14</p>
I13	<p>Sejak April 2020, apakah Anda bisa membayar angsuran berikutnya secara teratur?</p>	<p>1. Ya, saya bisa</p> <p>2. Tidak, saya tidak bisa</p>

Lampiran IX (lanjutan). Daftar pertanyaan

Var	Pertanyaan	Pilihan jawaban
		3. Sedang ditangguhkan
I14	Apakah Anda tahu atau apakah Anda menerima bantuan untuk usaha skala menengah, kecil, dan mikro (UMKM)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima bantuan tunai bagi UMKM (BLT UMKM) 2. Menerima relaksasi 3. Menerima bantuan tunai maupun relaksasi utang 4. Tahu, tidak menerimanya → MODUL J 5. Tahu, tapi tidak tahu cara mendaftarnya → MODUL J 6. Tahu, tapi tidak mendaftar karena tidak memerlukannya → MODUL J 98. Tidak tahu tentang bantuan apapun → MODUL J
I15	<p>Kalau Anda menerima bantuan (I14 = 1,2,3), untuk apa bantuan tersebut?</p> <p><i>Pilihan jawaban bisa dibaca untuk menyelidiki Jawaban boleh lebih dari satu.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> A. Sebagai modal tambahan B. Sebagai modal baru C. Menggaji karyawan D. Membayar pemasok E. Membayar angsuran pinjaman usaha F. Membayar biaya pemasaran G. Membeli kebutuhan rumah tangga V. Lainnya

MODUL J. AKHIR WAWANCARA

C12	<p>Berapa jumlah seluruh bantuan sosial yang diterima?</p> <p>(C_Cek_1 = paling tidak satu pertanyaan C1 dijawab Ya)</p>	<p>1. Rp <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>999. Tidak mau menjawab 998. Tidak tahu</p>
J1	Bagaimana wawancara rumah tangga ini berlangsung?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berhasil dan terisi penuh 2. Tidak terisi penuh 3. Ditolak (nomor telepon) 4. Dipindahkan di luar blok sensus 5. Rumah tangga membatalkan 6. Tidak ditemukan 7. Rumah tangga bergabung dengan rumah tangga lain
J2	Apakah rumah tangga mau diwawancarai lebih mendalam melalui telepon?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak
J3	Isi catatan pewawancara	
J4	<p>Wawancara selesai. Ucapkan terima kasih kepada responden dan ingatkan bahwa akan ada wawancara lanjutan melalui telepon sebanyak tiga kali.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak

Waktu akhir wawancara	<input type="text"/> : <input type="text"/>
Mengatur GPS	
Mengatur foto	

----- AKHIR WAWANCARA -----



UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND

World Trade Center (WTC) 2, Lantai 22
Jl. Jend. Sudirman Kav 31
Jakarta 12910 Indonesia
Telepon: +62 21 50916100
www.unicef.org

UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

Menara Thamrin Lantai 7 - 9
Jl. MH Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250
Indonesia
Telepon: +62 21 29802300
www.id.undp.org

**PROSPERA
(KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA UNTUK
PEMBANGUNAN EKONOMI)**

International Financial Centre
Tower 2, Lantai 17, Jl. Jendral Sudirman, Kav 22-23
Jakarta Selatan, 12920
Indonesia
Telepon: +62 21 50823500
prospera.or.id

THE SMERU RESEARCH INSTITUTE

Jl. Cikini Raya No. 10A, Jakarta 10330,
Indonesia
Telepon: +62 21 31936336
smeru.or.id